

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK  
MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMP TERPADU  
BUSTANUL ARIFIN BENER MERIAH**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Manajemen Pendidikan Islam



**Oleh:**

**Isnaini**

**Nim: 20210530036**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKESEUMAWE  
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK  
MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMP TERPADU  
BUSTANUL ARIFIN BENER MERIAH**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Manajemen Pendidikan Islam

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



**Oleh:**

**Isnaini**

**Nim: 20210530036**

**Pembimbing I : Dr. Muhammad Fadhli, M.Pd**

**Pembimbing II : Dr. Zainuddin Hasibuan, MS**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKSEUMAWE  
TAHUN 1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Manajemen Pembiayaan merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin. Pentingnya manajemen pembiayaan yaitu dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang mana dengan adanya fungsi tersebut dapat mendukung dan berimplikasi pada upaya meningkatkan mutu SMP terpadu Bustanul Arifin. Upaya peningkatan mutu sekolah dapat berjalan dan terealisasi dengan baik dengan di dukung oleh oleh manajemen pembiayaan yang baik pula. Tujuan Penelitian ini adalah (a) Menjelaskan sistematis perencanaan pembiayaan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, (b) Menganalisis pengelolaan sumber-sumber dana pembiayaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, (c) Mendeskripsikan akuntabilitas pembiayaan sekolah yang terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa manajemen pembiayaan pada SMP Terpadu Bustanul Arifin sudah baik mulai dari tahap perencanaan anggaran kemudian sistematis pelaksanaan sampai dengan tahap pengelolaan. Pada perencanaan semua anggaran telah didiskusikan dengan seluruh pihak yang terkait, kemudian berjalan pada pelaksanaan yang telah di perinci sebelumnya agar tidak terdapat gagal pemanfaatan, sampai dengan tahap pengawasan pada kegiatan yang telah dilaksanakan mengenai seluruh pembukuan, sehingga pengelolaan tepat sasaran seperti yang diharapkan dapat meningkatkan mutu SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah..

**Kata Kunci: Pengelolaan, Sumber Dana, Akuntabilitas.**

## ABSTRACT

*Outlay Management is important in efforts to improve the quality of the Bustanul Arifin Integrated Middle School. The importance of financing management is in budgeting, implementation and supervision, where these functions can support and have implications for efforts to improve the quality of Bustanul Arifin Integrated Middle School. Efforts to improve school quality can run and be realized well, supported by good financial management. The objectives of this research are (a) to explain the systematic planning of school financing in improving school quality at Bustanul Arifin Bener Meriah Integrated Middle School, (b) to analyze the management of funding sources at Bustanul Arifin Bener Meriah Integrated Middle School, (c) to describe the accountability of school financing. found at Bustanul Arifin Bener Meriah Integrated Middle School. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive research approach. The data collection techniques used in this research are through observation, interviews and document study. Based on the results of the research that has been carried out, the results show that financing management at Bustanul Arifin Integrated Middle School is good starting from the budget planning stage then systematic implementation up to the management stage. In planning all budgets have been discussed with all related parties, then proceed with the implementation that has been detailed previously so that there are no failures in utilization, up to the monitoring stage of activities that have been carried out regarding all bookkeeping, so that management is right on target as expected can improve quality Bustanul Arifin Bener Meriah Integrated Middle School.*

*Keywords: Management, Fund Sources, Accountability.*

## مستخلص البحث

إدارة التمويل هي جميع الأنشطة المتعلقة باتخاذ قرارات إدارة المال والأصول المالية والأنشطة المتعلقة بتطوير المدرسة، كما يتم تنفيذه في مدرسة إعدادية تربوية بستان العارفين بنير ميرياه. وهدف هذه الدراسة هو شرح نظامي لتخطيط المال في المدرسة لتحسين جودة التعليم في مدرسة إعدادية تربوية بستان العارفين بنير ميرياه، وتحليل إدارة مصادر التمويل في المدرسة، ووصف المساءلة المالية للمدرسة في مدرسة إعدادية تربوية بستان العارفين بنير ميرياه. وتم استخدام منهجية البحث النوعية بتوجيه البحث الوصفي في هذه الدراسة. وتم استخدام تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المراقبة والمقابلات ودراسة الوثائق. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة المال في مدرسة إعدادية تربوية بستان العارفين جيدة بدءًا من التخطيط المالي ثم التنفيذ المنهجي وصولاً إلى من يتحمل المسؤولية في الرقابة على هذه الأنشطة. في إدارة المال، تم التعامل بشكل جيد أيضًا من خلال إدارة مصادر التمويل المستلمة بأقصى استفادة ثم مراقبتها من قبل مدير المدرسة والمشرف بشأن الحسابات وتنفيذ الأنشطة، لتقليل أخطاء إدارة الميزانية وبالتالي تعزيز الجودة المتوقعة في مدرسة إعدادية تربوية بستان العارفين.

**الكلمات الرئيسية: إدارة، تمويل، جودة المدرسة**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISNAINI**  
Nim : 2021530036  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana  
Jurusan : Manajemen Pendidikan  
Judul Tesis : Manajemen Pembiayaan pendidikan Untuk  
Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu  
Bustanul Arifin Bener Meriah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lhokseumawe, Mei 2023  
Yang Menyatakan



**ISNAINI**  
Nim. 2021530004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARABIC-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es danye
ص	S <sub>ad</sub>	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (') Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َـ	Fathahdanya	Ai	Adan I
◌ُـ	Fathahdan Wau	Au	AdanU

## 2. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Minsal
اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Â	a dangar isdi atas	قَبْل
إِ	<i>kasrahnya</i>	Ī	i dan garis diatas	لِيق
أُ	<i>d}ammahdanwau</i>	Û	u dan garis diatas	لِوقِي

### 3. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat tsukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h). Contoh: - raudah al- atf l ◊ raudatul atf l : روضة الأطفال - al-Madinatul al-munawwarah : المدينة المنورة - talhah : طلحة

### 4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: a. rabban : رَبَّ b. nazzala : نَزَّلَ - al-birr : بَرَّ - al-hajj : حَجَّ - nu“ima : نِعْمَ

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf t'(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

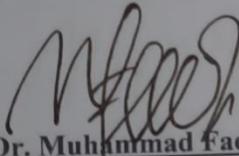
#### 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof(') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif. Contohnya: النُّؤءُ ditulis Annau'.

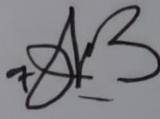
## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul : “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah” yang ditulis oleh Isnaini dengan NIM 2021530036, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam telah mengikuti *Sidang Tesis* pada Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Fadhil, M.Pd  
NIP. 198802012015031005

Pembimbing II

  
Dr. Zainuddin Hasibuan, MS  
NIP. 198303052011011012

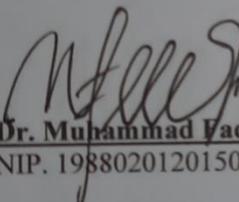
## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah” yang ditulis oleh Isnaini dengan NIM 2021530036, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam telah mengikuti *Sidang Tesis* Pascasarjana IAIN Lhokseumawe pada tanggal Lima, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

TIM PENQUJI:  
Ketua

Syahrizal, M. Ag., Ph. D  
NIP. 197608082007101003

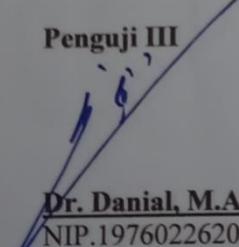
Penguji I

  
Dr. Muhammad Fadhli, M.Pd  
NIP. 198802012015031005

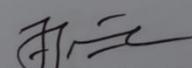
Penguji II

  
Dr. Zainuddin Hasibuan, MS  
NIP. 198303052011011012

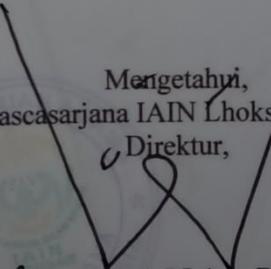
Penguji III

  
Dr. Danial, M.Ag  
NIP.197602262000031002

Penguji IV

  
Dr. Zurriyati, M.Hum  
NIP. 197710032005012009

Mengetahui,  
Pascasarjana IAIN Lhokseumawe  
Direktur,

  
Syahrizal, M.Ag., Ph. D  
NIP. 197608082007101003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas taufiq dan inayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia agung sepanjang zaman dan menjadi suri tauladan pembawa Rahmat bagi seluruh alam semesta yang diutus oleh Allah SWT, untuk memperbaiki akhlak manusia.

Tesis ini berjudul **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Di Smp Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah”** dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan baik moril maupun spiritual dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada:

1. Dr. Danial, M. Ag. selaku Rektor IAIN Lhokseumawe.
2. Bapak Syahrizal, M.Ag. Ph.D selaku Direktur program Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
3. Dr. Muhammad Fadhli,, M.Pd selaku dosen pembimbing pertama yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna mengarahkan dan membimbing serta memotivasi penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Zainuddin Hasibuan, MS selaku dosen pembimbing kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna mengarahkan dan membimbing serta memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Alm. Ibunda dan Ayahanda, suami, serta kakak-kakak dan adik-adik yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini .
7. Bapak ibu guru dan staf TU SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah yang telah memberikan kontribusi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada segenap Mahasiswa/i Pascasarjana IAIN Lhokseumawe program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Lhokseumawe, Oktober 2023  
Penulis,

ISNAINI  
NIM. 2021530036



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ix</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Perencanaan Anggaran Pendidikan.....	13
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	15
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	15
2. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	16
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Sekolah .....	18
4. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	21
5. Model Pengelolaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	27
6. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	28
7. Sumber Pembiayaan Pendidikan.....	33
D. Strategi Pemenuhan Anggaran Pendidikan.....	35
E. Manajemen Pembiayaan untuk Meningkatkan Mutu sekolah .....	37
1. Quality Cost .....	37
2. Fundraising.....	30
F. Mutu sekolah.....	40
1. Pengertian Mutu sekolah.....	40
2. Kontrol Mutu, Jaminan Mutu dan Mutu Terpadu .....	44
3. Upaya Meningkatkan Mutu sekolah .....	47

G. Kajian Teori dalam Perspektif Islam.....	51
1. Mutu sekolah Dalam Perspektif Islam .....	51
2. Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Islam .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Subjek Penelitian.....	59
D. Metode Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data.....	65
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Sistematis Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah .....	69
2. Pengelolaan Sumber Dana Pembiayaan Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.....	77
3. Akuntabilitas Pembiayaan Sekolah yang Terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.....	80
B. Pembahasan.....	94
1. Sistematis Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah .....	94
2. Pengelolaan Sumber-Sumber Dana Pembiayaan Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah .....	98
3. Akuntabilitas Pembiayaan Sekolah yang Terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.....	80
4. SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah .....	128
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Model Pengalokasian Pembiayaan di Sekolah/ Madrasah .....	21
<b>Tabel 4.2</b> Data Guru .....	91

**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

**Gambar 3.1** Lokasi Penelitian ..... 59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran I.</b>	SK Pembimbing tesis
<b>Lampiran II.</b>	Surat Izin Penelitian
<b>Lampiran III.</b>	Surat Balasan Penelitian
<b>Lampiran IV.</b>	Lembar Konsultasi tesis
<b>Lampiran V.</b>	Pedoman Wawancara
<b>Lampiran VI.</b>	Pedoman Observasi
<b>Lampiran VII.</b>	Lampiran Dokumentasi
<b>Lampiran VIII.</b>	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kompetisi dan persaingan saat ini antara lembaga pendidikan sudah terlihat jelas. Tentunya kompetisi dan persaingan tersebut didominasi oleh sekolah yang bermutu/berkualitas. Seperti pada lembaga pendidikan pada umumnya, kompetisi untuk menjadi pendidikan yang berkualitas juga terjadi pada lembaga pendidikan islam terpadu sehingga akan diminati para pelanggan pendidikan.

Sekolah Menengah Pertama Terpadu yang eksis, dikenal berdaya saing pasti memiliki mutu yang baik. Pendidikan yang berkualitas lahir dari sistem perencanaan yang baik, dengan materi dan sistem tata kelola yang baik juga, serta disampaikan dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang baik, dengan komponen pendidikan yang bermutu pula.<sup>1</sup> Sekolah dianggap bermutu dengan terpenuhinya standard dan Kriteria minimal pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan poin, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasaran, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Sedangkan SMP Terpadu dapat dikatakan bermutu apabila dapat memenuhi standar mutu yang ada dan dikembangkan oleh sekolah itu sendiri, atau memenuhi dan bahkan melebihi

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyasa, *Pendidikan Bermutu dan berdaya saing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 77.

komitmen mutu yang ditetapkan.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu dibutuhkan upaya, usaha dan strategi khusus dari sekolah agar dapat menjadi lembaga pendidikan islam yang bermutu, sehingga dapat memberi kepuasan kepada para pelanggannya. Saat ini upaya peningkatan mutu sekolah terpadu dalam kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Namun tentu dalam aplikasinya terdapat beberapa masalah atau problematika yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait biaya.

Biaya merupakan hal yang penting bagi penyelenggara lembaga pendidikan, termasuk sekolah terpadu. Apalagi terkait bagaiman biaya tersebut dikelola juga menentukan nasib suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan islam swasta. Maka posisi pembiayaan menjadi penting dan manajemen pembiayaan mutlak diperlukan. Dalam Konteks upaya meningkatkan mutu sekolah Terpadu, Manajemen pembiayaan diperlukan dalam rangka merencanakan anggaran, mencari dan menggali sumber biaya, menggunakan biaya seoptimal mungkin, melakukan pencantatan dan pembukuan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan biaya. Sehingga biaya yang ada dapat digunakan dengan optimal dalam menunjang dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Mutu yang baik dapat dicapai melalui pembiayaan yang baik pula.

SMP Terpadu Bustanul Arifin merupakan sekolah yang sangat diminati pada tahun 2013 sampai tahun 2019. Namun pada saat ini sekolah tersebut mengalami penurunan peminat yang awalnya jumlah peserta didik pada tahun 2018 sebanyak 435 siswa dan tahun 2019 sebanyak 390 siswa. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang pendidikan agama dan keagamaan.

sejalan dengan kurangnya kecermatan dalam pengelolaan pembiayaan pada sekolah tersebut. Pada saat program dilaksanakan, terdapat keterbatasan dana yang menyebabkan sulitnya menjalankan visi, misi, dan kebijakan lembaga pendidikan yang dituangkan dalam rencana strategisnya. Pembiayaan program yang tidak stabil ini sebelumnya telah dimasukkan dalam rencana pengeluaran. Dalam satu lembaga pendidikan, pembiayaan perlu dikelola dengan baik (*good goverment*), guna meningkatkan empat komponen akreditasi, yaitu kualitas lulusan, kualitas guru, proses pembelajaran dan juga manajemen sekolah yang diharapkan.

Agar proses pendidikan berjalan sesuai rencana, seperti di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, dana menjadi sumber utama. Sumber pendanaan diperoleh dari biaya sekolah, biaya penerimaan siswa baru, dana BOS, serta dukungan pembiayaan dari donator yang diberikan secara tidak rutin. Dana donatur tersebut diberikan lebih kepada ketika sekolah melakukan pembangunan atau rehab bagian tertentu. Seluruh pendapatan dana SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan lembaga, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana. Pada saat ini pembiayaan di SMP Bustanul Arifin sudah memadai namun belum terkelola dengan baik.

Di tesis Samiyah, yang judulnya "Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah". Ditemukan Hasil penelitian yaitu adanya peningkatan mutu sekolah setelah manajemen pembiayaan pendidikan diterapkan

dengan baik dan benar.<sup>3</sup> Dalam jurnal Waruwu yang berjudul “Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu sekolah” ditemukan hasil bahwa perencanaan pembiayaan mencakup penyusunan RKAM (Rencana Pembiayaan Anggaran Sekolah) yang dirapatkan setiap tahun ajaran baru dimulai dapat meningkatkan mutu sekolah.<sup>4</sup> Dalam Jurnal Pujiati yang berjudul “Manajemen pembiayaan sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah SMA PGRI Sumberrejo”. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi. Pembagian uang dalam RAPBS menggambarkan bagaimana pengelolaan pembiayaan dapat berdampak pada peningkatan standar pembelajaran di SMA PGRI Sumberrejo.<sup>5</sup> Dalam jurnal Sukardi yang berjudul “Penerapan manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 13 kota bima”. Ditemukan hasil bahwa salah satu tantangan untuk meningkatkan standar pengajaran di SMPN 13 Kota Bima diperkirakan adalah buruknya sarana dan prasarana dibandingkan dengan sekolah lain di Kota Bima. Minimnya sarana dan prasarana disebabkan anggaran yang kecil meskipun pengelolaan pembiayaan sekolah sudah baik dan sesuai prosedur, diperlukan anggaran yang cukup besar untuk pembelian sarana dan prasarana.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa penulis tersebut diatas maka penulis mengangkat judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk

---

3 Afiff, Samiyah,” *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah*”, 2016, h. 142.

4 Waruwu, Yaredi, *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah*. Vol. 5 No 3, 2022

5 Pujiati, Lilik, *Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu sekolah SMA PGRI Sumberrejo Tahun 2016/2017*, h. 68.

6 Sukardi. *Kajian Pendidikan dan Ekonomi*" Vol. 2, No. 2 Juni 2019.

Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah".  
Peneliti mengambil objek penelitian di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah karena menurut peneliti sekolah ini adalah lembaga pendidikan islam yang menjadi sekolah yang pernah banyak diminati akan tetapi pada saat ini mengalami penurunan disebabkan karena penurunan mutu sekolah.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan menurut latar belakang ialah:

1. Bagaimana sistematis perencanaan keuangan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah?
2. Bagaimana pengelolaan sumber-sumber dana pembiayaan sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah?
3. Bagaimana akuntabilitas pembiayaan sekolah yang terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan sistematis perencanaan keuangan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah
2. Menjelaskan pengelolaan sumber-sumber dana pembiayaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

3. Mendeskripsikan akuntabilitas pembiayaan sekolah yang terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai:

1. Secara Teoritis: Studi ini diantisipasi untuk meningkatkan pemahaman dan berfungsi sebagai platform untuk studi masa depan dalam pendidikan. khususnya tentang persekolahan yang berhubungan dengan penganggaran untuk pendidikan. Karena sulit mendapatkan pendanaan untuk meningkatkan standar pendidikan di institusi lain, pengelolaan pembiayaan dapat meningkatkan standar akademik. Oleh karena itu penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengelola lembaga-lembaga tertentu.
2. Secara praktis: Diperkirakan bahwa penelitian ini akan digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien mengelola pembiayaan dapat meningkatkan standar pendidikan dan kemajuan lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini dapat digunakan secara praktis untuk mengembangkan pemikiran dan mengkaji pentingnya pengelolaan dana saat ini dalam meningkatkan standar sehingga dapat menarik perhatian publik.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Peneliti mendefinisikan manajemen pembiayaan pendidikan sebagai praktik pengendalian anggaran sekolah untuk memenuhi tujuan yang telah

ditetapkan dan diantisipasi oleh lembaga untuk meningkatkan standar akademik. Dipenelitian ini, pengelolaan pembiayaan SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah ini adalah untuk meningkatkan mutu sekolah agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan diantisipasi.

## **2. Mutu Sekolah**

Kualitas dari sebuah pendidikan dalam lembaganya disebut mutu sekolah yang terdiri dari:

- a. Input mencakup penerimaan siswa baru, ujian seleksi masuk sekolah.
- b. Kegiatan yang menunjang belajar mengajar, seperti perpustakaan, LKS, laboratorium komputer atau IPA, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana prasarana.
- c. Output yaitu para lulusan/alumni SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah sebagaimana lulusan ini mampu mencapai target akhir belajarnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.
- d. Para alumni lulusan saat ini disebut sebagai OBE (*Out Come Base Education*) merupakan *out come*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Peneliti memilih topik ini karena menurutnya saat ini masih sedikit penelitian yang menganalisis atau membahas manajemen pembiayaan di pondok pesantren secara khusus.

Jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Pendidikan di SDN Percut Sei Tuan” ditulis oleh Izaak Yohannes Bastian Usmany, Eka Daryanto, dan Yuniarto Mudjisusatyo pada tahun 2019. Menurut hasil penelitian, orang tua siswa SD Percut Sei hanya mengeluarkan sedikit pengeluaran pribadi setiap tahunnya, sedangkan pengeluaran investasi sebagian besar terkait dengan biaya infrastruktur dan personel. Harga tanah, bangunan, buku, dan sumber daya pendidikan merupakan biaya infrastruktur dan fasilitas. Saat ini dana BOS digunakan untuk menutupi biaya operasional dan investasi SDN Percut Sei. Matin mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber pendanaan pemerintah pusat baik untuk kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tingkat akademik sekolah.

Jurnal Waruwu yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu sekolah” pada tahun 2022, fokus dalam penelitian ini untuk

mengetahui perencanaan pembiayaan yang ada di sekolah kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan (actuating). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan dilakukan agar sekolah dapat memiliki keduanya. Ujian RKAM yang diberikan setiap awal tahun ajaran baru merupakan hasil pertama dari perencanaan anggaran studi ini untuk peningkatan mutu sekolah. Aspek kedua dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah penerimaan dan penyaluran uang. Alokasi dana dalam RKAM, khususnya alokasi dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, alokasi dana untuk sarana dan prasarana sekolah dengan menambah fasilitas, memperbaiki, dan memeliharanya, menunjukkan bagaimana manajemen pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>7</sup>

Jurnal Sukardi yang berjudul “Penerapan manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 13 Kota Bima” pada tahun 2019. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mempelajari lebih jauh bagaimana pengelolaan pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan di SMPN 13 Kota Bima. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengelolaan pembiayaan SMPN 13 Kota Bima efektif dan sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan pemerintah. Salah satu tantangan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di SMPN 13 Kota Bima adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas dibandingkan dengan sekolah lain di Kota Bima. Keterbatasan dana menjadi penyebab minimnya infrastruktur dan fasilitas. Meskipun pengelolaan pembiayaan sekolah sangat baik dan sesuai dengan aturan,

---

<sup>7</sup> Waruwu, Yaredi. 2022. *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah*. Vol. 5 No 3, 2022, h.79.

diperlukan anggaran yang cukup besar untuk pembelian sarana dan prasarana. Sebagai bagian dari pendekatan pelaksanaan program manajemen sekolah, pemecahan masalah, peningkatan mutu, analisis SWOT, sosialisasi program, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sekolah, semuanya digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan.<sup>8</sup>

Jurnal Ridwan Ahmad pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor” Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah al-Kautsar Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang sumber pendanaan pendidikan di Perguruan Islam Al-Kautsar. Memahami sumber pendanaan sangat penting untuk mengoperasikan lembaga pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang sumber dana pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif yang hanya berkonsentrasi pada tindakan ontologis, seperti pengumpulan informasi berupa kata, kalimat, dan bahan tertulis. sehingga alih-alih menggunakan angka, analisis menginterpretasikan data menggunakan kata-kata, kalimat, atau dokumentasi lainnya. Penelitian ini juga sangat menekankan pada analisis induktif. Mencantumkan kehadiran peneliti, subyek dan obyek penelitian, cara pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian dilakukan, serta pemeriksaan keabsahan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengelola sekolah agar dapat mengidentifikasi sumber

---

<sup>8</sup> Sukardi. *Kajian Pendidikan dan Ekonomi*" Vol. 2, No. 2 Juni 2019

pendanaan Madrasah Al-Kaustar di Kecamatan Medan Johor dan menginformasikan kepada guru dan masyarakat umum.<sup>9</sup>

Tesis Zulhani Imaduddin pada tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Smp Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan metode pengelolaan pembiayaan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta sumber pendanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan sekolah. Metodologi kualitatif etnografi diterapkan dalam penyelidikan ini. Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Metode analisis meliputi penyajian data, model analisis reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi pengelolaan pembiayaan sekolah untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah mengadakan rapat pada awal tahun pelajaran untuk menyusun program dan memilih anggaran untuk pembahasan pelaksanaan guna melakukan revisi dan evaluasi serta memberikan solusi atau masukan, dari rencana yang disepakati dituangkan dalam RAPBS, 2) sumber pendanaan dan administrasi dana BOS sekolah, komite di sekolah, Alka ZIS, Koperasi Al-Kautsar, pemerintah daerah, donatur tidak tetap, tabungan siswa dan dana kegiatan ujian, dan bantuan alumni. 3) Akuntabilitas pembiayaan sekolah melalui buku kas harian dan buku kontrol pembiayaan, serta pertemuan bulanan, triwulan, dan akhir tahun. Pengelolaan pembiayaan sekolah diartikan sebagai RAPBS, pelaporan pembiayaan,

---

<sup>9</sup> Ridwan Ahmad, Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juli 2022.

pengawasan pembiayaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan. Dari hasil penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya akan fokus pada kewirausahaan sekolah, khususnya Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS), yang merupakan sumber pendanaan yang signifikan dan khas untuk SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK. Kata kunci: sumber pendanaan, pendekatan pengelolaan pembiayaan, dan akuntabilitas.

Jurnal Solehan yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam” pada Tahun 2022. Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan diatas ada peneliti ingin meneliti mengenai manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin. Hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian lokasi yang berbeda dapat

---

<sup>10</sup> Solehan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal pendidikan Edumaspul*. Vol 6 no 1, 2022.

berpengaruh juga terhadap manajemen dan juga berpengaruh terhadap mutu sekolah. SMP Terpadu Bustanul Arifin berlokasi di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit. Siswa yang berada pada SMP Tersebut mayoritas berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian kecil berasal dari Kabupaten Gayo lues. Diketahui bahwa penduduk yang berasal dari ketiga kabupaten tersebut kebanyakan bersuku gayo.

## **B. Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pendidikan**

Perencanaan adalah proses mengidentifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung inisiatif pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Perencanaan meliputi berbagai materi terkait anggaran serta pengembangan rencana menjadi uang untuk setiap komponen kegiatan. Perencanaan menurut Afifuddin, adalah proses pengambilan berbagai keputusan yang akan dipraktikkan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Anggaran ada tiga cara sudut pandang yaitu, *Coparative approach*, penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan. Penyusunan Program dan Perencanaan Penganggaran yang menitikberatkan pada rencana dan sasaran program baik secara spesifik maupun luas disebut *The Planning Programming Budgeting Evaluation System* (PPBES). Strategi ini mendasarkan evaluasi PPBES dan analisis dana implementasi pada penganggaran berbasis nol. Pendekatan fungsional; metode komparatif untuk penganggaran menggunakan kombinasi komponen PPBES.

Pengurus sekolah dapat melaporkan secara lugas, dan prosedur perencanaan anggaran juga cukup lugas. Format yang digunakan untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi sumber pendapatan, seperti dana rutin, DPP, DBO, OPF, dan BP3; biaya untuk kegiatan belajar mengajar; pengembangan sumber belajar dan perangkat pembelajaran; dan honorium dan kesejahteraan.

Melakukan seleksi dari berbagai pilihan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang merupakan proses perencanaan, salah satu fungsi manajemen. Sebelum implementasi tindakan, perencanaan adalah topik yang sangat penting. Jika suatu kegiatan tidak direncanakan dengan hati-hati, komplikasi akan muncul dan tidak akan berjalan sesuai rencana semula. Oleh karena itu, perencanaan strategis mutlak diperlukan untuk setiap organisasi atau lingkungan pendidikan.

Prosedur untuk menanggukkan rencana pendapatan termasuk memastikan bahwa semua jumlah uang yang terhutang dibayar penuh serta memastikan bahwa setiap cek yang telah disetujui untuk diuangkan. Satu-satunya jenis pengeluaran uang nyata yang diperlukan untuk melaksanakan setiap program yang diamanatkan adalah pembuatan anggaran untuk pembelajaran dan pembuatan anggaran.

Pemikiran reflektif, daya cipta, dan pandangan jauh ke depan diperlukan untuk perencanaan yang efektif, yang didasarkan pada penilaian fakta. Koordinasi dan partisipasi dari setiap komponen entitas diperlukan untuk perencanaan yang efektif. Menetapkan tujuan, yang merupakan tujuan atau hasil yang terukur, adalah bagian dari perencanaan

## **C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

### **1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen adalah proses bekerja dengan orang lain, membagi tugas dengan jelas, dan menggunakan instrumen khusus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah rencana. Ada komponen manajemen seperti orang, uang, material, mesin, proses, dan sebagainya yang diperlukan untuk menggerakkan aktivitas dan semuanya harus beroperasi bersama dalam sebuah strategi.

Karena biaya menjadi pertimbangan dalam setiap bagian kegiatan pembiayaan, maka fungsi manajemen dapat dioptimalkan. salah satu faktor yang mempengaruhi suatu tindakan. Ketersediaan biaya merupakan komponen penting dari semua operasi yang menghasilkan hasil keluaran berkualitas tinggi.<sup>11</sup> Alasan serupa berlaku untuk pendidikan, yang merupakan jenis investasi yang secara signifikan mempengaruhi dana yang tersedia.

Setidaknya tiga pernyataan terkait dapat ditemukan dalam gagasan dasar pembiayaan untuk pendidikan tinggi. Menurut Thomas John (1985:20), begitulah dana untuk lembaga pendidikan diperoleh, dari mana asalnya, digunakan untuk apa, dan siapa yang menggunakannya. Hal ini berkaitan dengan manajemen atau administrasi lembaga pendidikan. Selain itu, ia mengklarifikasi tiga hal krusial, antara lain ekonomi terkait alokasi pembiayaan terkait distribusi. Yang ketiga, bagaimanapun, berkaitan dengan manajemen, yang mencakup tugas dan elemen persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Akibatnya, pembiayaan pendidikan dan

---

<sup>11</sup> Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h. 35.

ekonomi pendidikan memberikan penekanan yang berbeda pada berbagai topik.<sup>12</sup>

Proses memperoleh uang (pendapatan) dan memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membayar semua program pendidikan yang dipilih dikenal sebagai pendanaan pendidikan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu:

Ukuran lembaga pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa terhadap guru atau dosen, kualifikasi guru, dan tingkat pertumbuhan penduduk (terutama di negara berkembang). merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi biaya pendidikan. Penyesuaian kebijakan berbasis gaji dan pendapatan (teori biaya pendapatan) sekarang dalam pengembangan.

Kegiatan perencanaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana sesuai rencana semuanya termasuk dalam pengelolaan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang berkualitas adalah yang dapat mewujudkan tertib administrasi pembiayaan yang memungkinkan dilakukannya pembukuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Terwujudnya tertib administrasi merupakan tujuan pengelolaan pembiayaan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pencapaian efisiensi dan efektivitas merupakan inti dari

---

<sup>12</sup> Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remasa Rosda, 2015), h. 57.

pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan pembiayaan, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lainnya, selain mengupayakan tersedianya dana yang cukup untuk kebutuhan pembangunan dan kegiatan operasional rutin di sekolah. Kebutuhan dana untuk kegiatan pendidikan dapat direncanakan, diusahakan untuk mengamankannya, dicatat secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaannya secara efektif dan efisien melalui kegiatan pengelolaan pembiayaan. Manajemen keuangan bertujuan:

- a. Agar penggunaan dana sekolah dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien.
- b. Transparansi dan akuntabilitas pembiayaan sekolah bisa ditingkatkan.
- c. Mengurangi jumlah uang yang disalahgunakan sekolah.

Sedangkan meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan seputar pembiayaan sekolah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah, serta mengurangi penyalahgunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu merupakan tujuan pengelolaan manajemen sekolah secara umum.<sup>13</sup>

Manajemen pembiayaan sekolah bertujuan untuk menumbuhkan uang yang sudah tersedia untuk sekolah, menggunakannya untuk operasional sehari-hari, menginvestasikan kembali dana ekstra, dan meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembiayaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sujana, I. W. C, Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah Di Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2019.

<sup>14</sup> Nurhayati, S. (2017). Peranan Manajemen Pembiayaan Dalam Suatu Sekolah. *Jbma*, IV(1).

Selain itu, tujuan lainnya ialah untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak sesuai dengan yang diperkirakan dan ditargetkan oleh seorang kepala sekolah.<sup>15</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Sekolah**

Kewajaran, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas publik adalah prinsip manajemen pembiayaan. Selain itu, ada beberapa keefektifan yang perlu ditonjolkan sedikit, atau penekanan pada keefektifan yang dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.<sup>16</sup>

Prinsip inisiatif Kemanusiaan, yang juga memiliki beberapa efektivitas terhadap administrasi pembiayaan sekolah yang adil, efisien, transparan, dan akuntabel, mirip dengan Prinsip Administrasi Pembiayaan Sekolah karena keduanya merupakan sistem manajemen independen.<sup>17</sup> Anda harus memahami bahwa manajemen pembiayaan sekolah tidak dapat dilakukan secara sembarangan untuk menerapkan prinsip dalam penerapannya.<sup>18</sup>

Tetapi perlu memperhatikan sejumlah konsep yang relevan, termasuk akuntabilitas, kemanjuran, dan efisiensi. Inilah penjabarannya:

#### **a. Transparansi**

Pengelolaan pembiayaan di sekolah harus dilakukan secara transparan. Keterbukaan ini mengacu pada sumber pembiayaan sekolah, termasuk berapa

---

<sup>15</sup> Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S, *Pembiayaan Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 2022.

<sup>16</sup> Abarca, R. M, *Pengertian Manajemen. Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*. 2021.

<sup>17</sup> Saidah, N, *Pengertian, Proses Administrasi Pembiayaan dan Pemeriksaan serta Pelaporan*. Universitas Negeri Padang, 2020, h. 43.

<sup>18</sup> Rindaningsih, I, *Buku Ajar Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. In *Buku Ajar Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, 2018, h. 96. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-17-1>

banyak yang tersedia dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Hal ini akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan situasi pembiayaan organisasi atau sekolah.

**b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan mengacu pada penggunaan uang kuliah sesuai rencana. Atas dasar ini, rencana tersebut juga harus memperhitungkan bagaimana biaya sekolah digunakan.

**c. Efektivitas**

Apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengelola pembiayaan untuk membiayai kegiatan yang akan membantu lembaga pendidikan yang bersangkutan mencapai tujuannya dan kualitas hasilnya juga harus sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan pengelolaan pembiayaan sekolah efektif.

**d. Efisiensi**

Gagasan ini berkaitan dengan berapa banyak hasil yang dihasilkan suatu kegiatan. Sedangkan dalam manajemen pembiayaan, ini adalah perbandingan antara kekuatan dan hasil (atau input dan output). Demikian tadi penjelasan tentang manajemen pembiayaan sekolah, meliputi pengertian, tujuan, dan gagasan mendasarnya. Karena manajemen pembiayaan tidak sederhana, maka diperlukan ahli di bidangnya untuk tidak hanya menyimpan catatan tetapi juga bertanggung jawab atas semua data yang sudah ada. Bahkan staf khusus dipekerjakan oleh sekolah tertentu untuk mengatasi masalah pengelolaan pembiayaan.

Lembaga pendidikan harus menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah agar: - Pembiayaan sekolah dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. -

Akuntabilitas terjamin dan ada transparansi yang lebih besar dalam penggunaan dana sekolah reguler. -Penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi dan anggaran dapat digunakan secara efektif. - Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan sekolah secara efektif. Pemimpin sekolah penting dalam hal ini merupakan prinsipnya.<sup>19</sup>

Peningkatan mutu sekolah dilakukan melalui pengelolaan pembiayaan sekolah yang meliputi penjelasan perencanaan pembiayaan, penggunaan uang, dan upaya penggalangan dana.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan sekolah, pengelolaan pembiayaan sekolah sangatlah penting. Pemahaman tentang administrasi, khususnya manajemen pembiayaan, sangat penting bagi seorang kepala sekolah karena mengelola uang merupakan bagian integral dari menjalankan semua operasional lembaga. Terlepas dari kenyataan bahwa masih terlalu banyak teori yang terlalu umum dan subjektif, Manajemen Pembiayaan Sekolah harus dianggap sebagai ilmu.

### **Implementasi Pembiayaan Pendidikan**

Penerapan konsep model dalam biaya satuan pendidikan konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah dapat digambarkan dalam model fishbone atau model tulang ikan. Penentuan biaya sekolah/madrasah dikelompokkan menjadi 8 komponen, sesuai standar komponen pendidikan nasional. Berikut adalah gambar model pengalokasian pembiayaan di sekolah/madrasah.

---

<sup>19</sup> Ida ,S, Manajemen pembiayaan sekolah, jurnal *manajemen pembiayaan*, vol 2 no 3, 2018.

<sup>20</sup> Harjito, A.M.(2007), *Manajemen Pembiayaan sekolah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 112.

Tabel 2.1 Model Pengalokasian Pembiayaan di Sekolah/ Madrasah

Standar Pengelolaan Berkaitan dengan Manajemen sekolah (permendiknas No 19 tahun 2007)	Standar Isi Berkaitan dengan Kurikulum (permendiknas No 22 tahun 2006)	Standar sarana dan Prasarana Berkaitan dengan fasilitas sekolah (permendiknas No 24 tahun 2007)	Standar Tenaga Kependidikan berkaitan dengan Tenaga Administrasi sekolah (permendiknas No 24 tahun 2008)
Standar Pembiayaan Berkaitan dengan Pengelolaan pembiayaan sekolah (permendiknas NO 69 tahun 2009 Standar	Standar Proses Berkaitan dengan PBM (Permendiknas No 41 tahun 2007)	Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No 23 Tahun 2006)	Standart Penilaian Berkaitan Dengan Penetapan Ulangan, Ujian Serta Penilaian Nya

#### 4. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Akan ada perbedaan dalam sistem pembiayaan yang dibuat oleh berbagai negara karena berbagai situasi dan fitur regional di setiap negara. Keberagaman ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu sesuai dengan keadaan dan potensi berbagai bangsa dan daerah. Model pembiayaan pendidikan yang saat ini digunakan oleh pemerintah di USA diungkapkan oleh Thomas Hi Jones dalam bukunya *Introduction to school finance technique and social policy*, yang antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid.... h. 34

### **1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)**

Tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar pajak daerah yang bergantung pada jumlah siswa yang harus dididik, uang bantuan negara diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Sekolah dapat menganggarkan uang untuk aktivitas belajar siswa; (2) Sekolah dapat mendukung inisiatif siswa. Sedangkan kekurangannya ialah: (1) Pajak tidak diterima oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara; (2) mereka dapat menyebabkan pengalihan dana pendidikan yang lebih besar; dan (3) ada tingkat ketidaksetaraan antar sekolah di semua lokasi jika dibandingkan dengan sekolah yang lebih kaya. Sekolah harus dilindungi dari kehancuran tambahan (di daerah yang kurang makmur).

### **2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*)**

Sebuah model yang menunjukkan bagaimana negara memberikan daerah miskin lebih banyak uang per siswa daripada orang kaya, tanpa memperhitungkan kekayaan atau pajak daerah. Kelebihan Model ini ialah: (1) belanja pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; (2) Pajak diterima oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Sedangkan kekurangannya yaitu: (1) Kegiatan program yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan mungkin dibatasi oleh sekolah, dan anggaran pendidikan tahunan memiliki kekurangan (Hanafiah, 2020).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hanafiah, Pengantar Statistik...h, 89.

### **3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*)**

Strategi ini dibatasi oleh bagaimana negara menjamin distrik sekolah lokal akan menginterpretasikan hasil penilaian setiap siswa. Antara apa yang diterima daerah per siswa dan apa yang dijamin negara setiap siswa, pendanaan negara bervariasi. Di distrik sekolah yang lebih kaya dan lebih makmur, persentasenya rendah, sedangkan di distrik sekolah yang lebih miskin persentasenya sangat tinggi. Model ini memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Rincian belanja sekolah yang tepat; dan (2) Pajak sebagai sumber devisa negara bagi pemerintah. Sedangkan kekurangannya antara lain: (1) Hanya akan praktis dan berhasil untuk negara berkembang; dan (2) Sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan standar pendidikan.

### **4. Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*)**

Tahun 1920-an melihat pengembangan model yang mendistribusikan lebih banyak sumbangan yang dibutuhkan untuk setiap siswa dan instruktur ke komunitas yang kurang mampu. Aplikasi yang sama menghitung jumlah pembayaran yang disepakati untuk setiap siswa, setiap guru, dan sarana atau prasarana tambahan yang diperlukan. Untuk setiap komponen, diperlukan kuantitas yang berbeda. Kelebihan model ini: (1) Sekolah di pedesaan mendapatkan dana pendidikan yang signifikan; (2) Sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi infrastruktur sekolah; dan (3) Adanya pemerataan peningkatan mutu sekolah di seluruh wilayah. Kelemahannya adalah (1) akan mengakibatkan inkonsistensi pembiayaan sekolah dan (2) transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan.

### **5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)**

Model ini mengharuskan daerah kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara bagian. Negara kemudian menggunakan uang dari distrik sekolah yang lebih kaya untuk meningkatkan bantuan sekolah ke distrik yang lebih miskin. Kelebihan model ini ialah : (1) Ada persamaan yang memperhitungkan kemampuan finansial: (2) Sekolah dapat meningkatkan standar pendidikan. Kerugiannya adalah pajak tidak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber devisa negara.

### **6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)**

Model ini merupakan strategi yang dibuat untuk menghilangkan variasi daerah dalam pengeluaran dan perpajakan. Negara bagian akan menggabungkan dana pendidikan dan mendistribusikannya secara merata ke semua distrik sekolah. Gagasan keadilan dalam bagaimana pembayar pajak dan siswa diperlakukan, serta bagaimana uang dihabiskan untuk pendidikan sesuai dengan tingkat kekayaan seseorang. Untuk menghentikan banyak anak muda di daerah kurang mampu putus sekolah sehingga generasi mendatang menghadapi masalah pengangguran dan bantuan. Kelebihan model ini: (1) mengalokasikan dana untuk kegiatan belajar siswa; (2) peningkatan sarana dan prasarana sekolah; dan (3) memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Sedangkan Kekurangannya yaitu: (1) Akan terjadi penyimpangan pembiayaan pendidikan; dan (2) Anggaran pembiayaan pendidikan cukup besar di APBN.

### **7. Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*)**

Model yang diciptakan oleh Hambers dan Parrish ini menawarkan metode pengalokasian dana untuk pendidikan yang mempertimbangkan berbagai tuntutan iklim ekonomi lokal. Sergivanni menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara strategi ini dengan kemakmuran lokal atau penerimaan pajak. Kelebihan model ini ialah :

- Sumber pendanaan tiap daerah berbeda-beda.
- Sekolah di lokasi terpencil dapat meningkatkan standar pengajaran.
- Sekolah dapat mendukung kegiatan belajar siswa.

Sedangkan Kekurangannya ialah:

- Siswa dapat dikenakan biaya oleh sekolah.
- Ketimpangan sosial ada di setiap daerah.

### **8. Model Surat Bukti / Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)**

Berdasarkan tuntutan pendidikan, konsep ini memberikan pembiayaan pendidikan langsung kepada orang atau lembaga rumah tangga. Sebagai bagian dari sistem voucher yang memberikan bantuan pembiayaan langsung kepada siswa yang paling membutuhkan, mereka mengeluarkan surat sebagai verifikasi bahwa mereka telah menerima dana untuk pendidikan mereka. Kelebihannya, (1) Negara memberikan kesempatan kepada sekolah dan orang tua untuk meningkatkan standar pendidikan, dan (2) Sekolah swasta mendapatkan lebih banyak uang untuk operasional mereka. Sedangkan kekurangannya: (1) Sekolah negeri bersaing satu sama lain, (2) dapat menyebabkan anggaran pendidikan semakin menyimpang.

### 9. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*)

Model ini memperhitungkan siswa tergantung pada proporsinya. Contohnya termasuk siswa multibahasa, siswa dalam program kejuruan, dan anak-anak penyandang disabilitas. Model berdasarkan pengalaman (*Historic Funding*). Paradigma ini, yang juga dikenal sebagai inkrementalisme, berkaitan dengan pendapatan tahun sebelumnya dengan hanya sedikit kenaikan biaya yang diterima satu sekolah. Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*), dimana sekolah mengajukan proposal kepada sumber pendanaan dengan berbagai referensi, sumber pendanaan tersebut kemudian mereview proposal yang masuk dan memodifikasinya sesuai dengan kriteria. Model Berdasarkan Kebijakan (*Discretion Model*), Menurut model ini, donatur terlebih dahulu melakukan penelitian untuk menentukan komponen mana, tergantung pada prioritas dan lokasi yang membutuhkan bantuan.<sup>23</sup>

Model pembiayaan pendidikan yang terbaik bagi negara Indonesia (bagi sekolah) adalah gabungan dari model *Power Equalizing* dan *model Foundation Plan* karena model *Power Equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara dapat menggalang bantuan ke daerah yang membutuhkan dengan menggunakan dana dari daerah yang kaya. Tergantung pada kemampuan pendapatan daerah (APBD), masing-masing daerah akan menerima jumlah uang yang berbeda. Selain uang dasar area 7 per mil, komunitas yang lebih miskin akan menerima 5 per mil. Akibatnya, akan ada

---

<sup>23</sup> Arwildayanto, Manajemen Keuangan ... h. 37.

pemerataan sumber daya di antara daerah kaya sumber daya alamnya. Selain itu, ada Rencana Dasar, yang bertujuan untuk mengkaji empat isu utama dalam pendidikan dan pembiayaan: pemerataan pengeluaran, menetapkan standar pajak dan pengeluaran sekolah minimum, memisahkan (membatasi) otoritas politik antara distrik sekolah lokal dan negara bagian, dan ketentuan untuk kesinambungan yang lebih baik dalam proses pendidikan.

### **5. Model Pengelolaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Agar pengalokasian dana yang ditetapkan penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka berbagai peraturan yang menjadi landasan hukum penyaluran atau penyaluran dana pendidikan harus didukung dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang mampu menunjang kebutuhan belajar peserta didik.<sup>24</sup>

Perencanaan PBM yang ditetapkan oleh sekolah menjadi landasan utama untuk menghitung jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses pendidikan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

Komponen utama dari model pengelolaan pembiayaan pendidikan tercantum di bawah ini:<sup>25</sup>

- a) *Learning Needs* yaitu semua hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran
- b) Rencana Aktivitas
- c) Tujuannya
- d) Murid

---

<sup>24</sup> Nanang Fattah. Standar Pembiayaan Pendidikan. (Bandung: Rosda,2016), h.3

<sup>25</sup> Ibid... h. 37

- e) Pendistribusian dana
- f) Sumber dana
- g) Standar nasional pendidikan

## 6. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Harga pendidikan merupakan bagian dari masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Argumen mengatakan bahwa pendidikan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan produk sampingan dari pertumbuhan tersebut.

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihimpun atau dihasilkan kemudian dipergunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan (proses belajar mengajar), seperti gaji guru untuk peningkatan profesionalisme guru, pembelian dan pemeliharaan fasilitas belajar, perbaikan dan pemeliharaan kamar, pembelian dan pemeliharaan peralatan, pembelian dan pemeliharaan alat dan buku, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan program pendidikan.<sup>26</sup>

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.<sup>27</sup> Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik yang berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan

---

<sup>26</sup> Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Abdul Azis. 2017 h. 64

<sup>27</sup> Fatah Nanang, Standar Pembiayaan Pendidikan, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012) h.96

yang hilang. dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua.

Menurut Levin dalam Akdon, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.<sup>28</sup> Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktivitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah/madrasah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu. Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya. Agar penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang

---

<sup>28</sup> Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), h. 23.

melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, sistem pajak yang digunakan untuk pembiayaan program, dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan.

Fungsi pembiayaan adalah untuk mendukung agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan landasan dan misi yang diemban bangsa. Konsep pembiayaan identik dengan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu. Anggaran pembiayaan pendidikan disusun untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah/lembaga pendidikan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada manajemen pembiayaan pendidikan untuk mengarahkan madrasah/sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dalam arti yang lebih makro anggaran mempunyai fungsi:

- a) Sebagai alat penafsir, yaitu untuk memerkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat kebutuhan data yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan di madrasah/lembaga.
- b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana sehingga melalui anggaran tersebut dapat diketahui besarnya dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.

- c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya, realisasinya sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan anggaran.<sup>29</sup>

Menurut John , Morphet , dan Alexanders, dalam Akdon, ada beberapa kebijakan umum yang biasa dianjurkan oleh ahli pembiayaan pendidikan antara lain:

- 1) Jika masukan biaya tambahan akan menambah lebih banyak keuntungan secara individu dan sosial sistem pendidikan dibandingkan dengan jumlah investasi, maka masukan pembiayaan harus ditingkatkan.
- 2) Jika keuntungan secara individual dan sosial dari sistem organisasi dapat menghasilkan dengan masukan biaya yang lebih kecil, maka masukan pembiayaan seharusnya dikurangi.
- 3) Jika unit administrasi sekolah merupakan unit yang sangat kecil dapat mencapai keuntungan dalam skala ekonomi penting untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, per rupiah masukannya, maka sistem sekolah/madrasah itu harus ditinjau organisasinya secara tepat.
- 4) Jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, maka struktur organisasi itu harus di modifikasi.
- 5) Jika setiap kebijakan pendidikan, program atau cara kerja tidak berfungsi, tidak efektif/efisien, maka kebijakan pendidikan harus diubah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Luneto, Buhari , Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah, Tadbir, Vol 3, No.2 (2015), h.23

<sup>30</sup> Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, (2015), h. 25-26.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orang tua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan nonfinansial.<sup>31</sup> Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Pembiayaan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah/madrasah bersama komponen-komponen lainnya.

Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka madrasah/lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. Dengan demikian kepercayaan masyarakat, terutama para calon donatur, harus diperkuat dan dijaga. Untuk membangun dan memerkukuh kepercayaan mereka. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu:

---

<sup>31</sup> Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* ( Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6-7.

- 1) Pihak yang mengajukan proposal kepada calon donatur haruslah orang yang jujur, bersih dan amanat;
- 2) Lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa bantuan dari pihak lain yang diterima telah dimanfaatkan secara benar dan dapat dibuktikan;
- 3) Pihak yang mengajukan bantuan bersama kelompoknya haruslah orang-orang yang dikenal memiliki semangat besar untuk menghidupkan dan memajukan lembaga;
- 4) Calon donatur harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan program benar-benar sangat penting, bahkan mendesak untuk segera diwujudkan;
- 5) Calon donatur perlu disadarkan bahwa bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan lembaga pendidikan merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir.<sup>32</sup>

## **7. Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk sekolah, khususnya sekolah negeri, tetapi orang tua siswa juga dapat berkontribusi untuk anggaran sekolah, serta hibah dari masyarakat setempat atau sumbangan perusahaan.

### **a. Strategi Pembiayaan Pendidikan dalam Penyusunan RAPBM**

Strategi adalah keputusan atau tindakan untuk mencapai sasaran organisasi.<sup>33</sup> Strategi dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga (madrasah/sekolah) dan lingkungannya. Penyusunan RAPBM memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstrim yang mencakup kekuatan, kelemahan,

---

<sup>32</sup> Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta, Airlangga : 2007), h. 165.

<sup>33</sup> Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya 2013), h. 54.

peluang, dan ancaman (Analisis SWOT). Dunia pendidikan sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan baik politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, industri maupun informasi. Pembaharuan dalam aspek-aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri, dengan perubahan tersebut. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBM di mulai dengan mengkaji perubahan peraturan perundangan dan tuntutan peningkatan mutu sekolah. Pada dasarnya konsep strategi ada 6, yaitu:

- a) Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatu diantara setiap komponen.
- b) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber dana pendidikan.
- c) Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan, apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.
- d) Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan, dan keunggulan yang ada di bidang lembaga pendidikan.
- e) Membangun komitmen dari semua pihak, peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, unit-unit Depdiknas, sampai pada internal sekolah untuk bersamasama meningkatkan mutu sekolah.
- f) Menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu sekolah atau prestasi belajar peserta didik dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan sekolah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Fatah, Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung, PT Remaja RosdaKarya(2013), h. 55

Strategi RAPBM/S sangat dipengaruhi oleh misi dan faktor lingkungan pendidikan (madrasah/sekolah). Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarpras, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakup kondisi sosial, ekonomi dan aspirasi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orang tua, globalisasi informasi dan teknologi dan industri yang berkembang sangat cepat akan memberikan pengaruh terhadap hasil-hasil pendidikan. Sebagai pilihan pola pengelolaan strategi pembiayaan berikut disajikan strategi pembiayaan berdasarkan sumber pendanaan.

Penghitungan biaya pendidikan anggaran biaya pendidikan terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah/madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat, dan orangtua peserta didik, sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah. Pengeluaran madrasah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu: pengeluaran untuk pelaksanaan.

#### **D. Strategi Pemenuhan Anggaran Pendidikan**

Strategi adalah pilihan atau tindakan yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan organisasi. Program luas yang mencapai tujuan organisasi sambil menjalankan misi, menurut T. Hani Handoko, adalah strategi. Definisi “program”

yang ditawarkan oleh T. Hans Handoko menitikberatkan pada partisipasi aktif dan sikap yang dibutuhkan seorang pemimpin dalam penciptaan strategi organisasi. Selain pengertian yang diberikan di atas, definisi lain dari strategi adalah pola tindakan yang dilakukan organisasi sepanjang waktu sebagai respons terhadap lingkungannya.

Proses memperoleh dan menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan penyelenggara pendidikan dapat dicirikan sebagai strategi penyelesaian pembiayaan pendidikan.

Untuk menerapkan strategi pemenuhan anggaran, uang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Bagaimana seorang pimpinan melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber pembiayaan yang terdapat pada lembaga pendidikan disebut dengan strategi lembaga atau organisasi dalam mencari dana pendidikan secara administratif. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, pengelola pendidikan harus mampu berusaha sebaik mungkin dalam mencari dana pembiayaan, sebagaimana orang-orang terdahulu berusaha dengan susah payah.

Menurut temuan kajian pembiayaan yang dilakukan oleh Fattah, keempat komponen RAPBTS memerlukan skala prioritas untuk mendapatkan alokasi biaya, dan kesejahteraan guru, kemampuan guru, fasilitas kelas, dan buku teks merupakan beberapa faktor internal yang memberikan kontribusi signifikan untuk mutu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda. 2009. h. 55.

## **E. Manajemen Pembiayaan Untuk Meningkatkan Mutu sekolah**

### **1. Quality Cost**

Pemerintah telah menunjukkan perlunya peningkatan mutu sebagaimana dijabarkan dalam program pendidikan melalui beberapa kebijakan yang sehat yang terdapat dalam GBHN dan Repelita. Dalam hal ini terkait langsung dengan *value for money concern*, yang terkait dengan fakta bahwa ekonomi melemah dan berdampak langsung pada kemampuan masyarakat, terutama orang tua, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Apakah akurat untuk mengatakan bahwa lembaga pendidikan telah menawarkan pengajaran terbaik? Perlunya sistem penjaminan mutu merupakan salah satu upaya penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya karena di sisi lain terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dimana penggunaan uang pendidikan perlu diupayakan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam upaya untuk mempromosikan adopsi praktik untuk menjamin kualitas pendidikan, tampaknya konsep nilai uang dapat dilihat sebagai faktor eksternal pendidikan.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana institusi pendidikan menjaga dan memantau kualitas operasionalnya dan sejauh mana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat mengingat adanya sistem penjaminan mutu.

Persyaratan untuk metode penjaminan mutu didorong oleh keadaan ini. Keberadaan mekanisme ini diduga berhasil mendukung adopsi evaluasi diri masing-masing lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dalam manajemen kualitas, penekanan tidak hanya ditempatkan pada peningkatan kualitas tetapi juga pada

menemukan mekanisme eksternal dan internal yang terbaik untuk memastikan tercapainya kualitas yang tinggi.

## **2. Fundraising**

Praktek penggalangan dana didukung oleh keyakinan pada kebaikan orang lain. Kemurahan hati, juga disebut filantropi (*philantrophy*), adalah tindakan memberi kepada orang lain untuk tujuan kemanusiaan. Itu bisa dianggap sebagai kemurahan hati. Organisasi penggalangan dana dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan didukung oleh altruisme, yaitu keinginan untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini terutama berlaku bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Meningkatkan kesadaran publik, juga dikenal sebagai pendidikan publik, adalah salah satu tindakan yang perlu disadari oleh kelompok penggalangan dana dan mendapatkan kepercayaan publik sebelum mereka dapat mulai mengumpulkan uang. Teori pemasaran sosial dan teori komunikasi adalah dua teori yang paling sering diterapkan pada praktik pendidikan publik. Dijelaskan dibawah ini:

### **a. Pemasaran Sosial (Social Marketing)**

Pemasaran adalah proses di mana bisnis menghasilkan nilai bagi pelanggan dan menjalin ikatan yang kuat dengan mereka untuk memperoleh pendapatan dari mereka. Menerapkan taktik pemasaran komersial untuk “menjual ide agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau kelompok tertentu” adalah inti dari pemasaran (pemasaran sosial). Misalnya, undangan untuk menghadiri sekolah

atau kampanye.

Price, place, product dan promotion adalah empat P yang biasanya menjadi dasar pemasaran suatu produk, apakah itu berwujud atau abstrak. Kemudian, gagasan elemen bauran pemasaran dikembangkan menjadi elemen IMA "orang". Sementara itu, tambahkan tiga P: produsen (pemasar atau sumber promosi), pembeli (pihak yang pasti berkepentingan), dan probing (misal penelitian). Ketujuh model P digunakan untuk mengkaji pemasaran sosial sejati dalam konteks media sosial.<sup>36</sup>

#### **b. Komunikasi Pemasaran**

Organisasi harus menjelaskan proposisi nilai mereka kepada klien untuk menghasilkan koneksi pelanggan yang kuat, selain menciptakan produk dan layanan serta harga yang menarik. Bauran komunikasi pemasaran, kadang-kadang disebut sebagai bauran promosi, adalah kombinasi metode yang digunakan oleh bisnis atau organisasi untuk meyakinkan pelanggan tentang nilai yang mereka berikan dan membina hubungan jangka panjang dengan mereka. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari lima elemen: pemasaran langsung, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan periklanan.

Setelah melakukan edukasi publik, organisasi nirlaba tersebut kemudian melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi bagi masyarakat yang ingin berdonasi. Dana yang dihimpun meliputi mobilisasi dana berupa mobilisasi finansial dan non finansial untuk mendukung pelaksanaan program kelembagaan. Dukungan non-finansial dapat berupa aset berwujud

---

<sup>36</sup> Fine, Seymour H, *Social Marketing: Promoting The Cause Of Public and Nonprofit* h. 4.

seperti furnitur atau barang lain, real estat, tanah, keterampilan atau layanan khusus, personel, paparan media, atau koneksi ke organisasi dan individu berpengaruh yang dapat membantu program. Ada tujuh teknik penggalangan dana yang organisasi sosial kemanusiaan dapat gunakan sebagai panduan ketika menentukan dari mana uang mereka berasal: strategi think tank, dana tahunan, hadiah besar, pemberian terencana, korporasi, yayasan (Fisher, 1989: 164), dana pemerintah, dan menyelidiki sumber pendanaan mereka sendiri.

### **c. Biaya Pendidikan**

Ada beberapa konsep dasar mengenai pengeluaran, antara lain biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya privat dan biaya sosial, biaya tetap dan biaya variabel, yang berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Biaya sering didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang memiliki dampak pembiayaan.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah menetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 bahwa biaya pendidikan di Indonesia terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pengeluaran pribadi peserta didik. Biaya investasi (tanah dan selain tanah untuk pendidikan), biaya operasional (orang dan non personalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa adalah beberapa contoh biaya satuan pendidikan.

## **F. Mutu sekolah**

### **1. Pengertian Mutu sekolah**

Banyak ahli telah menyuarakan pandangan mereka dalam perdebatan tentang konsep keunggulan pendidikan, tetapi tujuan dari semua pendapat ini

adalah sama. Definisi para ahli tentang mutu sekolah antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut Juran (1993), Kesesuaian produk (*fitness for use*) mengacu pada kemampuan suatu produk untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Kompatibilitas pengguna dengan produk didasarkan pada lima faktor utama: kekuatan teknologi, faktor psikologis seperti rasa atau status, ketergantungan waktu, faktor kontraktual seperti jaminan, dan kesopanan/etika.<sup>37</sup>
- b. Menurut DL. Goetsch dan S. Davis mengatakan Kualitas adalah keadaan dinamis yang terhubung dengan proses, lingkungan, layanan manusia, dan produk yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>38</sup>
- c. Menurut Crosby Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi; itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau standar. Jika suatu produk memenuhi kriteria kualitas yang telah ditentukan sebelumnya, seperti bahan baku, metode produksi, dan barang jadi, produk tersebut dianggap berkualitas tinggi.<sup>39</sup>
- d. Edward Deming, mendefinisikan mutu sebagai "*A predictive degree of uniformity and dependability at a low cost, suited to the market*", yakni memenuhi kebutuhan pasar atau pelanggan. Bisnis yang berkualitas adalah bisnis yang memiliki cengkeraman pasar yang kuat

---

<sup>37</sup> Juran, J. M. and Frank M. Gyrna. *Edisi 3. Quality Planning and Analysis*. Singapore: McGraw-Hill International Editions, 2004 h. 80

<sup>38</sup> David L., Goetsh dan Stanly B. Davis . *Pengantra Manajemen Mutu 2*, Jakarta : PT Prenhalindo. 2005.

<sup>39</sup> Crosby, Philip B), *Quality is free : The Art of Making Quality Certain*, New York : New American Library/ 1978. h. 58.

karena produk yang dihasilkannya memuaskan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>40</sup>

- e. Menurut Feigenbaum (1982:176) Kesenangan pelanggan pada tingkat tertinggi adalah kualitas. Jika suatu produk dapat sepenuhnya memuaskan pelanggan, yaitu jika memenuhi harapan mereka terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, maka dikatakan berkualitas tinggi.<sup>41</sup>

Penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa pengertian murni yang dikemukakan oleh para ahli di atas bahwasanya gagasan tentang pendidikan bermutu pada hakekatnya dapat diterapkan setiap saat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan item terkait. Misalnya Steakholmas harus mempertimbangkan sifat duniawi klien atau siswa apakah ada sesuatu yang akan diiklankan atau apakah penekanannya pada lembaga pendidikan.

Namun, pengembangan mutu lambat laun merasuk ke dalam bidang pendidikan dan menjadi gagasan “paten”, menjadikan pendidikan bermutu menjadi syarat krusial bagi sekolah untuk tetap berdaya saing.

Meskipun tidak ada satu pun definisi keunggulan yang diakui oleh semua orang, namun jika dikaitkan dengan ranah pendidikan Islam, ketiga definisi tersebut memiliki beberapa ciri, khususnya sebagai berikut:

- a. Usaha yang berkualitas adalah usaha yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen.

---

<sup>40</sup> Edwards Deming, W. *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology. 2012. h. 72.

<sup>41</sup> Feigenbaum, Armand V. . *Total Quality Control*. Trind Editions New York: McGraw Hill Inc. 2011, h. 179.

- b. Lingkungan, proses manusia, dan layanan produk semuanya berkontribusi terhadap kualitas.

Apa yang dianggap berkualitas tinggi saat ini dapat dianggap memiliki tingkat kualitas yang lebih rendah di masa depan dikarenakan kondisi dari kualitas dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, peningkatan mutu dalam konteks pendidikan Islam mengacu pada gagasan ilmu manajemen yang memerintahkan pimpinan organisasi pendidikan dan jajarannya untuk secara terus menerus dan sengaja meningkatkan mutu sekolah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah perbuatan mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam upaya membantu individu berkembang sebagai manusia melalui usaha pengajaran dan latihan, serta cara mendidik lainnya.

Pendidikan menurut Oemar Hamalik, adalah proses sosial karena bertujuan untuk mensosialisasikan peserta didik dengan mengajak mereka berinteraksi dengan anggota komunitas tertentu.<sup>42</sup>

Dalam situasi ini, pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena pendidikan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal, manusia senantiasa dihaluskan, dibina, dan diberi. Karena itu orang mungkin menafsirkan makna hidup untuk memprediksi masa depan mereka.

Menurut definisi kualitas dan pendidikan yang diberikan di atas, kualitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai berpengetahuan, mampu sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Oemar Hamalik. *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*, (Bandung , remaja rosda karya: 2007), h. 23.

gelar pendidikan seseorang, jujur, dan, yang paling penting, memiliki sikap dan moral yang sehat. Manusia dinilai dari kemampuannya untuk bertindak terhormat dan memiliki moral yang tinggi daripada ijazah, sertifikat, atau penghasilannya. *Input*, proses, *output* ataupun *outcome*, merupakan aspek pendidikan yang berkualitas. Guru berkualitas, siswa, kurikulum, fasilitas, dan berbagai aspek penyedia pendidikan berkualitas adalah contoh input pendidikan berkualitas tinggi. Pembelajaran terjadi paling baik melalui proses pendidikan berkualitas tinggi. Lulusan dengan kompetensi yang diperlukan merupakan output pendidikan yang bermutu, dan lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut atau yang tergabung dalam dunia usaha atau industri merupakan outcome pendidikan yang bermutu.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai pedoman pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, gedung dan prasarana, manajemen, dan pendanaan, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan output oleh lembaga pendidikan dimungkinkan oleh perencanaan strategis di bidang pendidikan.

## **2. Kontrol Mutu, Jaminan Mutu dan Mutu Terpadu**

Antara pengendalian mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*), dan mutu terpadu (*whole quality*), ada perbedaan penting yang harus dibuat

### **a. Kontrol mutu**

Ide kualitas paling awal yang ada adalah kontrol kualitas. Ini memerlukan identifikasi dan pemberantasan produk di bawah standar atau komponen yang

gagal. Prosedur pascaproduksi ini memantau dan membuang produk yang cacat. Inspektur kualitas adalah karyawan yang sering melakukan kontrol kualitas. Untuk menentukan apakah persyaratan pendidikan telah tercapai atau belum, inspeksi dan pengecekan sering menjadi sarana kontrol kualitas. Pendidikan banyak menggunakan kontrol kualitas, prosedur pasca produksi yang memantau dan membuang barang yang rusak, untuk menentukan apakah kriteria telah tercapai atau tidak.

#### **b. Jaminan Mutu**

Sebelum dan selama proses, jaminan kualitas dan kontrol kualitas berbeda satu sama lain. Tujuan penekanan konsep ini adalah untuk menghentikan kesalahan bahkan sebelum terjadi dalam proses produksi. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan bahwa produk benar-benar dihasilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan jaminan kualitas, dimungkinkan untuk membuat barang yang bebas dari kesalahan dan cacat. Membangun produk tanpa cacat (zero defect), menggunakan terminologi Philip B. Crosby adalah tujuannya.

Pengendalian kualitas adalah proses pembuatan barang yang secara konsisten memenuhi standarnya atau “selalu baik sejak awal (right first time every time)”. Meskipun inspeksi kendali mutu berperan dalam penjaminan mutu, tetapi lebih menekankan pada akuntabilitas tenaga kerja. Suatu sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan kualitas, yang menentukan bagaimana produksi harus berjalan sesuai dengan standar, memastikan kualitas barang atau jasa yang tinggi. Prosedur dalam sistem penjaminan mutu mengatur standar mutu. Tujuan dari

kontrol kualitas adalah untuk menghentikan kesalahan sebelum terjadi. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh proses produksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jaminan MTU adalah proses untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, bebas kesalahan langsung dari gerbang. Alih-alih berfokus pada inspeksi kontrol, jaminan kualitas mempromosikan tanggung jawab kepada tenaga kerja.

Latar Belakang *Quality Assurance*: Karena interaksi pemasok-pelanggan. Dengan memberikan produk atau layanan pemasok, jaminan kualitas terutama bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah deskripsi hubungan pelanggan-pemasok:

### **c. Mutu terpadu**

Pengembangan dan perluasan penjaminan mutu adalah mutu terpadu yang sering dikenal dengan istilah *Total Quality Management (TQM)*. Tujuan mutu terpadu adalah mengembangkan budaya mutu yang memotivasi setiap karyawan untuk memuaskan konsumen. Klien adalah raja dalam filosofi kualitas terintegrasi. Metode ini dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam *In Search of Excellence*, dan sejak saat itu metode ini mewakili tulisan Tom Peters. Strategi ini telah diselidiki selama beberapa waktu oleh sejumlah bisnis, termasuk Marks and Spencer, British Airways, dan Sainsbury's. Ide ini membahas bagaimana menyediakan pelanggan dengan apa yang mereka inginkan kapan dan bagaimana mereka menginginkannya.

Dengan menciptakan barang dan jasa yang memenuhi dan memuaskan harapan pelanggan, gagasan ini menyesuaikan dengan perubahan harapan dan

preferensi pelanggan. Dengan memuaskan pelanggan, dapat yakin bahwa mereka akan menggunakan produk atau layanan lagi dan merekomendasikannya kepada teman mereka. Hal ini disebut sebagai *sell-on quality* atau kualitas yang menjual. Pandangan dan harapan pelanggan dipahami sebagai jangka pendek dan dapat berubah. Mirip dengan individu, bisnis harus menemukan cara terbaik untuk terhubung dengan klien mereka untuk beradaptasi dengan preferensi, persyaratan, dan keinginan mereka yang terus berubah.

### **3. Upaya Meningkatkan Mutu sekolah**

Fasilitas pendidikan terbaik selalu diminati. Kesulitan pengembangan kelembagaan menjadi lebih rumit, membutuhkan solusi menyeluruh yang disesuaikan dengan situasi. Struktur dasar lembaga pendidikan perlu diubah untuk menjawab kesulitan dan kemungkinan masa depan; khususnya, rencana yang lengkap dan terpadu diperlukan untuk menyelaraskan tujuan lembaga dengan tuntutan masyarakat. Untuk menyelesaikan semua tantangan, dibutuhkan juga nyali dan pikiran terbuka. Selain itu, ini membutuhkan pemberdayaan dan reorientasi sistem, integrasi dan kejelasan antara tujuan dan operasi, inovasi manajemen, dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>43</sup>

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membudayakan peradaban manusia itu sendiri dari perspektif eksistensi budaya manusia. Sebagai alat, pendidikan dapat berperan untuk membimbing tumbuh kembang setiap orang sebagai makhluk sosial dan pribadi guna mencapai keberhasilan dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Untuk alasan ini, pendidikan harus setinggi mungkin bagi

---

<sup>43</sup> A Malik Fajar. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. LP3NI, 2015, h. 37-45.

orang-orang.

Berikut beberapa hal penting untuk dilaksanakan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan:

- a. Meningkatkan profesionalisme guru
- b. Perbaiki Bahan
- c. Penggunaan Metode yang Ditingkatkan
- d. Peningkatan Fasilitas
- e. Termotivasi untuk belajar

## **Standar Pendidikan Nasional**

### **1. Standar Isi**

Standar isi adalah persyaratan pertama yang mencakup persyaratan materi dan tingkat kemahiran minimal yang harus dimiliki siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kalender akademik semuanya masuk dalam standar isi. Untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, standar isi, dengan kata lain, adalah kriteria yang mengatur materi pelajaran dan kompetensi suatu jenjang pendidikan.

### **2. Standar Proses**

Standar proses adalah yang kedua. Standar proses ini berkaitan dengan bagaimana pembelajaran dipraktikkan pada setiap jenjang pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan dinamis, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif.

### **3. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan merupakan standar ketiga dari delapan standar nasional pendidikan di Indonesia. Persyaratan kualifikasi lulusan dari lembaga pendidikan terkait langsung dengan standar ini. Setiap peserta didik yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu diharapkan memiliki sikap, informasi, dan kemampuan yang dipersyaratkan oleh standar yang relevan.

### **4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan**

Yang keempat adalah kualitas yang diharapkan dari para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Guru dan anggota staf kependidikan lainnya bekerja sebagai pendidik untuk mengajar, membimbing, dan mengevaluasi siswa. Yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan" adalah setiap orang yang bekerja di sekolah, antara lain kepala sekolah, pegawai laboratorium, pegawai kantor, pustakawan, pengawas sekolah.

Agar tujuan pendidikan tercapai, pendidik dan pekerja pendukung harus memiliki kredensial dan kemampuan akademik yang diperlukan. Kredensial akademik yang dimaksud adalah syarat minimum mutlak yang harus dimiliki. Seorang guru perlu memiliki kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial di samping keterampilan akademik.

### **5. Standar Sarana Dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana menjadi faktor keenam. Setiap lembaga pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang berkesinambungan, teratur, dan nyaman

agar proses pembelajaran dapat berlangsung terus. Prasarana dan sarana yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan diatur dalam pedoman ini. Furnitur, bahan ajar, media, buku, atau sumber belajar lainnya, peralatan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran adalah contoh fasilitas pendidikan yang wajib dimiliki. Lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, lab, bengkel, kantin, sarana olah raga, rumah ibadah, dan ruang lain yang diperlukan untuk lingkungan belajar yang produktif merupakan bagian dari prasarana pendidikan yang harus dimiliki.

## **6. Standar Pengelolaan**

Standar manajemen merupakan standar keenam dari delapan standar nasional pendidikan di Indonesia. Ada tiga kategori standar manajemen: yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **7. Standar Pembiayaan**

Standar pembiayaan adalah yang ketujuh dalam pendidikan. Pembiayaan berkelanjutan memungkinkan kelanjutan proses pendidikan. Dalam ranah pendidikan, pendanaan dibagi menjadi tiga kategori: Belanja modal. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas, pengembangan SDM, dan pembayaran modal kerja tetap termasuk dalam biaya investasi. Biaya personalah ialah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Gaji dan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya serta biaya bahan habis pakai seperti energi, air, sambungan internet, dan jasa sejenis sudah termasuk dalam biaya operasional pendidikan.

## 8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan final. Ini mengatur semua masalah yang berkaitan dengan bagaimana siswa dinilai. Penilaian dilakukan untuk mengukur seberapa baik siswa telah memahami materi dan seberapa baik proses pembelajaran telah berjalan sejauh ini. Tiga komponen penilaian pendidikan adalah evaluasi hasil belajar oleh guru, evaluasi satuan pendidikan (sekolah), dan evaluasi oleh pemerintah.

## G. Kajian Teori dalam Perspektif Islam

### 1. Mutu sekolah dalam Perspektif Islam

Dasar ajaran Islam tentang mutu sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas adalah realisasi dari ajaran ihsan, yang meliputi memperlakukan orang lain dengan baik karena Allah telah memberi nikmat kepada manusia dengan berbagai cara dan melarang melakukan kejahatan dengan cara apa pun. Sebagaimana Firman Allah di dalam QS Al-Qashas.<sup>77</sup>

*Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

- b. Seseorang tidak bekerja sembarangan (sesuka hati) atau acuh tak acuh karena melakukan hal itu akan meremehkan Tuhan atau mengurangi makna keridhaan Allah. Firman Allah di dalam QS. Al-Kahfi 110.6

*“Artinya Katakanlah Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kanmu itu adalah Tuhan yang Esa" Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.*

Berbuat baik mengandung arti bekerja dengan baik (mutu) dalam ayat di atas, sedangkan “Jangan menyekutukan siapapun dalam ibadah kepada Tuhannya” artinya menghindari mengarahkan tujuan pekerjaan selain kepada Allah yang menjadi sumbernya dari nilai intristic aktivitas manusia.

## **2. Manajemen pendidikan dalam perspektif Islam**

Planning, Organizing, Actuating and Controlling, atau POAC, adalah kata yang akan selalu dikaitkan dengan manajemen pendidikan. Penulis akan membahas lebih detail di sini.

### **a. Perencanaan**

Dalam proses evaluasi program pendidikan yang akan dilaksanakan yaitu di sekolah pendidikan Islam, pedoman evaluasi harus memperhatikan tanda yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena perencanaan memungkinkan administrator untuk memprediksi secara akurat konsekuensi yang mungkin timbul dari berbagai kekuatan, sehingga ia bisa mempengaruhi dan sedikit banyak mengontrol arah terjadinya perubahan yang dikehendaki di dalam firman Allah QS. Al-Hajj ayat: 77 yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kanu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kami mendapat

kemenangan.

Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para manajer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan pendidikan yaitu dalam firman Allah QS An-Nahl 90 yaitu

Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

#### **b. Organizing (pengorganisasian)**

Organisasi adalah suatu sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menentukan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu. Seluruh bidang secara keseluruhan adalah sistem total yang bergerak menuju satu tujuan.

Bentuk dan pelaksanaan pengorganisasian ini adalah munculnya kesatuan total, kohesi, solidaritas, dan pengembangan mekanisme yang sehat, sehingga operasinya lancar, mantap, dan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam keadaan ini, Al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya untuk beroperasi sebagai unit yang utuh, murni, dan bulat dalam suatu organisasi. Prosedur organisasi yang menekankan perlunya menciptakan kesatuan dalam semua tindakan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Jawahir Tanthowi. *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur'an*, 2015, h. 71.

### **c. Actuating**

Suatu kelompok atau proses organisasi yang darinya fungsi penggerak tidak dapat dipisahkan. Agar terwujud dan timbul kemauan untuk bekerja dengan giat dan baik, maka tindakan penggerak dapat memberikan motivasi, memberikan penggerakan dan kesadaran atas landasan pekerjaan yang dilakukannya yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Mereka juga dapat memberikan motivasi, bimbingan, atau arahan baru.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mendasar tentang tata cara menyampaikan peringatan atau petunjuk dalam bentuk actuating tersebut.<sup>45</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi 2 yakni:

*Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.*

### **d. Controlling (evaluasi)**

Ketika diterapkan pada manajemen, evaluasi adalah prosedur untuk perencanaan ke depan. Dua batasan pertama berlaku untuk evaluasi dalam pengelolaan pendidikan Islam. Evaluasi adalah proses kegiatan untuk menilai seberapa baik kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua evaluasi yang dimaksud adalah upaya mengumpulkan data berupa umpan balik (feedback) dari kegiatan yang telah dilakukan.

---

<sup>45</sup> Jawahir Tanthowi. *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur'an*, 2010, h. 74.

Asesmen dan pengukuran merupakan dua komponen evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Suatu pengukuran harus dilakukan untuk memastikan nilai sesuatu, dan bentuk pengukurannya adalah pengujian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Infithor 9-10

Artinya: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal Sesungguhnya bagi kami ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanni)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (cenderung menggunakan analisa) dengan pendekatan deskriptif (menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti). Pendekatan deskriptif memiliki kualitas sebagai berikut:

1. Menggunakan perspektif emik, makna, dan konteks
2. Pengumpulan dan analisis data terjadi bersamaan, membuat proses studi lebih melingkar daripada linier.
3. Berfokus pada kedalaman pertanyaan penelitian daripada keluasannya;
4. Pentingnya observasi dan wawancara mendalam dalam proses pengumpulan data.
5. Alat utama adalah peneliti.<sup>46</sup>

Selain itu, peneliti secara rutin memeriksa status objek penelitian dan fenomena yang terlihat, yang informasinya dapat diperoleh dari berbagai responden dan bahan pendukung lainnya.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar belakang dan individu secara keseluruhan dalam J. Moleong.<sup>47</sup> Menemukan dan memperoleh informasi yang mendalam sebagai lawan dari informasi yang luas atau besar adalah tujuan dari penelitian

---

<sup>46</sup> Moleong L.J. *Metodologi Kualitatif*, (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya: 2011), h. 23.

<sup>47</sup> Ibid..., h. 35.

kualitatif.

Terdapat beberapa jenis penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah penelitian kualitatif (penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisa), penelitian kuantitatif (penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik), Penelitian Eksperimen (Penelitian yang bersifat coba-coba), Penelitian deskriptif (penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian), Penelitian Campuran ( Penelitian yang menggabungkan bentuk kuantitatif dan kualitatif). Namun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul *manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP terpadu bustanul arifin Bener Meriah* adalah menggunakan kualitatif. Peneliti tertarik pada penelitian kualitatif karena ingin memahami fenomena yang muncul sebagai satu kesatuan yang kohesif dan tidak terkait dengan satu variabel atau hipotesis. Dengan metode penelitian ini tentunya dapat memudahkan peneliti untuk lebih dekat dengan subjek yang diteliti oleh peneliti dan lebih peka terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui berdasarkan data empiris.

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan

jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan.<sup>48</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan spesifik, transparan, dan mendalam.

## **B. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini yang telah dituangkan pada Pendahuluan, telah diketahui bahwa SMP Terpadu Bustanul Arifin pernah menjadi salah satu sekolah yang banyak diminati, akan tetapi pada saat ini mengalami kemunduran dalam jumlah peminat/siswa, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Terpadu Bustanul Arifin yang terletak di Desa Pondok Sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

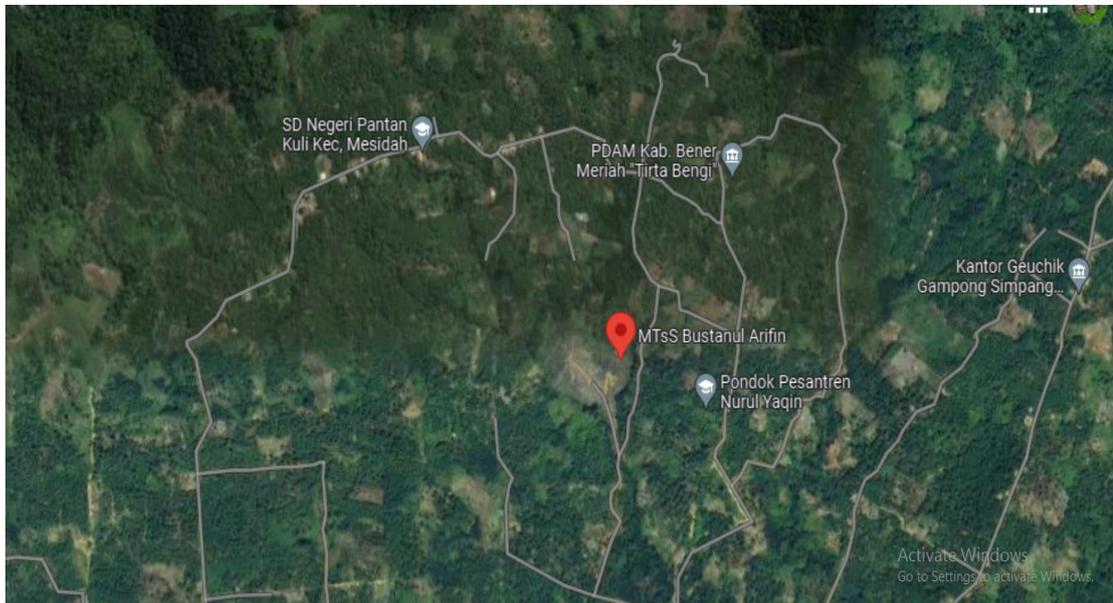
Waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian *manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP terpadu bustanul arifin Bener Meriah* dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Adapun detail waktu yang digunakan selama penelitian ini yaitu berkisar pada bulan januari dan february 2023.

---

<sup>48</sup> Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019). h.

## Peta Lokasi Penelitian

**Gambar 3.1 Lokasi Penelitian**



## Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian tertentu.<sup>49</sup> Subjek yang telah dipilih yaitu informan yang berkompeten dan sesuai dengan tuntutan data (purposive) guna mendapatkan data yang benar. Subjek pada penelitian ini adalah Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Bendahara yayasan, Bendahara sekolah, dan 2 orang guru.

## C. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang paling penting dari sebuah penelitian adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data untuk memastikan bahwa hasilnya secara akurat mencerminkan judul penelitian. Sugiono menyoroti bahwa metode

<sup>49</sup> Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107.

pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), kuesioner, wawancara, dokumentasi, atau campuran dari keempatnya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah

### 1. Wawancara

Menurut Suharsimi Arikunto, wawancara—sering juga disebut wawancara atau angket lisan—adalah percakapan yang dilakukan pewawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi atau data. Untuk memberikan makna terhadap suatu persoalan tertentu, penulis dapat mengklarifikasi bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar pengetahuan dan gagasan melalui tanya jawab.<sup>50</sup>

Ketika seorang peneliti ingin melakukan analisis pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut, serta ketika peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang responden, wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data.<sup>51</sup>

Metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam seringkali terintegrasi dalam penelitian kualitatif. Peneliti mewawancarai partisipan saat mereka sedang diamati. Ada berbagai jenis wawancara yaitu:

#### a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan

---

<sup>50</sup> Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 115

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. 2007, h. 305.

jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.

b. Wawancara semiterstruktur (*semistruktur hiterview*)

Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

c. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah direncanakan, maka penulis melakukan wawancara terlebih dahulu pada kepala bagian pembiayaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah. Yang mencakup Staf akuntansi, kepala bagian pembiayaan, dan staf administrasi SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah semuanya diwawancarai oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan beberapa kali selama penelitian berlangsung. Pertanyaan terbuka digunakan dalam wawancara semiterstruktur penelitian ini, yang memungkinkan pertanyaan baru diajukan sebagai tanggapan atas tanggapan orang yang diwawancarai, memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam berlangsung selama sesi wawancara. Kemudian melakukan observasi pada bagian pengelolaan keuangan dan melanjutkan penelitian pada bagian dokumentasi, sehingga data yang diperoleh seakurat mungkin.

## **2. Observasi**

Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengumpulan data, disamping menggunakan wawancara dilakukan juga metode observasi (pengamatan) dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan dari objek.

## **3. Dokumentasi**

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi pada penelitian ini juga mengumpulkan data dengan metode Dokumentasi. Yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

- Struktur Organisasi
- Profil Sekolah
- SK Kepala Sekolah dan SK Bendahara
- RKAS
- RAPBS
- Realisasi

- Instrumen Wawancara
- Instrumen Observasi
- Foto-foto Wawancara
- Peta Lokasi

### **Pengolahan data**

Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. Dengan pengamatan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan data penelitian yang ada di lapangan melalui data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul untuk dikategorikan. Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan penyajian data.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian, kemungkinan dapat

mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti.

4. Simpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti. Simpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas padacatatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpangan dan metode pencarian atau pengamatan ulang yang digunakan untuk catatan penelitian.

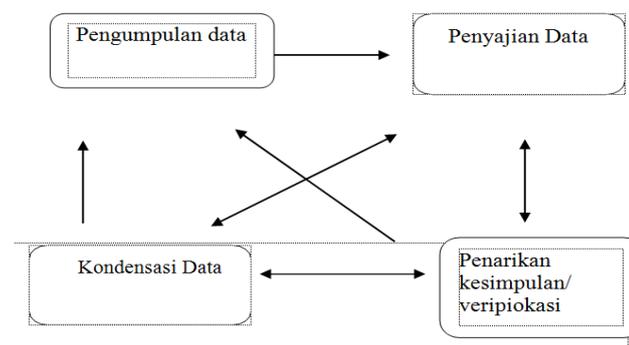
Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian dan setelah data tersebut sesuai dapat ditarik kesimpulan dari setiap item yang ada. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Adapun prosedur analisis data yang penulis tempuh dalam penelitian ini meliputi. pengumpulan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Melalui pengelompokan kegiatan-kegiatan selama pengamatan, dapat diketahui bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di SMP Terpadu Bustanul Arifin, sejauh mana pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengevaluasian yang terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah tersebut.

#### D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).<sup>52</sup> Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda akan diterapkan sebagaimana berikut:

Bagan 3.1 Komponen- komponen Analisis Data Model Interaktif<sup>53</sup>



<sup>52</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (UI-Press: 2014), h. 13.

<sup>53</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (UI-Press: 2015), h. 14.

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Satu fitur penting menyatukan semua tipe data yang berbeda ini: analisis sangat bergantung pada kemampuan integratif dan interpretatif peneliti. Karena data yang dikumpulkan jarang numerik, ekstensif, dan kaya detail, diperlukan jangka panjang.

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles dan Huberman dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:<sup>54</sup>

##### a) Pemilihan (*Selecting*)

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus membuat keputusan tentang variabel mana yang lebih penting, asosiasi mana yang memiliki signifikansi lebih besar, dan dengan demikian, data apa yang dapat dikumpulkan dan diperiksa.<sup>55</sup>

##### b) Pengerucutan (*Focusing*)

Penekanan data, menurut Miles dan Huberman, adalah bentuk pra-analitik. Peneliti sekarang berkonsentrasi pada informasi yang terkait dengan perumusan masalah studi. Tahap pemilihan data dilakukan pada tahap ini. Peneliti hanya membatasi data berdasarkan bagaimana suatu masalah dirumuskan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>55</sup> Miles dan Huberman..., h. 14.

c) Peringkasan (*Abstracting*)

Membuat ringkasan elemen, prosedur, dan pernyataan penting yang harus ditegaskan untuk memastikan pencantumannya. Pada titik ini, data yang diperoleh dinilai, terutama dalam hal kecukupan dan kualitasnya.

d) Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)

Informasi dalam penelitian ini kemudian dipadatkan dan diubah dengan berbagai cara, antara lain seleksi ketat melalui ringkasan atau deskripsi singkat, klasifikasi data menurut pola yang lebih umum, dan seterusnya.

a. Penyajian Data

Presentasi data, yang muncul setelah kondensasi data, didefinisikan oleh Miles dan Huberman sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk inferensi dan tindakan. Cara data disajikan akan membantu peneliti lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Hal ini mengacu pada apakah peneliti memperdalam temuan atau melakukan tindakan dengan melanjutkan penyelidikannya.<sup>56</sup>

2. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan pengecekan ulang dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan merupakan langkah terakhir dari sekian banyak tahapan yang telah diselesaikan. Kesimpulan tentang “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah*” akan dibuat oleh peneliti dengan menggunakan fakta, angka, dan temuan yang dapat dipercaya dari studi lapangan

---

<sup>56</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (UI-Press: 2015), h. 124.

## **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Perpanjang Pengamatan**

Pada Tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

### **2. Ketekunan**

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan.<sup>57</sup>

### **3. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 329.

<sup>58</sup> Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln. *Hanbook Of Qualitative*. 2009, h. 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Sistematis perencanaan pembiayaan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Sistematis perencanaan pembiayaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga dalam merumuskan perencanaan pembiayaan harus diperhatikan bagaimana pengelolaan kemudian pengawasan dan evaluasi sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang berkelanjutan. Kemudian untuk mengurangi kesalahan pada kepengurusan sekolah dapat melaporkan kegiatan secara lugas, dan prosedur perencanaan anggaran juga harus lugas. Sumber yang digunakan untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi sumber pendapatan, seperti dana rutin, DPP, DBO, OPF, dan BP3 yaitu biaya untuk kegiatan belajar mengajar; pengembangan sumber belajar dan perangkat pembelajaran; dan kehormatan dan kesejahteraan.

Proses dalam menyusun perencanaan pendapatan melibatkan penempatan sumber daya pembiayaan, memperkirakan kas yang diproyeksikan untuk dikumpulkan, dan memperhitungkan semua sumber biaya ini. Satu-satunya tindakan perencanaan biaya nyata yang diperlukan untuk melaksanakan semua program yang dijadwalkan adalah pembuatan rencana pembelajaran dan pengeluaran anggaran.

Penganggaran pembiayaan pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin merupakan bagian penting untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Perencanaan anggaran pembiayaan sekolah harus disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah secara keseluruhan, baik untuk pengembangan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan untuk satu tahunan. Pengembangan jangka menengah untuk periode empat tahunan dan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan.

Di SMP Terpadu Bustanul Arifin, penyusunan perencanaan pembiayaan sebagai pedoman pelaksanaan program pembiayaan pendidikan dan tahap awal perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa kini dan masa depan telah berkembang menjadi agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Relevansi sistem perencanaan ini diketahui oleh kepala sekolah dan karyawannya.

“Perencanaan pembiayaan adalah sebuah proses evaluasi dari pemasukan individu individu dan keadaan pembiayaan dimasa depannya dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah diketahui untuk memprediksi pendapatan pada masa depan, nilai aset, dan rencana pengelolaannya. Sehingga dimasa yang akan datang akan terhindar dari masalah kesulitan penganggaran”.<sup>59</sup>

“Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun anggaran yang akan dibelanjaan sesuai dengan anggaran yang diterima oleh SMP Terpadu Bustanul Arifin, sebagaimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak didalamnya untuk bertanggungjawabkan anggaran tersebut. Sistem perencanaan pembiayaan disekolah tersebut diawal tahun anggaran dimulai dengan kepala sekolah mengadakan rapat bersama komite, bendahara dan seluruh dewan guru untuk membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam rapat tersebut bendahara bersama dewan guru

---

<sup>59</sup> Ketua Yayasan, Sarkawi, wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin.

menentukan kegiatan yang di prioritaskan pada tahun yang akan dilaksanakan dan juga ada dalam petunjuk teknis BOS pada tahun berjalan, karena petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ada perbedaan, sehingga program yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi sekolah.<sup>60</sup>

“Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada awal tahun untuk menyusun anggaran baik itu dana BOS yang diperoleh dari APBN, dana yang lain yang diperoleh dari wali santri maupun dana-dana sumbangan dari donatur-donatur lainnya, untuk keberlangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar.”<sup>61</sup>

“ Penghitungan Perencanaan pembiayaan untuk empat tahun ke depan, biaya program didapat pada pengalihan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah biaya pertahun diperoleh, maka dengan dikalikan empat akan diperoleh total rencana biaya selama empat tahun selanjutnya Anggaran ini untuk gaji, belanja barang habis pakai, langganan daya dan jasa, kerumahtanggaan, pengembangan kompetensi lulusan, sistem penilaian, PTK, kurikulum, sarpras manajemen sekolah, dan pembinaan kesiswaan yang dirumuskan dengan merujuk pada peraturan pemerintah, akan tetapi pada perencanaan empat tahun kedepan dengan metode pengkalian dapat berubah setiap kali di evaluasi, dikarenakan pihak sekolah akan melakukan pengembangan pengembangan setiap tahun untuk penyesuaian kedepan demi mencapai target.”<sup>62</sup>

Dari data observasi

“Perencanaan operasional dilakukan dengan penyusunan anggaran biaya. Perhitungan perencanaan pembiayaan telah dibuat untuk satu tahun berjalan yang disertai dengan metode pelaksanaannya dapat menjadi acuan pada tahun-tahun berikutnya. Tahapan perencanaan sekolah dilakukan pada awal kegiatan yang bertujuan agar semua kegiatan yang akan dilakukan memiliki manfaat bagi siswa dan masyarakat”.<sup>63</sup>

Metode yang digunakan di SMP Terpadu Bustanul Arifin dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan membuat skala prioritas dan mengalokasikan sumber sumber pembiayaan yang memperhatikan besarnya

---

<sup>60</sup> Alfi Sahrin, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

<sup>61</sup> Kepala Sekolah, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023

<sup>62</sup> Dokumen pengantar RKS, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

<sup>63</sup> Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 13 Maret 2023

dana dan kemudian memfokuskan ke dalam kebutuhan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

“SMP Terpadu Bustanul Arifin dalam pembuatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan dilakukan dengan membuat skala prioritas sehingga dapat mengalokasikan dari mana sumber biaya yang diperoleh dengan memperhatikan produksi, proyek, program, dan kegiatan yang akan dibiayai”.<sup>64</sup>

“SMP Terpadu Bustanul Arifin pada saat penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan, mengalokasikan sumber pembiayaan dengan selalu memperhatikan, besarnya dana untuk membiayai program, proyek, dan aktifitas Kegiatan belajar mengajar dan apa saja yang akan dihasilkan nanti (metode siklus kehidupan)”.<sup>65</sup>

Dari data dokumentasi

“Berdasarkan data RKAS pada tahun 2022 sudah dapat dilihat bahwa penyusunan rencana pembiayaan pendidikan sudah dibuat dengan baik dan benar”.<sup>66</sup>

Dari data observasi

“Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa diketahui penyusunan RKAS sudah sesuai dengan prosedur pembuatan RKAS dengan diawali dengan rapat komite, seluruh dewan guru, bendahara dan kepala sekolah”.<sup>67</sup>

Sebelum menyusun perencanaan pembiayaan (RAPBS), terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah penyusunan RKAS, dimana dalam penyusunannya harus berisi rencana anggaran jangka pendek, menengah, dan panjang sekolah. Hal ini senada dengan ungkapan Kepala Sekolah Haula Atina bahwa,

“Penyusunan rencana pembiayaan pendidikan didahului dengan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS), yang merupakan susunan kegiatan empat tahunan, kemudian dirincikan ke dalam rencana kerja tahunan (RKT) dengan menginventarisasi daftar kebutuhan, menganalisis kebutuhan, kemudian merumuskan kebutuhan tersebut”.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Alfi Sahrin, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

<sup>65</sup> Kepala Sekolah, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023

<sup>66</sup> Dokumentasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 13 Maret 2023

<sup>67</sup> Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 13 Maret 2023

<sup>68</sup> Kepala Sekolah, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023

“Dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan sekolah, ada tiga langkah yang dilakukan, pertama membuat rencana biaya sekolah, kedua membuat rencana pendanaan sekolah, dan ketiga menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan sekolah.<sup>69</sup>

Sebelum menghitung rencana biaya sekolah, Tim Perumus sekolah (TPS) perlu memiliki daftar biaya satuan, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Karena dengan adanya daftar ini setiap biaya kegiatan dapat dihitung langsung dengan mengalikan jumlah satuan baik itu barang maupun yang lainnya untuk program dan kegiatan tersebut dalam daftar biaya satuan.

Penyusunan RAPBS, didahulukan dengan rapat tim panitia kecil yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaaan, Wakil Sarpras dan Bendahara Sekolah yang dilaksanakan di SMP Terpadu Bustanul Arifin, pada bulan Juni sebelum tahun ajaran akan datang. RKAS dirumuskan oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan dalam sekolah) yang bertanggung dalam program kegiatan kemudian dikumpulkan dalam kerangka penyamaan persepsi untuk menyusun program sekolah sesuai program 4 tahunan yang dijabarkan dalam program tahunan sekolah yang kemudian diplenokan bersama komite sekolah untuk dijadikan RAPBS.

Perumusan rancangan anggaran biaya pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) merujuk pada peraturan pemerintah dan dikomunikasikan kepada komite sekolah dan stakeholder yang terkait. Setelah program dan kegiatan rutin/reguler dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah biaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar jumlah biaya program dan kegiatan rutin/reguler yang akan

---

<sup>69</sup> Dokumentasi , SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

diperlukan, dan dari mana saja sumber pembiayaan apakah dana tersebut cukup untuk melaksanakan program selanjutnya sehingga langkah berikutnya adalah membuat rencana pembiayaan.

Rencana pembiayaan dibuat untuk memperkirakan sumber dan jumlah dana yang diperkirakan didapatkan oleh sekolah. Beberapa sumber dana yang dapat diharapkan oleh sekolah antara lain, BOS, sumbangan masyarakat, APBD Kabupaten, pendapatan asli sekolah, dan donatur. Langkah berikutnya adalah menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pembiayaan.

“Struktur perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin dikelompokkan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan pembagian persentase masing-masing standar berdasarkan skala prioritas yang dipandang sangat urgen, seperti pengembangan Standar sarana dan prasarana”.<sup>70</sup>

“Perencanaan pembiayaan terlebih dahulu dengan mempresentasikan Standar Nasional pendidikan (SNP), meskipun terkadang dalam pelaksanaannya disesuaikan kembali dengan kenyataan, terkadang pada pelaksanaan terdapat standar lain yang persentasenya dikurangi untuk berjalannya standar yang telah diprioritaskan dalam rapat yang telah dilakukan sebelumnya”.<sup>71</sup>

Pembagian persentase tersebut berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaaan, kurikulum, guru penanggungjawab kegiatan, yayasan, dan komite sekolah. Petunjuk teknis penggunaan dana BOS, mengacu pada RAPBS tahun sebelumnya.

“Perencanaan pembiayaan pendidikan dijadikan sebagai dasar acuan pada pelaksanaan kegiatan lembaga. Sebelum penyusunan rencana pembiayaan terlebih dahulu dilakukan penyusunan RKAS, dengan rapat inventarisasi program, yang dilakukan di SMP Terpadu Bustanul Arifin

---

<sup>70</sup> Kepala Sekolah, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023

<sup>71</sup> Alfi Sahrin, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

pada bulan juni sebelum ajaran baru dimulai, yang melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, Guru, Yayasan, Komite sekolah dan siswa, untuk disusun menjadi RAPBS, dimana komponen RAPBS mencakup 8 standar nasional Pendidikan (SNP) yang terintegrasi satu sama lain. Sedangkan anggaran RAPBS yang direncanakan sebesar Rp 465.000.000,00, dengan asumsi seluruh kegiatan tercover dengan pembiayaan yang direncanakan, dengan harapan terjadi peningkatan kualitas mutu sekolah, meskipun demikian terkadang ada saja kegiatan yang tidak tercover, seperti beberapa kegiatan islam”.<sup>64</sup>

“Anggaran RAPBS yang dikelola adalah sebanyak 465.000.000,00, dan sudah tercover semua kegiatan yang telah direncanakan”<sup>72</sup>

Rencana kebutuhan pembiayaan pendidikan per komponen pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin pada tahun pelajaran 2022/2023 disusun dengan rincian sebagai berikut:

Pada standar kompetensi lulusan tidak ada nominal yang dikeluarkan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan dari awal perencanaan tidak ada dianggarkan untuk kompetensi lulusan tersebut.

Selanjutnya ditentukan berapa tarif biaya yang berlaku sehingga dapat diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk kedelapan standar tersebut, begitu pula dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana berdasarkan program atau kegiatan yang menjadi beban biaya lainnya dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS (bantuan operasional siswa) prosesnya mempunyai kesamaan dengan komponen komponen yang lain, kemudian dijabarkan berapa jumlah anggaran pembiayaan setiap komponen tersebut, yang dihitung dengan cermat berdasarkan rapat yang telah disepakati antar seluruh penanggung jawab sekolah yang telah disusun dari RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) sebelumnya. Berdasarkan

---

<sup>72</sup> Dokumentasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah

hitungan ini dapat diketahui berapa jumlah besaran anggaran operasional sekolah per tahun dalam menyelenggarakan proses pembelajaran (PBM). Dengan diketahuinya total biaya yang telah dianggarkan tersebut maka dapat ditentukan berapa total biaya untuk setiap siswa.

Untuk memudahkan dalam penyeleksian atau pendistribusian skala kebutuhan sekolah, diperlukan model perencanaan pembiayaan yang tepat.

“Dalam menyusun RAPBS di SMP Terpadu Bustanul Arifin mengacu pada juknis/petunjuk teknis Kemendikbud, dalam hal ini Sekolah menggunakan model costing, (pembiayaan berdasarkan keefektifan biaya) selanjutnya rancangan RAPBS ini di sahkan menjadi APBS oleh Kepala Sekolah, dan komite sekolah, mengetahui kasi Kemendikbud Kab Bener Meriah “. <sup>73</sup>

“Penyusunan RAPBS menggunakan juknis dari Kemendikbud yang telah ada, model costing (pembiayaan) dan keefektifan biaya, dan RAPBS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah, komite sekolah, seluruh dewan guru dan Kasi Kemendikbud Kab Bener Meriah yang berperan”. <sup>74</sup>

“Perencanaan sekolah dilakukan pada awal tahun ajaran baru sebelum dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk melihat azas pemanfaatan bagi peserta didik dan juga masyarakat luar agar semua kegiatan yang akan dilakukan dapat dirasakan manfaatnya”. <sup>75</sup>

Perincian secara detail dari Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin dapat dilihat dari dokumen RAPBS tahun 2022/2023, sebesar Rp 465.000.000,00, dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan rangkaian kegiatan selama satu tahun pembelajaran berjalan.

RAPBS yang telah disepakati antara Kepala Sekolah, Wakil humas, Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum, Wakil Sarana prasarana, Guru penanggung jawab

---

<sup>73</sup> Kepala Sekolah, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023

<sup>74</sup> Alfi Sahrin, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023

<sup>75</sup> Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, 2023

kegiatan, Komite sekolah, dan Pengurus yayasan selanjutnya akan ditetapkan menjadi APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) oleh Kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin dan Ketua Yayasan ABUYA SARKAWI, mengetahui Kasi Pendidikan Sekolah Kemendikbud Kabupaten Bener Meriah. APBS ini Sebagai dokumen, pembiayaan pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin merupakan produk yang direncanakan detail dan dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan dan berlaku selama satu tahun pelajaran, selanjutnya disebut pembiayaan pendidikan.

## **2. Pengelolaan Sumber Dana Pembiayaan Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Melihat pentingnya investasi Sumber Daya Manusia untuk kepentingan ekonomi Bangsa Indonesia kedepannya maka ditertibkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 “Dana Pendidikan didalamnya selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari APBN dan minimal sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional

Pengelolaan sumber dana di SMP Terpadu Bustanul Arifin sepenuhnya dikelola oleh sekolah, yang termasuk kedalamnya adalah bendahara sekolah dan bendahara yayasan, kepala sekolah dan seluruh penanggung jawab kegiatan yang akan dilakukan. Haula Atina menyataka mengatakan bahwa:

“Pada saat ini anggaran biaya yang diperoleh SMP Terpadu Bustanul Arifin berasal dari anggaran APBN dan APBD yang dituangkan dalam RKAS, anggaran yang diperoleh tiap tahunnya berbeda. Anggaran yang diperoleh sesuai dengan jumlah siswa di sekolah, pada tahun 2022 jumlah anggaran BOS yang dikelola sebanyak Rp. 465.000.000,00. Selain dari

dana APBN dan APBD anggaran sekolah juga berasal dari iuran siswa dan juga sumbangan dari yayasan dan donatur lain.<sup>76</sup>

“Dana yang diperoleh dari pusat sepenuhnya dikelola oleh bendahara sekolah yang diawasi oleh kepala sekolah guna meminimalisir kesalahan pada kegiatan yang telah diagendakan pada rapat dengan guru, komite, bendahara dan kepala sekolah. Kemudian diharapkan dengan pengelolaan pembiayaan yang baik dapat meningkatkan mutu sekolah sehingga dapat mengeluarkan alumni yang baik dalam bidang sosial maupun bidang agamanya”<sup>77</sup>

“Anggaran Dana BOS disalurkan berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah peserta didik, semakin banyak peserta didik maka akan semakin banyak juga dana yang akan diterima, namun sebaliknya semakin sedikit jumlah peserta didiki maka akan semakin sedikit juga dana BOS yang akan diterima”<sup>78</sup>

Dana BOS yang telah disalurkan sama setiap tahunnya yaitu dikeluarkan berdasarkan jumlah dari peserta didik semakin banyak peserta didik maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kesekolah namun jika sedikit jumlah peserta didiknya maka jumlah yang diterima juga sedikit. Dana yang disalurkan tersebut dipergunakan untuk membantu operasional dan juga meningkatkan sarana dan prasarana sekolah agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal lagi kedepannya.

Setiap siswa yang masuk ke SMP Terpadu Bustanul Arifin membayar iuran sekolah, untuk membantu pengembangan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan warga disekolah dan juga digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Selain dari iuran rutin sekolah peserta didik baru diwajibkan membayar uang pembangunan sekolah yang mana anggaran tersebut

---

<sup>76</sup> Dokumentasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah

<sup>77</sup> Wawancara, Guru SMP terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, 14 Maret 2023

<sup>78</sup> Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 2023

dikelola oleh bendahara yayasan untuk peningkatan mutu sekolah.

“Dana yang diterima dari siswa sebanyak Rp. 75. 000, 00 Perbulannya. Uang yang diperoleh tersebut digunakan untuk membayar upah guru dan juga sebagai penunjang sarana prasarana disekolah agar dapat meningkatkan mutu sekolah. Terdapat juga iuran lain sebanyak Rp. 400.000, 00 perbulannya yang digunakan untuk makan peserta didik, Rp. 60.000/Tahun yang digunakan sebagai uang kesehatan dan Rp. 80. 000/Tahun untuk kegiatan tahunan yang diselenggarakan (MILAD sekolah), untuk setiap kegiatan perayaan hari besar islam peserta didik juga mengumpulkan dana sebanyak Rp. 50.000/Tahun. Selain dari pada iuran tetap tersebut yang telah dijelaskan ada juga bantuan dari masyarakat dan juga orang tua siswa yang diberikan secara sukarela.”<sup>79</sup>”

“Dana yang diperoleh dari orang tua siswa bukan hanya iuran perbulan saja, namun ada juga biaya pembangunan sekolah. Kemudian pada setiap tahunnya ada juga iuran tahunan yang diperoleh dari orang tua siswa yang digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik”

“pada dasarnya sumbangan boleh diminta pada wali peserta didik, namun dilihatkan lagi namanya sumbangan tidak diwajibkan bagi seluruh santri. Karena jika diperuntukan seluruh siswa itu sudah merupakan kewajiban. Orang tua Peserta didik SMP Terpadu Bustanul Arifin tidak semua berasal dari kelas atas ada juga dari kelas menengah kebawah. Biasanya sumbangan hanya diminta pada wali siswa yang memiliki pendapatan kelas atas saja, itupun jika diberikan secara sukarela.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan tersebut SMP Bustanul Arifin Bener Meriah mendapat dana iuran SPP tetap dari orang tua siswa dan juga ada dana bantuan. Iuran tetap ialah pembayaran/penarikan uang oleh sekolah kepada siswa/wali siswa yang bersifat wajib, mengikat dan juga jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan yang disebut dengan dana bantuan adalah pemberian yang dapat berupa uang/barang oleh orang tua atau wali siswa yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat sekolah tersebut.

---

<sup>79</sup> Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin

<sup>80</sup> Wawancara, Wakil Kepala Sekolah, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 2023

Penarikan uang iuran yang dilakukan sekolah dikelola oleh bendahara yayasan ada yang perbulan dan ada juga yang pertahun. Pemungutan perbulan ialah iuran SPP dan juga dana catering, kemudian pemungutan pertahunnya yaitu dana MILAD sekolah yang digunakan pada kegiatan hari ulang tahun sekolah, Dana kesehatan digunakan untuk biaya obat dan pemberi perawatan pada peserta didik yang memiliki masalah pada kesehatan, dan juga dana untuk kegiatan perayaan hari besar islam yaitu kegiatan-kegiatan seperti perayaan hari lahir nabi Muhammad SAW (Maulid Nabi).

### **3. Akuntabilitas pembiayaan sekolah yang terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Akuntabilitas pembiayaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah berada pada kategori sangat tinggi, artinya pihak sekolah harus mampu melaksanakan manajemen pembiayaan sekolah secara maksimal mulai dari perencanaan pembiayaan, penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggungjawaban.

#### **Pengawasan**

Dari hasil wawancara dengan Alfi Sahrin, Selaku Bendahara SMP Terpadu Bustanul Arifin mengatakan bahwa,

“Sistem pengawasan yang digunakan disekolah ini adalah sistem pengawasan melekat..”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga pendidikan islam Terpadu yang cukup dikenal di kabupaten Bener Meriah, Bendahara sekolah juga menerapkan pengawasan dalam beberapa kegiatan atau proses penting dalam

pembiayaan. Sebagaimana paparan diatas bahwa sistem pengawasan yang digunakan adalah sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah tindakan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah/bawahan secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.

Dalam hal ini, pengawasan dilakukan langsung oleh atasan organisasi yaitu ketua Yayasan dari pihak yayasan. dan pengawasan dari dinas pendidikan. Pengawasan dilakukan dalam beberapa aspek, seperti pada slip/kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran dan data tunggakan santri. Hal ini selaras dengan ungkapan kepala sekolah Haula Atina berikut”

“Aspek dimana pengawasan dilakukan yaitu pada slip/kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran dan data tunggakan santri, biasanya dilakukan setiap minggu atau per bulan”

Kemudian beliau menjelaskan terkait pihak yang berwenang diantaranya Pengawas dinas Pendidikan untuk dana BOS yang diterima, ketua yayasan, kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk dana yang dikelola oleh yayasan .

“Pihak yang berwenang melakukan pengawasan diantaranya inspektorat dari dinas pendidikan, ketua yayasan, Kepala Sekolah, Bendahara dan Auditor apa bila diperlukan”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dan berwenang dalam melakukan pengawasan setiap hari nya atau setiap bulan nya adala ketua yayasan, kepala sekolah, bendahara, pengawas dinas pendidikan dan auditor apa bila diperlukan.

Kepala sekolah menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat proses pengawasan sebagaimana berikut:

“yang menghambat itu biasanya bendahara sekolah terlambat dalam memberikan data atau laporan pembiayaan kepada kami, faktor yang mendukung kami melakukan sistem pendataan keuangan dengan aplikasi pembiayaan”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat proses pengawasan adalah adanya keterlambatan dari bendahara sekolah dalam memberikan data atau laporan kepada kepala sekolah, sehingga proses pengawasan selalu tertunda dan menghambat berjalannya proses yang lain. Sedangkan faktor pendukung proses pengawasan adalah penggunaan aplikasi pembiayaan yang mana aplikasi ini dapat mempermudah pengurus pembiayaan dalam melakukan pendataan terkait pembiayaan atau biaya-biaya yang dikelola oleh bendahara.

### **Evaluasi**

Sistem atau prosedur evaluasi yang diterapkan di pembiayaan SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi setiap akhir bulan untuk mengakurasi atau meneliti antara data manual dan data IT guna memastikan posisi neraca pembiayaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bendahara SMP Bustanul Arifin:

“Rapat koordinasi setiap akhir bulan untuk mengakurasi data manual dan data IT untuk memastikan posisi neraca pembiayaan, laporan setiap akhir bulan ke kepala sekolah”

Kemudian beliau juga menjelaskan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi sebagaimana berikut”

“Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi diantaranya adalah Bendahara sekolah dan kepala sekolah dan seluruh dewan guru SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi diadakan setiap bulan dengan mengadakan rapat koordinasi yang diikuti oleh bendahara, Kepala sekolah dan Seluruh Dewan Guru SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

Alfi Sahrin selaku bendahara menjelaskan tentang komponen-komponen yang dievaluasi dan pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

“Komponen atau aspek yang dievaluasi seperti kinerja staf, time line penyelesaian laporan, tunggakan peserta didik, yang berwenang melakukan evaluasi saya sendiri selaku kepala sekolah dan bendahara”.

Jadi selain untuk mengakurasi data manual dan data IT guna memastikan posisi neraca pembiayaan, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui kinerja Bendahara, time line penyelesaian laporan dan tunggakan santri, pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi pada beberapa aspek tersebut diatas adalah kepala sekolah.

Berkaitan dengan proses evaluasi, Haula atina menjelaskan bahwa hingga saat ini evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Artinya terdapat evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar atau yang biasa disebut audit. Bersamaan dengan hal itu beliau juga menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat proses evaluasi sebagaimana berikut:

“sejauh ini audit dari luar terkait dana BOS juga dilakukan. Untuk faktor penghambat yaitu keterlambatan data dari bendahara, faktor yang mendukung adalah sistem pendataan keungan menggunakan aplikasi pembiayaan”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat proses evaluasi adalah adanya keterlambatan dari pihak bendahara sekolah dalam memberikan data atau laporan kepada kepala sekolah, sehingga

proses evaluasi bisa tertunda dan menghambat berjalannya proses pelaporan. Sedangkan faktor pendukung proses evaluasi adalah penggunaan aplikasi pembiayaan, yang mana aplikasi ini dapat mempermudah pengurusan dalam melakukan evaluasi terkait pembiayaan atau biaya-biaya yang dikelola sekolah.

### **Palaporan**

Haula atina selaku kepala sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin menjelaskan terkait sistem pelaporan yang diterapkan di sekolah yaitu sebagai berikut:

“Sistem pelaporan disini menggunakan pelaporan berjenjang yang dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun. Pelaporan dilakukan oleh bendahara sekolah ke kepala sekolah, kabag administrasi yayasan dan kepada ketua yayasan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat bagian atau pihak yang setiap akhir bulan dan akhir tahun melakukan pelaporan, yaitu bendahara ke kepala sekolah, Kabag administrasi yayasan, dan ketua yayasan. Untuk laporan dana BOS dilakukan tiga bulan sekali.

Adapun pihak yang diberi laporan adalah Bendahara oleh ketua yayasan dan dinas pendidikan. Laporan berisi informasi terkait neraca akir bulan yang berfungsi untuk mengetahui posisi saldo pembiayaan untuk yayasan, dan Penganggaran dana BOS untuk laporan ke kabag pembiayaan dinas pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Haula atina selaku kepala SMP Terpadu Bustanul arifin Bener Meriah:

“pihak yang diberi laporan adalah bendahara oleh ketua yayasan, yang dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun. Dan laporan dari dinas pendidikan setiap 3 bulan sekali”

Dapat disimpulkan bahwa lapoan yang diberikan dan dilakukan oleh bendahara dan ketua yayasan setiap akhir bulan dan akhir tahun. Setiap akhir bulan, Bendahara memberikan lapoan kepada kepala sekolah kemudian ke kabag administrasi yayasan dan ketua yayasan. sedangkan laporan akhr tahun biasanya dilakukan setiap anggota yayasan dalam kepengurusan sekolah. Laporan dalam forum pengurus yayasan ini dihadiri oleh seluruh pengurus yayasan dengan melaporkan secara tertulis dan dipaparkan dihadapan pengurus yayasan. sedangkan untuk laporan dana BOS dilakukan juga oleh Bendahara setiap 3 bulan sekali yang diserahkan ke kabag pembiayaan dinas Pendidikan bagian BOS.

Dalam proses Pelaporan tentu juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan penghambat sebagaimana dipaparkan oleh Kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin:

“Faktor pendukung peloparan adalah adanya sistem pendataan pembiayaan menggunakan aplikasi pembiayaan, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya keterlambatan data dari bendhara sekolah”

Jadi penggunaan sistem pendataan pembiayaan dengan sistem aplikasi pembiayaan menjadi faktor pendukung dalam proses pelaporan. Dengan menggunakan aplikasi pembiayaan tersebut, proses pencatatan dan pembukuan pembiayaan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efesien sehingga hal ini juga memudahkan proses pelaporan. Sedangkan faktor penghambat proses pelaporan adalah adanya keterlambatan data dari bendahara sekolah, sehingga proses pelaporan yang diterapkan dengan sistem berjenjang juga terhambat. Tentunya setiap laporan yang dilakukan oleh yayasan, tergantung dengan laporan

dari staf atau pihak dibawahnya. Apabila data dari bendahara sekolah, maka juga akan mempengaruhi proses pelaporan ke ketua yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pentingnya manajemen pembiayaan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin di Bener Meriah Kepala sekolah menyampaikan bahwa:

“Kita tidak bisa menafikan ya memang hampir semua kegiatan tidak lepas dari pembiayaan, tetapi kami disini ada istilah subsidi silang, karena yayasan ini memiliki variasi lembaga, SMA dan SMP. Tetapi diyayasan ini juga ada santri gratis yang memang subsidi penuh oleh yayasan. jadi berbicara tentang pembiayaan, untuk sementara praktiknya seperti itu”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah tidak menafikan fungsi dari pembiayaan itu sendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. manajemen pembiayan merupakan hal yang sangat penting, karena setiap kegiatan atau program sekolah yang mengarah pada pengembangan guna peningkatan mutu sekolah pasti membutuhkan biaya. Diantara program atau kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh sekolah membutuhkan fungsi manajemen pembiayan yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara.

Bendahara sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah pada SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah bekerja sama dengan seluruh staf dan seluruh guru yang memiliki program tertentu. Hal ini senada dengan ungkapan kepala sekolah.

“ keputusan tertinggi ada di ketua yayasan bersama jajaran. Tapi secara teknis ada di bagian pendidikan, bagian pembiayaan, bagian kominfo. Kominfo sebagai corong untuk keluar sekolah, bagian pembiayaan tentunya segala pengembangan tidak terlepas dari pembiayaan, bagian pendidikan. Semuanya tidak bisa berjalan sendir-sendiri, jadi saling berkaitan”.

Kerjasama yang dilakukan dan menjadi tugas utama dari bagian pembiayaan adalah mendiskusikan, mempertimbangan dan mensinkronkan biaya yang diajukan oleh bagian yang memiliki kegiatan dan program tertentu. Maka dari itu, manajemen pembiayaan diperlukan agar bagaimana suatu program atau kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana. Anggaran penerimaan dan Belanja sekolah (RAPBS) dan tetap dapat merealisasikan kegiatan atau program sekolah yang lainnya. Jadi bagaimana manajemen pembiayaan yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab bagian pembiayaan juga dapat mempengaruhi dan berimplikasi pada proses pengembangan sekolah sebagai upaya peningkatan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener meriah.

Meskipun demikian, Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa bagi SMP Terpadu Bustanul Arifin biaya bukan hal nomor satu dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Namun posisi manajemen pembiayaan cukup mendukung adanya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin. Hal ini karena pihak pesantren sendiri cukup menyadari bahwa setiap pengembang dalam upaya peningkatan mutu SMP Bustanul Arifin pasti membutuhkan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfi sahrin selaku bendahara terkait implikasi manajemen pembiayaan dalam upaya peningkatan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah berikut:

“Ada. Adanya disiplin anggaran oleh pengguna anggaran, terealisasinya program sekolah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya, *monitoring* dan evaluasi berjalan dengan baik.”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat peneliti artikan bahwa adanya implikasi dalam upaya peningkatan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul

Arifin Bener Meriah berdasarkan berjalannya fungsi dari manajemen pembiayaan itu sendiri, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi. Pada proses pengelolaan penganggaran, para pengguna anggaran disiplin dalam menggunakan anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya program sekolah dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan anggaran. Dan pada proses evaluasi, pengawasan dan evaluasi terlaksana dengan baik. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap fungsi manajemen pembiayaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan Bendahara memiliki implikasi dalam upaya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

### **Gambaran objek penelitian**

#### **Tinjauan historis**

SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah adalah sekolah yang terletak di Desa Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sekolah ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 2000, secara bottom up dari masyarakat, guna mempermudah akses pendidikan yang pada tahun itu masih sangat sulit untuk didapatkan, karena pada tahun tersebut, Desa pondok sayur adalah daerah yang di wilayah tersebut belum terdapat Sekolah terpadu, akhirnya ustad Syarqawi dan beberapa tokoh masyarakat lain berbondong-bondong merintis Sekolah Terpadu. Pada awal pendirian, kegiatan pembelajaran dilakukan masih menggunakan bangunan yang belum permanen kemudian terus berbenah hingga akhirnya sekolah memiliki gedung sendiri dari tanah Wakaf keluarga Ustad Syarqawi.

Sekolah ini terus memperbaiki diri membangun satu persatu lokal gedung untuk memenuhi kebutuhan siswa yang dari tahun ke tahun terus bertambah.

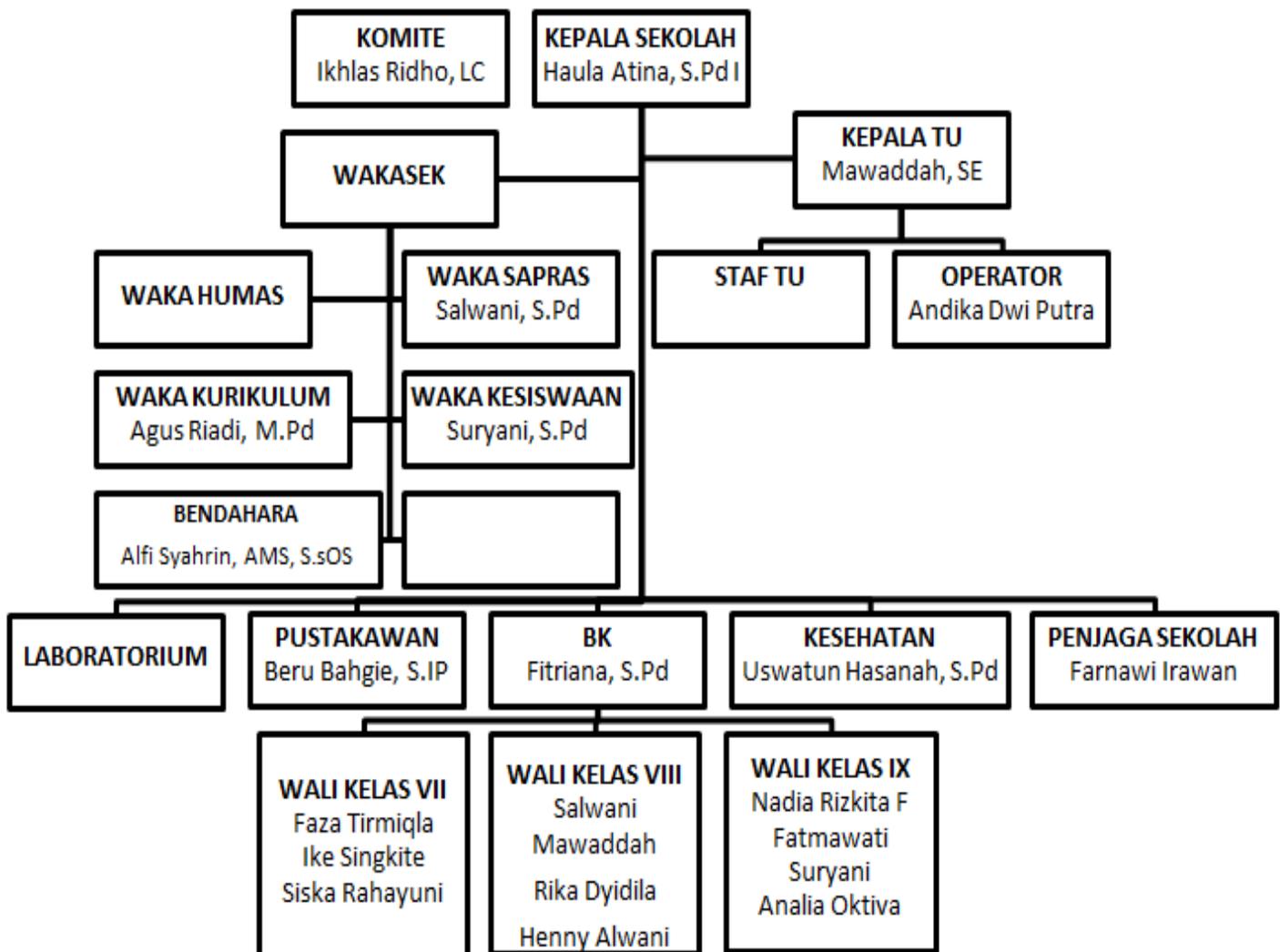
Sekolah tersebut yang terletak di wilayah kecamatan Bukit, suatu lokasi yang cukup strategis, dan terbuka serta menjadi jalan alternatif dari desa-desa menuju kota. Wali Murid dari SMP Terpadu Bustanul Arifin, mayoritas bekerja sebagai pedagang, petani pemilik kebun kopi, buruh tani, dan pekerja bangunan. Kondisi ini mengakibatkan pendidikan anak menjadi terabaikan. Anak-anak jadi seringkali berkata kotor dan suka mengumpat. Dengan hadirnya SMP Terpadu Bustanul Arifin yang mempunyai fasilitas mukim bagi santri khususnya kelas 7, 8 dan 9, mempunyai harapan untuk menjadikan kebiasaan buruk mereka berubah menjadi pembiasaan akhlak Al-Qur'an.

#### **Profil SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

1. Nama Sekolah: SMP TERPADU BUSTANUL ARIFIN
2. NSS :
3. NPSN : 10107269
4. Status : Swasta
5. Akreditasi : B
6. Alamat :
  - a. Jalan : Sp. Teritit- Pondok Baru
  - b. Desa/Kelurahan : Pondok Sayur
  - c. Kecamatan : Bukit
  - d. Kabupaten : Bener Meriah
  - e. Provinsi : Aceh
7. Kode POS : 123456
8. E\_Mail : smpitbustanularifin@gmail.com

9. Mulai operasional tahun: 2000
10. Status Tanah : Milik Sendiri
11. Status Bangunan : Milik Sendiri
12. No. Telp. / HP : 06437425118

### Struktur Organisasi SMP Terpadu Bustanul Arifin



## Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel 4.2 Data Guru

NO	Nama	L/P	Ijazah	Jurusan	Status	Keterangan
1	Analia Oktiva, S.Pd	P	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Guru Bahasa Indonesia	Kontrak Daerah
2	Suryani, S.Pd	P	S1	Pendidikan Matematika	Guru Matematika	Kontrak Daerah
3	Alfi Syahrin. AMS, S.Sos	L	S1	Sosiologi	Guru PJOK	Honorer
4	Fatmawati, S.Pd	P	S1	Pendidikan Biologi	Guru IPA	Kontak Daerah
5	Salwani,S.Pd	L	S1	Tadris Bahasa Inggris	Guru Bahasa Inggris	Honorer
6	Yusniyar, S.Pd	P	S1	Tadris Bahasa Inggris	Guru Bahasa Inggris	Honorer
7	Ike Singkite, S.Pd	P	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	Guru Bahasa Inggris	Honorer
8	Faza Tirmiola, S.Pd	P	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Guru Bahasa Indonesia	Honorer
9	Maridaini, S.Pd	P	S1	Pendidikan Biologi	Guru Prakarya	Honorer
10	Siska Rahayuni, S.Pd	P	S1	Pendidikan Biologi	Guru IPA	Honorer
11	Henny Alwani, S.Pd	P	S1	Pendidikan Fisika	Guru IPA	Honorer
12	Maulida Ayuni, S.Pd	P	S1	Pendidikan Ekonomi	Guru IPS	Kontrak Daerah
13	Rika Oyadila, S.E	P	S1	Ilmu Ekonomi	Guru IPS	Honorer
14	Nadia Rezkita Febri, S.Pd	P	S1	Pendidikan Sejarah	Guru IPS	Honorer
15	Eka Rahmiana, S.Pd.I	P	S1	Pendidikan Bahasa Arab	Guru PAI	Honorer
16	Hartinah, S.Pd	P	S1	Pendidikan Agama Islam	Guru PAI	Honorer

17	Ramayana, S.Pd	P	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Guru PPKN	Kontrak Daerah
18	Mawaddah, S.Pd	P	S1	Pendidikan Matematika	Guru Matematika	Honerer
19	Sinta Paramitha, S.Pd	P	S1	Pendidikan Matematika	Guru Matematika	Honerer
20	Niptahussa'adah, S.Pd.I	P	S1	Pendidikan Bahasa Arab	Guru Mulok	Honerer
21	Agus Riadi, S.Pd	P	S1	Pendidikan Bahasa Arab	Guru Bahasa Arab	Honerer
22	Fitriana, S.Pd.I	P	S1	Bimbingan Dan Konseling	Guru BK	Kontrak Daerah
23	Uswatun Merdu Sari, S.Pd	P	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Guru PPKN	Honerer
24	Evi Rahmani, S.H	P	S1	Hukum Keluarga Islam	Guru PAI	Honerer
25	Salisnawati, S.Pd	P	S1	Pendidikan Bahasa Arab	Guru Bahasa Arab	Honerer
26	Haula Atina	P	S1	Pendidikan Kimia	Guru Kimia	Honerer

### **Visi Misi dan Tujuan SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

#### **VISI**

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; globalisasi yang sangat cepat; era informasi; dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus peluang itu. SMP TERPADU BUSTANUL ARIFIN memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam Visi sekolah berikut:

“Membentuk Generasi yang Sholeh dan Akram”

Visi tersebut mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan akhlaqul karimah yang tinggi, potensi kekinian, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan iman

dan taqwa demi terwujudnya sumber daya manusia muslimsesuai dengan harapan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkannya, Sekolah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi Sekolah.

### **MISI**

Adapun Misi SMP Terpadu Bustanul Arifin adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan iman dan takwa (imtak)
- b. Menciptakan lingkungan yang islami
- c. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu
- d. Optimalisasi peran serta semua stake holder.
- e. Membangun hubungan antara sekolah, keluarga (orang tua) dan masyarakat dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dalam bidang keilmuan, keislaman. Keterampilan dan akhlak yang mulia
- f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistematis Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Sistematis perencanaan pembiayaan sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pendataan pembiayaan, sehingga pembiayaan sesuai dengan perencanaan yang telah didiskusikan pada rapat sebelumnya

Anggaran di SMP Terpadu Bustanul Arifin merupakan rencana pemasukan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sekolah dalam waktu 1 Tahun berjalan. Penyusunan anggaran merupakan proses pemetaan/negosiasi mengenai perencanaan antara kepala sekolah wakil kepala sekolah, komite sekolah beserta seluruh dewan guru yang ada di SMP Terpadu Bustanul Arifin, untuk penganggaran kegiatan yang mencakup alokasi biaya dan juga skala prioritas kegiatan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, pedoman tersebut nantinya dapat dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya dengan syarat pedoman tersebut sudah baik dan tidak ada lagi kesalahan

Hal tersebut diatas divalidasi oleh Bendahara penyusun anggaran yang merupakan hasil dari negosiasi kepala sekolah, Komite, seluruh dewan guru, wakil kepala sekolah dan juga seluruh staf dalam menentukan jumlah biaya yang dianggarkan pada setiap kegiatannya yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>81</sup>

Senada dengan pernyataan penelitian Zon Saroha Ritonga yang menyatakan bahwa “Perencanaan merupakan hal yang paling mendasar yang

---

<sup>81</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesioanl*, Bandung. Remaja Rosdakarya, 2005. h. 116

harus dipersiapkan kepala sekolah dalam membangun mutu di sekolah tersebut. Banyak hal yang dilakukan untuk membangun hal tersebut antara lain dengan membuat ataupun menyusun perencanaan yang baik di sekolah tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan selalu memiliki tujuan dan cara mengerjakannya, mengambil waktu tertentu, serta mengambil tempat tertentu. Dengan demikian, perencanaan, dapat dikatakan sebagai upaya menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana caranya, mengerjakan apa, bilamana dikerjakan, serta di mana dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>82</sup>

Senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tius Eka Margeta “suatu organisasi harus membentuk perencanaan dan mampu mengartikan strategi yang tepat sasaran sehingga bisa membuat keputusan/kebijakan tentang pengalokasian sumber daya yang ada secara tepat dalam menjalankan rencana/strategi tersebut dan untuk menilai dan melihat apakah strategi yang telah direncanakan dan juga telah dijalankan tersebut berhasil atau tidaknya, maka terlebih dahulu harus dipilih pengukuran yang seimbang, terintegrasi selaras dan akurasi”<sup>83</sup>

Melalui perencanaan akan ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Mesiono mengemukakan perencanaan merupakan penentuan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, kapan dan siapa yang akan melakukannya agar tujuan yang telah

---

<sup>82</sup>Ritonga, Zon Saroha, Perencanaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Mutu sekolah Di Smp Swasta Graha Kirana Medan, *Jurnal Equity in Education Journal (EEJ)*, Volume 2, Nomor 2, 2020, h.77-87.

<sup>83</sup> Margareta, Ririn Tius Eka. 2017. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol 2 no 2

ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>84</sup> Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan perencanaan pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah telah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di atas.

Menurut Malayu (dalam Dunn) perencanaan dikaitkan dengan pengukuran hasil kinerja sebuah organisasi, yaitu sejauh mana hasil kinerja organisasi tersebut dapat memenuhi keinginan publik.<sup>85</sup> Tentunya proses perencanaan akan sangat menentukan hasil akhirnya, sehingga kemampuan lembaga pendidikan dalam memodifikasi perencanaan karena terjadinya hal-hal yang tidak terduga, sangatlah penting. Tetapi, bagaimanapun juga, perencanaan yang kurang tepat masih lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali, karena rencana yang kurang tepat tersebut masih dapat diperbaiki tentunya. Perencanaan merupakan titik awal sebuah pekerjaan yang hendak dilakukan agar berjalan maksimal sesuai rencana. Perencanaan membutuhkan pemikiran yang mendalam, dengan pikiran yang mendalam akan membantu proses perencanaan yang akan di buat. Pemikiran tersebut dilandasi dengan keikhlasan dan keinginan untuk merencanakan suatu perencanaan bersama. perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan sekolah terutama peserta didik sebagai sasaran dari perencanaan, yang melibatkan segenapdewan guru dan peserta didik dalam prosesnya. Pelaksanaan perencanaan dilakukan sebagai wujud dari perencanaan yang disusun sebelumnya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

---

<sup>84</sup> Mesiono. *Manajemen dan Organisasi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 51

<sup>85</sup> Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press : 2000, h. 67

Dalam Penyusunan RKAS SMP Terpadu Bustanul Arifin melakukan 4 hal berikut:

- a. Merencanakan anggaran SMP Terpadu Bustanul arifin dalam merencanakan anggaran pendidikan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Sehingga sekolah harus memperhitungkan dengan matang agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mempersiapkan anggaran. Pada tahap mempersiapkan anggaran dalam 1 tahun yang akan datang. SMP Terpadu Bustanul Arifin berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan sumber dana yang diperoleh serta penyeleksian program-program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
- c. Mengelola pelaksanaan anggaran yaitu persiapan pembukuan, mempersiapkan pembelanjaan, membuat bukti transaksi, membuat perhitungan anggaran dalam berbagai program, serta membuat laporan pertanggung jawaban pembiayaan.
- d. Menilai pelaksanaan anggaran. Proses menilai memerlukan masukan dari masyarakat dalam dan luar sekolah. Agar penilaian anggaran dalam setiap kegiatan yang memerlukan biaya akan lebih efektif dan efisien.

## **2. Pengelolaan Sumber-sumber Dana Pembiayaan Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Sebuah Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan, baik itu pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, dengan sistem ekonomi di Indonesia pada saat ini yang bersifat sistem ekonomi demokrasi, seperti yang disampaikan oleh Edwin Basmar dkk dalam jurnal Ahmad Ridwan “ sistem ekonomi demokrasi sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berpedoman pada kekeluargaan dan gotongroyong, dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.”<sup>86</sup> Sumber-sumber dana yang diperoleh sudah di kelola dengan baik sehingga mampu untuk menjalankan roda Pendidikan SMP terpadu Bustanul Arifin. Dan sudah baik dalam meningkatkan mutu sekolah.

Pengelolaan sumber-sumber dana Pembiayaan pendidikan harus ditata dengan baik bagaimana penggunaannya, karena sumber dana yang diperoleh SMP Bustanul Arifin bukan hanya dari APBN/APBD namun ada juga dana yang diperoleh dari donator sekolah. Pengelolaan sumber-sumber dana harus dikelola dengan baik agar program yang dibuat untuk menunjang mutu sekolah dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti penelitian Ahmad Ridwan yang mengatakan bahwa “agar tertata dengan baik penggunaan biaya pendidikan harus dipersiapkan dengan baik”.

Mulyasa menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran.

---

<sup>86</sup> Ahmad Ridwan. *Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan MedanJohor*. 2022 Vol.4 No 1, h.

Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah yang diperoleh dari sumber-sumber dana perlu dilakukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

### **Penerimaan**

Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan kepada sekolah dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedang berjalan. Pembiayaan pendidikan tidak akan terlepas dari sumber dan penggunaan dana pendidikan. Sumber pendidikan telah diatur dalam UU No. 20, 2003 pasal 47 yang bersumber dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan mendapat alokasi dana 20% dari APBN dan APBD. Penggunaan dana pendidikan juga telah diatur dalam UU No.20, 2003 pasal 48 dan 49 tentang pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang juga didapatkan dari APBN dan APBD.<sup>87</sup>

Belanja daerah yang tercantum didalamnya Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pada era otonomi daerah saat ini, keadaan tersebut belum banyak mengalami perubahan. Sebagian besar dana dalam RAPBD provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk sebagian ditambah lagi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaannya hanya terletak pada tanggung jawab pengalokasiannya yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Walaupun

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

demikian terdapat pengecualian bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara mendapatkan bagian dalam proporsi tertentu dari keuntungan yang diperoleh dengan mengacu pada UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Pembiayaan Pusat dan Daerah. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam termasuk Aceh tidak hanya mengandalkan pendapatannya pada PADS dan DAU, melainkan juga dari bagi hasil tersebut. Diketahui Aceh memiliki sumber daya yang tinggi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan dari bagi hasil diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kemudian sebagian didistribusikan lagi ke tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formula tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sector pendidikan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa alokasi dana pendidikan akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sector pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada era sentralisasi sebelumnya, sebagian besar dana pendidikan yang ada pada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal dari pemerintah pusat, sementara untuk pemerintah daerah akan mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Hanya sebagian kecil dana pendidikan di daerah yang berasal dari anggaran daerah lebih banyaknya berasal dari pusat, sebagaimana

sebelumnya telah dinyatakan daerah pengecualian yang memiliki pendapatan sumber daya alam yang tinggi. Aceh termasuk salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, dengan tingginya sumber daya alam maka semakin tinggi juga penghasilan daerah yang diterima jadi dapat meningkatkan dana pendidikan walaupun hanya bagi dua hasil yang setengahnya lagi disetor ke pemerintah pusat untuk disalurkan secara merata sesuai dengan keperluan .<sup>88</sup>

Penerapan pembiayaan daerah berdampak pada sekolah-sekolah yang negeri di daerah, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk mencukupi beberapa kebutuhan-kebutuhan di sekolah di antaranya yaitu menambah kesejahteraan guru seperti memberikan Gaji yang dikeluarkan dari dana BOS dan juga segala hal-hal yang tidak ada kaitanya langsung dengan peningkatan mutu sekolah. Untuk penggunaan dana pendidikan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pendapatan daerah harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan selain dana yang diperoleh dari anggaran pusat, ada juga pemungutan wajib dana dari orang tua siswa setiap bulannya namun ada juga kewajiban dari orang tua yang harus dibayar sekali dalam setahun seperti dana kesehatan dan dana kegiatan tahunan. Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat (orang tua siswa) saat ini dikelola oleh bendahara yayasan.

---

<sup>88</sup> AFANDI, Afandi. *PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara)*. Jurnal Al-Ibroh, 2016, 1.1, h. 96-119.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56, Komite sekolah dimaknai sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>89</sup> Pengertian tersebut, sangat jelas bahwa Komite Sekolah memiliki peran dan kedudukan yang sangat urgen dalam menentukan kualitas penyelenggaraan sebuah sekolah.

Namun untuk iuran wajib (SPP) Peserta didik pada saat ini dikelola oleh bendahara sekolah. Dana tersebut akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, peserta didik dan juga meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Sehingga dengan demikian diharapkan akan meningkatkan mutu sekolah peserta didik dan meningkatkan kualitasnya.

Bagi lembaga pendidikan bersifat swasta atau mandiri dalam pengelolaan biaya, sumber pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak sekolah yang diatur peruntukannya dalam merealisasikan RAPBS sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan. Maka pembiayaan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain.<sup>90</sup> Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di sekolah/ madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>89</sup> Salinan *UU Nomor 20 Tahun 2003*, Pasal 56, h. 26.

<sup>90</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004, h.

Kemudian ada juga dana yang diperoleh dari yayasan yang digunakan sebagai penunjang peningkatan mutu sekolah terutama pemenuhan kebutuhan peserta didik dan juga kesejahteraan anggota warga sekolah. Karena sebelum berdirinya sebuah yayasan harus terlebih dahulu memenuhi syarat material yang tertuang pada UU No 16 tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004. Adapun syarat material yang dimaksudkan adalah adanya pemisahan terhadap kekayaan. Kekayaan yang harus dipisahkan menjadi bentuk uang dan barang. Syarat yang kedua yaitu adanya suatu tujuan yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Dan syarat material yang terakhir berdirinya suatu yayasan yaitu adanya suatu organisasi yang terdiri dari pengawas, pembina, dan pengurus.

Adapun anggaran yang termuat pada akta diantaranya mencakup kekayaan yang dipisahkan, nama yayasan, tempat yayasan akan didirikan, tujuan didirikannya yayasan tersebut, susunan kepengurusan pada yayasan dan bagaimana cara pembubaran dan juga cara yang akan digunakan terhadap sisa kekayaan dari yayasan jika telah dibubarkan.

Sama dengan pernyataan Ahmad Ridwan yaitu Yayasan mempunyai peran yang sangat penting untuk proses kehidupan warga sekolah yaitu membantu warga sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Sebuah yayasan diperbolehkan untuk mendapatkan laba dengan cara melakukan berbagai

usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi pendiri yayasan tersebut.<sup>91</sup>

Sumber pembiayaan bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, dan juga usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bagi sekolah swasta/agama contohnya pesantren biaya dapat berasal dari pungutan.<sup>92</sup>

### **Pengeluaran**

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari pemerintah pusat. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai per undang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

---

<sup>91</sup> Ridwan Ahmad, 2022. Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4 Nomor 1, h. 7.

<sup>92</sup> Rifqi, A. 2014. *Strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber pembiayaan mandiri di pondok pesantren*, 24 (4), h. 325.

## **Dana BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. 4 Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa. Berikut ini merupakan pengeluaran dari dana BOS Bustanul arifin.

### **1. Pengembangan Standar Isi**

Pengeluaran pada standar isi meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 700.000,- Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran sebesar Rp. 700.000,-

### **2. Pengembangan Standar Proses**

Pelaksanaan kegiatan asesmen/Evaluasi pembelajaran dikeluarkan dana sebesar Rp3.495.000,- dengan digunakan pada 3 tahap (tahap 1 Rp. 900.000,-, Tahap 2 Rp. 995.000,- Tahap 3 Rp 1.600.000,-), kemudian juga ada pengeluaran dana pada pelaksanaan evaluasi pembelajrana semua mapel/guru di sekolah sebesar Rp 2.500.000,-. Pelaksanaan Administrasi sekolah sebesar Rp. 995.000,-. Pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar yaitu pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris dikeluarkan dana sebesar Rp. 995.000,-.

### **3. Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan**

Pada pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan dikeluarkan dana pada pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp 1.400.000,- Pelaksanaan Supervisi pembelajaran semua mapael/guru di sekolah sebesar Rp. 1.400.000,-.

### **4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah**

Pada pengembangan sarana dan prasarana SMP Terpadu Bustanul Arifin terdapat pengeluaran dana pada kegiatan pengembangan perpustakaan sebesar Rp 15.235.000,-, pada pengadaan buku pelajaran pokok atau buku

teks utama peserta didik sebesar Rp. 15.235.000,- pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp.33.630.000,-, Pengadaan meubelair ruang computer sebesar Rp.5.300,000,- pengadaan peralatan kantor sebesar Rp.8.400.000,- pengeluaran pada pemeliharaan bangunan sekolah sebesar Rp. 19.930.000,-, pengeluaran pada penyediaan alat multi media pembelejaraan sebesar Rp. 4.900.000,-, dan pemeliharaan lapotop sebesar Rp. 4.900.000,-.

#### **5.Pengembangan standar pengelolaan**

Pada pengembangan standar pengelolaan terdapat pengeluaran pada kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 6.890.000,-, pada pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru sebesar Rp. 6.890.000,-, pada kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp.44. 434.400,- pada pendataan dapodik terdapat pengeluaran sebesar Rp.18.000.000,- pada penyusunan laporan Rp 7.080.000,- Konsumsi tamu sebesar Rp 840.000,- pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) yaitu sebesar Rp. 11.314.000,- kemudian terdapat juga pengeluaran untuk transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten Kota sebesar Rp. 7.200.000,- . pembiayaan langganan daya dan jasa sebesar Rp. 7.725.600,- dan pembayaran langganan internet adalah sebesar 7.725.600,-

#### **6.Pengembangan standar pembiayaan**

Pada pengembangan standar pembiayaan dikeluarkan dana untuk pelaksanaa Administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 600.000,- biaya

transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos sebesar Rp.600.000. – pembayaran honor sebesar 262.800.000,- untuk pembayaran Honor guru sebesar Rp. 180.000.000,- untuk pembayaran honor tenaga Administrasi sebesar Rp. 28.800.000,- untuk pembayaran honor pegawai perpustakaan sebesar Rp. 18.000.000,-

### **7. Pengembangan dan implementasi system penilaian**

Pada standar pengembangan terdapat pengeluaran dana pada kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajarn dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 83.190.000,- terdapat juga pengeliiaran pada kegiatan pengayaan sebesar Rp 24.650.000,- pada pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran sebesar Rp.50.650.000,- pada penyusunan soal penilaian/ulangan akhir semester sebesar Rp.16.200.000,- pelaksanaan Ulangan tengah semester sebesar 3.600.000,- pelaksanaan ulangan akhir semester sebesar Rp 30.850.000,- Pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 7.890.000,- dan pengeluaran pada kegiatan pelatihan sebesar 7.890.000,-.

### **3. Akuntabilitas Pembiayaan sekolah yang terdapat di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

Akuntabilitas pembiayaan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas, pembiayaan, ketaatan serta ungkapan yang sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku/berjalan.<sup>93</sup> Akuntabilitas laporan pembiayaan akan tercapai jika memenuhi karakteristik kualitatif informasi pembiayaan (Ikatan

---

<sup>93</sup> Idawati, W., & Eleonora, L. . Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pembiayaan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Pembiayaan. *Equity*, 22(2),2020, h. 153.

Akuntan Indonesia, 2016) yaitu:

- a. Relevan yang artinya ialah informasi yang telah disajikan di dalam laporan pembiayaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para penggunanya, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembiayaan masa lalu sekaligus memprediksi kinerja pembiayaan pada masa yang akan datang.
- b. Andal artinya informasi yang tercantum pada laporan pembiayaan bebas dari kesalahan material, jujur dan dapat diverifikasi.
- c. Dapat diperbandingkan yang dimaksudkan ialah informasi laporan pembiayaan dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya sekaligus juga dapat diperbandingkan dengan institusi sejenisnya.
- d. Dapat dipahami yaitu laporan pembiayaan yang buat harus mudah dipahami oleh pengguna dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan asumsi pengguna memiliki pengetahuan yang memadai juga mau mempelajari informasi pembiayaan institusi yang bersangkutan.<sup>94</sup>

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah bagian dari fungsi dasar manajemen. Dalam tata kelola organisasi yang baik, pengawasan merupakan kegiatan yang penting agar penyelenggaraan organisasi pendidikan utamanya dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

---

<sup>94</sup> Nazaruddin, Ietje . . *Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembiayaan Sekolah*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, h. 51.

SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah menggunakan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat artinya pengawasan dari atasan langsung. Terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi langsung pada tingkat tertentu dan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh pengawasan.

SMP Terpadu Bustanul Arifin juga menerapkan pengawasan dalam beberapa kegiatan atau proses penting dalam pembiayaan. Sebagaimana pemaparan diatas, sistem pengawasan yang digunakan adalah sistem pengawasan melekat. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan langsung oleh jajaran yayasan.

Pelaksanaan pengawasan melekat juga dapat dilakukan melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pula, pencatatan hasil kerja laporan yang merupakan alat bagi atasan atau dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusun pertanggungjawaban, dan pembinaan pengurus yang terus menerus agar menjadi pengurus yang mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengawasan. Adapun faktor penghambat proses pengawasan kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah seperti yang telah di jelaskan sebelumnya adalah Keterlambatan dari pihak bendahara sekola dalam memberikan data atau laporan keatasan, sehingga proses pengawasan tertunda dan terhambatnya jalan proses yang lain. Sedangkan faktor pendukung dalam proses pengawasan ini adalah penggunaan aplikasi pembiayaan dengan adanya aplikasi tersebut dapat

mempermudah dalam melakukan pendataan terkait pembiayaan atau biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah.

### **Evaluasi**

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan proses mengevaluasi rangkaian proses pembiayaan pendidikan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pembiayaan pendidikan.<sup>95</sup> Dalam pelaksanaannya, Kepala sekolah dan Bendahara juga melaksanakan proses evaluasi dalam beberapa aspek seperti kinerja staf, time line penyelesaian laporan, tunggakan santri dan evaluasi terhadap akurasi antara data manual dan data IT.

Evaluasi pembiayaan pendidikan juga dikategorikan sebagai proses pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pembiayaan pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diterapkan, yaitu Kepala sekolah bendahara dan seluruh dewan guru SMP Terpadu Bustanul Arifin mengadakan rapat koordinasi setiap akhir bulan.

Yang berwenang dalam melakukan evaluasi yaitu jajaran yayasan, untuk di sekolah yang berwenang mengevaluasi adalah kepala sekolah. selain itu evaluasi juga bisa dilakukan oleh atau pihak dari luar lembaga pendidikan, misalnya Inspektorat Jendral Kemendikbud, Badan Pemeriksa Pembiayaan (BPK), Badan Pengawas Pembiayaan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan dari pihak luar biasa disebut dengan Audit. Audit juga dilakukan dalam evaluasi pengalokasian dana BOS yang telah disalurkan ke SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah

---

<sup>95</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya.*( Jakarta: Rajawali Press: 2020), h. 51.

Terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam proses evaluasi. Adapun faktor yang menghambat proses evaluasi adalah adanya keterlambatan dari pihak Bendahara sekolah dalam memberikan data atau laporan kepada Kepala Sekolah, sehingga proses evaluasi bisa tertunda dan menghambat berjalannya proses pelaporan. Sedangkan faktor pendukung proses evaluasi adalah penggunaan aplikasi pembiayaan yang mana aplikasi ini dapat mempermudah pengurus dalam melakukan evaluasi terkait pembiayaan atau biaya-biaya yang dikelola oleh Bendahara.

## **PELAPORAN**

Laporan pembiayaan merupakan representasi posisi pembiayaan dari transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam hal ini lembaga pendidikan. Tujuan umum pelaporan pembiayaan adalah memberikan informasi mengenai posisi pembiayaan, kinerja dan arus kas lembaga pendidikan yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh lembaga pendidikan dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.<sup>96</sup> Hal ini sesuai dengan penerapan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah yang menggunakan sistem pelaporan berjenjang yaitu Bendahara memberi laporan kepada Kepala Sekolah, dan sampai ke ketua yayasan. Dan juga Bendahara memberikan laporan ke bagian pembiayaan Dinas Pendidikan terkait penyaluran dana BOS.

Laporan pembiayaan merupakan salah satu hasil dari aktifitas pertanggungjawaban dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang

---

<sup>96</sup> Bastian, Indra. . *AKuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta . Erlangga: 2020, h.

disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait.<sup>97</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka Bendahara SMP Terpadu Bustanul Arifin dalam penerapannya menyajikan laporan pembiayaan kepada Kepala Sekolah dan diteruskan ke ketua yayasan. juga kebagian dinas pendidikan

Laporan yang disajikan merupakan neraca akhir bulan yang berfungsi untuk mengetahui posisi saldo pembiayaan. Kemudian laporan yang disampaikan ke dinas pendidikan terkait penyaluran dana BOS. Hal ini sesuai dengan penjelasan Indra Bastian bahwa jenis laporan pembiayaan sektor publik yang minimal dan terintegrasi salah satunya meliputi Laporan Posisi Pembiayaan atau Neraca.<sup>98</sup> Laporan Posisi Kenangan atau Neraca adalah bagian dari laporan pembiayaan yang menyajikan posisi aktiva, utang dan modal yang dihasilkan selama periode tertentu.

Pelaporan yang dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun di SMP Terpadu Bustanul Arifin tidak hanya berupa laporan tertulis. Namun juga berupa pelaporan berupa pemaparan secara langsung oleh para Kepala sekolah dilakukan secara langsung dihadapan Ketua Yayasan dan jajaran pengurus yayasan lainnya dalam forum pengurus yayasan yang biasa dilaksanakan pada akhir tahun.

Pada proses pelaporan juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat Penggunaan sistem pendataan pembiayaan dengan sistem aplikasi pembiayaan menjadi faktor pendukung dalam proses pelaporan. Dengan

---

<sup>97</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya.*( Jakarta: Rajawali Press: 2020), h. 51.

<sup>98</sup>Bastian, Indra. . *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta . Erlangga: 2022, h. 69.

menggunakan aplikasi pembiayaan tersebut, proses pencatatan dan pembukuan pembiayaan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga hal ini juga memudahkan proses pelaporan. Sedangkan faktor penghambat proses pelaporan adalah adanya keterlambatan data dari masing-masing sekolah sehingga proses pelaporan yang diterapkan dengan sistem berjenjang juga terhambat. Tentunya setiap laporan yang dilakukan oleh bendahara sekolah tergantung pada laporan dari staf atau pihak yang menjalankan kegiatan atau program sekolah. Apabila data dari masing-masing penanggungjawab kegiatan terhambat, maka juga akan mempengaruhi proses pelaporan bendahara sekolah. SMP Terpadu Bustanul Arifin telah menerapkan proses pelaporan dalam proses pengelolaan pembiayaan. Dari segi penerapan juga telah sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku seperti sistem pelaporan yang digunakan, penyajian laporann, tujuan adanya pelaporan dan lain sebagainya

Sekolah Terpadu seiring dengan perkembangan zaman dihadapkan pada suatu kompetisi yang tidak terelakkan. Jika dulunya Sekolah Terpadu merupakan satu-satunya alternatif pendidikan islam di Indonesia, maka hari ini sekolah terpadu dituntut untuk dapat bersaing dengan berbagai macam lembaga pendidikan yang menawarkan dan menjanjikan sesuatu yang dibutuhkan atau bahkan dapat melebihi kebutuhan pasar global.

Untuk itu Sekolah terpadu harus berbenah diri dan mengambil langkah antisipatif. Sistem manajemen Sekolah Terpadu seyogyanya ini berbenah ke arah manajemen modern yang lebih mengedepankan kualitas atau mutu serta kepuasan pelanggan. Berbicara tentang kualitas atau mutu, maka tidak akan jauh dari

standar mutu. Dalam hal ini Sekolah terpadu membutuhkan standar mutu sebagai titik acuan minimal dalam melakukan langkah-langkah pengembangan sekolah dapat mengembangkan dan menetapkan sendiri standar mutu, namun terdapat standar minimal yang telah ditetapkan sebagai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang salah satu butirnya adalah Standar Pembiayaan.

Standar Pembiayaan sebagaimana telah ditetapkan meliputi biaya operasi, biaya investasi dan biaya personal. Agar dapat mendukung upaya peningkatan mutu, maka biaya yang ada di SMP Terpadu Bustanul Arifin harus dikelola dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, manajemen biaya di Sekolah menjadi penting. Selain karena Standar Pembiayaan merupakan salah satu standar dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang harus dipenuhi sebagai standar acuan minimal pentingnya pembiayaan juga yang harus dikelola dalam rangka merencanakan anggaran atau biaya untuk melakukan pengembangan-pengembangan sekolah sebagai upaya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

SMP Terpadu Bustanul Arifin tidak menafikan fungsi dari pembiayaan itu sendiri dalam upaya peningkatan mutu sekolah sekolah. Manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting, karena setiap kegiatan atau program sekolah yang mengarah pada pengembangan guna peningkatan mutu sekolah sekolah pasti membutuhkan biaya. Diantara program atau kegiatan sebagai upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh SMP Terpadu Bustanul Arifin membutuhkan fungsi manajemen pembiayaan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bendahara sekolah. Paling tidak ada tiga hal yang perlu dilakukan SMP Bustanul Arifin dalam

manajemen pembiayaan tersebut, yakni:

Pertama, perencanaan yang meliputi tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan, dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Kedua, pelaksanaan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran.

Ketiga, evaluasi dan pertanggungjawaban. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia.

Dari segi manajemen pembiayaan, SMP Terpadu Bustanul Arifin telah menerapkan teori tersebut diatas. Inti dari tugas dan tanggungjawab bendahara sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah sekolah adalah mendiskusikan, mempertimbangkan dan mensinkronkan biaya yang diajukan oleh ketua bagian yang memiliki kegiatan dan program tertentu. Maka dari itu, manajemen pembiayaan diperhitungkan agar bagaimana suatu program atau kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan tetap dapat merealisasikan kegiatan atau program dayah yang lainnya. Jadi bagaimana manajemen pembiayaan yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab Bendahara dan kepala sekolah juga dapat mempengaruhi dan berimplikasi pada upaya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen pembiayaan memiliki implikasi dalam upaya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin melalui dua hal:

- b. Baiknya kinerja dan tata kelola administrasi Pembiayaan meliputi proses penganggaran pelaksanaan dan evaluasi sehingga nantinya dapat memenuhi kriteria atau acuan minimal yaitu Standar Pembiayaan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. Kemampuan Pembiayaan dalam mengelola pembiayaan sehingga dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan pengembangan yang direncanakan sebagai upaya peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

### **Mutu Layanan Pendidikan SMP Terpadu Bustanul Arifin**

Mutu layanan pendidikan sekolah sangat berperan penting bagi pemerintah dan warga masyarakat. Berbagai upaya telah dijalani untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan sekolah, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi pendidik dan peningkatan kompetensi pada tenaga kependidikan, pengadaan bahan baca, perbaikan sarana prasarana. Akan tetapi peningkatan kualitas layanan pendidikan sekolah belum memperlihatkan hasil yang jelas.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh terhadap produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan yang diinginkan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Fandy, Tjiptono. *Total Quality Management*. (Edisi Pertama. Andi Offset. Yogyakarta. 2003), h. 202

<sup>99</sup> Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. (Salemba Empat. Jakarta, 2003), h. 83

Sedangkan definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain.<sup>100</sup> Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Dari pengertian tersebut kualitas pelayanan dapat diartikan suatu tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian sesuatu harapan konsumen yang diinginkan, sehingga dapat tercapai hal yang di inginkan.

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu bentuk proses aktivitas dimana ada yang dilayani dan ada yang melayani dan artinya ada harapan terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan/diperlukan

Kualitas pelayanan (service quality) tidak bisa lepas dari karakteristik mutu sekolah.<sup>101</sup>

- a. Kinerja (perform) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah meliputi: kinerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif.
- b. Waktu wajar (timelines) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.

---

<sup>100</sup> Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. (Salemba Empat. Jakarta, 2003), h. 83

<sup>101</sup> Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 411.

- c. Handal (reliability) yakni usia pelayanan yang mampu bertahan lama dalam kondisi apapun. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- d. Daya tahan (durability) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, seperti pada saat kondisi covid 19, sekolah terus berusaha memberikan pelayanan dengan metode daring.
- e. Indah (aesthetics) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik, sehingga dapat menebarkan energi positif.
- f. Hubungan manusiawi (personal interface) yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.
- g. Mudah penggunaannya (easy of use) yakni sarana dan prasarana digunakan sebagaimana mestinya dengan rencana yang telah ditetapkan. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah didapatkan kemudian dipinjam dan di kembalikan tepat waktu, penggunaan infokus sebagai bahan ajar, dan modul-modul yang lainnya.
- h. Bentuk khusus (feature) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi). Contohnya di SMP Bustanul Arifin keunggulannya adalah berbahasa inggris dan Arab secara aktif.

SMP Bustanul Arifin keunggulannya adalah berbahasa Inggris dan Arab secara aktif.

- i. Standar tertentu (conformance to specification) yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
- j. Konsistensi (consistency) yakni kejelasan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
- k. Seragam (uniformity) yakni tanpa variasi/tanpa perbedaan, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam dan berpakaian.
- l. Mampu melayani (service ability) yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas.
- m. Ketepatan (accuracy) yakni ketepatan dalam pelayanan misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

Seiring dengan adanya tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu, bersamaan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari dalam perkembangan kehidupan saat ini. Pada saat ini juga perkembangan zaman menjadi tantangan besar bagi para warga sekolah, dimana rasa ingin tahu dan rasa semangat belajar harus ditingkatkan.

Untuk itu, tugas lembaga pendidikan untuk mengupayakan peningkatan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan, antara lain dapat dicapai melalui peningkatan mutu sekolah. Namun, tanggung jawab ini bukanlah monopoli satuan pendidikan saja, bahwa mutu pelayanan publik saat ini juga berada pada fase rendah, untuk itu pendidikan sebagai salah satu sektor pelayanan publik dituntut untuk tampil mengatasi hal ini, untuk menjawab hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan uraian di atas, standar mutu sekolah secara nasional sangat dibutuhkan untuk menjadi kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup:

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Kompetensi lulusan
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian pendidikan

Namun, dari kedelapan standar tersebut ternyata tidak seluruh komponen standar berpengaruh signifikan, bahwa 85% dari masalah-masalah mutu terletak pada manajemen (pengelolaan), dan selebihnya disebabkan oleh pekerja.

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada hakikatnya pendidikan yang bermutu akan diperoleh dari lembaga pendidikan yang bermutu, dan lembaga pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan dengan menggunakan multi pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu bentuk manajemen yang berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa diadopsi dalam dunia pendidikan adalah Total Quality Management(TQM).

Untuk pengembangan manajemen mutu terpadu, usaha pendidikan Islam adalah memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila pelanggan telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan oleh produsen/institusi pendidikan.

- a. Setiap yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (primary external customers). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut.
- b. Para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary externalcustomers).
- c. Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external customers).

- d. Dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers).

Untuk mengaplikasikan konsep TQM ke dalam pendidikan Islam, perlu kita meminjam prinsip-prinsip pencapaian mutu. *Total Quality Management* atau TQM adalah proses yang berorientasi pada konsumen dan bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis secara berkelanjutan. Konsep tersebut memastikan semua departemen atau karyawan saling bekerjasama dalam peningkatan kualitas peserta didik dan juga lulusan SMP Terpadu Bustanul Arifin. Termasuk di dalamnya juga proses produksi dan memberikan layanan terbaik. Edward Deming, menjabarkan tentang penerapan prinsip-prinsip TQM ke dalam pendidikan Islam:

1. Menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu perlu kesadaran, niat dan usaha yang sungguh-sungguh dari segenap warga yang terlibat di dalamnya. Mutu sekolah Islam dapat diukur dari pengakuan orang lain (siswa, sejawat dan masyarakat) bahwa pendidikan Islam tersebut benar-benar memberikan pengaruh positif bagi kemajuan personal, melahirkan temuan-temuan melalui riset yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat, bangsa dan dunia.
2. lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah yang secara keseluruhan memberikan kepuasan kepada masyarakat pelanggannya, artinya harapan dan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan jasa yang diberikan oleh lembaga tersebut. Kebutuhan pelanggan adalah berkembangnya SDM

yang bermutu dan tersedianya informasi, pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, karya lembaga pendidikan Islam tersebut. Bentuk kepuasan pelanggan misalnya para lulusannya merasakan manfaat pendidikannya dalam meniti karirnya di lapangan kerja. Selain itu di dalam pendidikan Islam tersebut terjadi proses belajar-mengajar yang teratur dan lancar, guru-gurunya produktif, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, dan lulusannya berprestasi cemerlang di masyarakat.

3. Perhatian lembaga pendidikan Islam selalu ditujukan pada kebutuhan dan harapan para pelanggan: siswa, masyarakat, industri, pemerintahan dan lainnya, sehingga mereka puas karenanya. Pendidikan Islam yang mampu memberikan kontribusi bagi tatanan kehidupan yang lebih luas. Pendidikan Islam mampu bersaing pada posisi-posisi strategis untuk membangun kualitas hidup manusia secara adil, setara dan bijaksana.
4. Pendidikan Islam yang bermutu tumbuh dan berkembang karena adanya modal kerjasama yang baik antar sesama unsur di dalamnya untuk mencapai mutu yang ditetapkan. Sebagai contoh kelompok pengajar bekerjasama menyusun strategi pembelajaran siswa secara efektif dan efisien. Jika hanya satu atau dua saja guru yang mengajar secara baik tidaklah cukup, karena tidak akan menjamin terjadinya mutu siswa yang baik. Untuk itu, maka harus semua guru menjadi pengajar yang baik. Sebaliknya, jika gurunya menjadi pengajar yang baik, maka siswanya haruslah ingin belajar secara efektif. Proses belajar mengajar tidak dapat dikatakan efektif dan efisien jika hanya sepihak, gurunya saja atau

siswanya saja yang baik. Interaksi yang baik antar sesama unsur dalam pendidikan Islam harus terjalin secara intensif, agar pencapaian mutu dapat berhasil sesuai harapan. Dalam upaya menggiatkan kerjasama antar unsur dalam pendidikan Islam tersebut perlu dibentuk “tim perbaikan mutu” yang diberi kewenangan untuk mencari upaya agar mutu sekolah Islam lebih baik. Untuk ini pelatihan kepada tim terutama tentang cara-cara bekerja sama yang efektif dan efisien dalam tim sangat diperlukan.

5. Diperlukan pimpinan yang mampu memotivasi, mengarahkan, dan mempermudah serta mempercepat proses perbaikan mutu. Pimpinan lembaga (kepala sekolah atau sekolah, wakil kepala sekolah, hingga kepala bagianbagian terkait) bertugas sebagai motivator dan fasilitator bagi orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya untuk mencapai mutu. Setiap atasan adalah pemimpin, sehingga ia haruslah memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan haruslah yang membuat orang kemudian merasa lebih berdaya, sehingga yang dipimpin mampu melaksanakan tugas pekerjaannya lebih baik dan hasil yang lebih baik pula.
6. Semua karya lembaga pendidikan Islam (pengajaran, penelitian, pengabdian, administrasi dan seterusnya) selalu diorientasikan pada mutu, karena setiap unsur yang ada di dalamnya telah berkomitmen kuat pada mutu. Akibat dari orientasi ini, maka semua karya yang tidak bermutu ditolak atau dihindari.

7. Adanya upaya perbaikan mutu lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Untuk itu standar mutu yang ditetapkan sebelumnya selalu dievaluasi dan diperbaiki sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
8. Segala keputusan untuk perbaikan mutu pelayanan pendidikan atau pengajaran selalau didasarkan data dan fakta untuk menghindari adanya kelemahan dan keraguan dalam pelaksanaannya.
9. Penyajian data dan fakta dapat ditunjang dengan berbagai alat dan teknik untuk perbaikan mutu yang bisa dianalisis dan disimpulkan, sehingga data yang diperoleh valid dan tidak ada kesesatan.
10. Hendaknya pekerjaan di lembaga pendidikan jangan dilihat sebagai pekerjaan rutin yang sama saja dari waktu ke waktu, karena bisa membosankan. Setiap kegiatan di lembaga tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, serta hasilnya dievaluasi dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Hendaknya tercipta kondisi pada setiap yang bekerja dilembaga tersebut untuk bersedia belajar sambil bekerja, dan sedapat mungkin diprogramkan baik belajar tentang materi, metode, prosedur dan lain-lain.
11. Dari waktu ke waktu prosedur kerja yang digunakan di lembaga pendidikan Islam perlu ditinjau apakah mendatangkan hasil yang diharapkan. Jika tidak maka prosedur tersebut perlu diubah dengan yang lebih baik.
12. Perlunya pengakuan dan penghargaan bagi yang telah berusaha memperbaiki mutu kerja dan hasilnya. Para guru dan karyawan

administrasi mencoba cara-cara kerja baru dan jika mereka berhasil diberikan pengakuan dan penghargaan.

13. Perbaikan prosedur antar fungsi di lembaga pendidikan Islam sebagai bentuk kerjasama harus dijalin hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang lebih penting satu unsur dari unsur yang lain dalam mencapai mutu sekolah Islam. Misalnya, tenaga administrasi sama pentingnya dengan tenaga pengajar, dan sebaliknya.

14. Tradisikan pertemuan antar pengajar dan siswa untuk mereview proses belajar-mengajar dalam rangka memperbaiki pengajaran yang bermutu. Pertemuan dengan orangtua siswa, pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan alumni, pemerintah daerah, pengusaha dan donatur lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan oleh penyelenggara lembaga pendidikan Islam. Pendek kata, hendaknya semua unsur yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan Islam dapat berpartisipasi ikut mengembangkan pendidikan Islam mencapai mutu yang baik.

Berdasarkan hal-hal di atas, tampak bahwa sebenarnya mutu sekolah Islam adalah merupakan akumulasi dari cerminan semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan Islam yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan Islam adalah suatu proses yang panjang, dan sistem yang berjalan secara padu. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa mutu terpadu.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Hari, Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu sekolah Melalui Implementasi KBK*, (Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005), h. 25.

#### **4.SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

##### **a. Profil Singkat Dayah Terpadu Bustanul Arifin**

Salah satu dayah yang dikelola oleh Bapak Yayasan Darul Muttaqin pimpinan Syarqawi Abd Shamad yang didirikan pada tanggal 3 Agustus 2000 adalah Dayah Bustanul Arifin. Bustanul Arifin Dayah awalnya hanya menawarkan pendidikan pada kitab-kitab klasik (nonformal), namun seiring berjalannya waktu dan menjawab tuntutan masyarakat, maka didirikanlah organisasi Bustanul Arifin Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dijalankan oleh Tgk. Saidi M. Nurdin, S.Pd, pada tahun 2001. Agar lulusan MTs Bustanul Arifin dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa berpindah sekolah dan Dayah, Dayah Bustanul Arifin juga mendirikan Madrasah Aliyah pada tahun 2004.

Pada tahun 2005, MTs dan MA mengalami perubahan nama menjadi SMP dan SMA Terpadu Bustanul Arifin sebagai bagian dari roda pendidikan. Dayah Bustanul Arifin mengajukan permohonan pendirian perguruan tinggi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2011 atas dorongan dan dukungan masyarakat Bener Meriah dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada tanggal 3 April 2013 Kementerian Agama RI menerima dan menugaskan dayah Bustanul Arifin untuk menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIT) Bustanul Arifin dengan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 779 Tahun 2013.

Dayah Bustanul Arifin awalnya hanya memiliki 1,5 hektar di Pondok Sayur (sekarang Kompleks Putri), yang saat itu masih menggabungkan kompleks

putra dan putri. Sudah tidak bisa lagi diintegrasikan menjadi satu dan sudah dipindahkan ke lokasi Bale Atu seluas 6,5 Ha, sekitar 5 km dari kompleks putri.

Tujuan kajian dan penelitian strategis Dayah Bustanul Arifin adalah untuk meningkatkan standar pendidikan baik di sana maupun di seluruh Dayah secara keseluruhan. Tiga (3) program unggulan yang ditawarkan Dayah Bustanul Arifin saat ini adalah takhassus polar turats, tahfidz al-qur'an, dan normal. Pada kenyataannya, setiap program memiliki keunggulan tersendiri yang bertujuan untuk menarik minat dan bakat siswa.

**b. Strategi Kepemimpinan Perempuan dan Kepemimpinan Laki-laki dalam Pengembangan SMP Terpadu Bustanul Arifin**

Strategi merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Strategi merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri juga harus punya strategi tapi dalam memimpin. Strategi kepemimpinan pendidikan merupakan kegiatan mengambil keputusan atau merancang tindakan-tindakan strategis untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>103</sup>

Strategi pada hakikatnya adalah tindakan tentang apa yang seharusnya dilakukan, bukan tindakan tentang apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dicapai, dan bukan apa yang dicapai.<sup>104</sup>

Strategi merupakan rencana jangka panjang yang dikembangkan secara

---

<sup>103</sup> Yulmawati, strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu sekolah SD Negeri 03 Sungayang, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Vol 1, N0.2, Juli-Desember 2016, h. 111-112

<sup>104</sup> Ibid..... h. 217-220

detail dalam bentuk taktik yang bersifat operasional disertai target dan langkah-langkah secara terukur. Ada beberapa tingkatan strategi bagi pemimpin sebuah lembaga organisasi<sup>105</sup>, yaitu :

a. Enterprise Strategy

Enterprise strategy adalah strategi perusahaan yang terkait dengan respons masyarakat. Menurut konsep ini, masyarakat adalah kelompok yang sulit dikontrol dan dikendalikan. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus untuk merespons dan mengendalikan masyarakat secara efektif. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Interaksi itu dilakukan dalam rangka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya bagi organisasi. Dalam praktiknya, strategi ini menekankan pada upaya meyakinkan masyarakat bahwa organisasi bersungguh-sungguh memperhatikan dan memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Corporate Strategy

Strategi ini dimaksudkan untuk mengefektifkan langkah pencapaian misi utama organisasi. Langkah awal adalah mencari jawaban yang benar tentang misi utama dan rencana besar organisasi. Pemimpin dan pengambil keputusan lembaga harus mampu memberikan jawaban yang benar, karena jika jawaban itu salah akan berpengaruh besar terhadap strategi lainnya dalam organisasi. Para pengambil keputusan bekerja keras bagaimana misi itu dapat dijalankan. Ini merupakan keputusan-keputusan strategis dan perencanaan strategis yang harus ditelaah secara cermat dan mendalam.

---

<sup>105</sup>Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), h. 219-220

c. Business Strategy

Strategi pada level ini diarahkan pada usaha merebut pangsa pasar. Bagaimana pemimpin menciptakan strategi pencitraan sehingga akan menarik perhatian dan simpati pangsa pasar. Semua dilakukan untuk memperoleh keunggulan dan penguasaan pasar.

d. Functional Strategy

Functional strategy merupakan strategi pendukung untuk memperkuat terlaksananya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu: (a) strategi functional ekonomi, merupakan strategi untuk menghidupkan fungsi-fungsi organisasi sehingga tumbuh menjadi satu kesatuan ekonomi yang sehat dan berdaya saing, (b) strategi functional manajemen, dimaksudkan untuk mengembangkan fungsi-fungsi planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing dan integrating, (c) strategi isu strategis, dimaksudkan untuk melakukan control lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Keempat strategi ini merupakan langkah dasar dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Strategi fungsional adalah strategi yang lebih bersifat teknis untuk merumuskan arahan, pedoman dan operasional.

- Pengembangan Pesantren dalam Meningkatkan Kualitas SDM Santri

Pengembangan pada sebuah lembaga pendidikan sangat membutuhkan manajemen yang bagus. Konsep manajemen pendidikan dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi. Menurut pendapat Akdon, pengembangan lembaga

pendidikan memerlukan seni dan ilmu tersendiri, dan yang paling memungkinkan adalah manajemen pendidikan. Hal ini karena pengelolaan lembaga pendidikan didalamnya berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.<sup>106</sup>

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan Kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.<sup>107</sup> Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia dikemukakan oleh Gouzali<sup>108</sup> bahwa Pengembangan SDM, merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Pengembangan SDM merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, termasuk ketertinggalan SDM serta keragaman SDM yang ada dalam organisasi. Mulyasa menjelaskan mutu secara umum dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.<sup>109</sup>

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan jika dikaitkan dengan

---

<sup>106</sup> Lailatussaadah, Pengembangan Bale Buet dalam Kepemimpinan Teungku Inong di Kecamatan Delima Pidie, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2016), h. 127.

<sup>107</sup> Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 13-14

<sup>108</sup> Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5

<sup>109</sup> 41Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 157

kepemimpinan kepala sekolah, terdapat sepuluh kunci sukses tersebut mencakup visi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberikan layanan terbaik, mengembangkan orang lain, membina rasa persatuan dan kesatuan, fokus pada peserta didik, manajemen yang mengutamakan praktek, menyesuaikan gaya kepemimpinan dan memanfaatkan kekuasaan keahlian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan di SMP Terpadu Bustanul Arifin telah dilakukan dengan baik sebagaimana telah diatur oleh SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah. Yang mana perencanaan tersebut diawali dengan melakukan rapat dengan Komite, seluruh dewan guru, bendahara, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Rapat tersebut dilakukan untuk merencanakan kegiatan unggulan/rutin tahunan yang harus dibuat, dan kegiatan penunjang lainnya dengan jumlah anggaran yang telah di plotkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh ketua panitia yang telah disusun sebelumnya dengan melibatkan beberapa guru dan peserta didik, yang kemudian akan diawasi oleh kepala sekolah mengenai pembukuan dan pelaksanaa kegiatan tersebut sehingga tidak ada miskomunikasi didalamnya.

Pengelolaan Sumber dana yang diperoleh SMP Bustanul Arifin Bener Meriah diperoleh dari anggarn Pusat yang disebut dengan dana BOS. Ada juga dana yang diperoleh dari orang tua siswa dan juga dana yayasan. Sumber dana yang diperoleh tersebut dikelola oleh bendahara sekolah, sehingga dana tersebut akan digunakan tepat sasaran. Dana yang didapat digunakan sebagai kesejahteraan warga sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana dan keperluan peserta didik sehingga dengan hal tersbut dapat memingkatkan mutu sekolah, dan menciptakan lulusan yang berprestasi dibidang agama dan bidang sosial. Adapun pengeluaran

dana yang dikeluarkan dari dan BOS yaitu untuk standar isi sebesar Rp.700.000,- kemudian untuk standar proses sebesar Rp. 3.495.000,-, pada pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dikeluarkan dana sebesar Rp. 1.400.000,-. Pada pengembangan sarana dan prasarana dikeluarkan dana sebesar Rp. 53.765.000,- pengeluaran pada pengembangan standar pengelolaan yaitu sebesar Rp.59.050.600,- pengeluaran pada standar pembiayaan sebesar Rp 263.400.000,-. Dan pengeluaran pada pengembangan dan implementasi sistem penilaian yaitu sebesar Rp. 83.190.000,-

Akuntabilitas Dana sekolah yang sudah dianggarkan sekolah untuk setiap kegiatan akan dialihkan kepada ketua panitia sebagai penanggungjawab, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya pada rencana yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Setelah kegiatan selesai penanggungjawab akan menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dana yang telah dialokasikan pihak sekolah bermanfaat langsung untuk peserta didik SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di SMP Terpadu Bustanul Arifin, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan

Sehubungan dengan manajemen pembiayaan, peneliti menyarankan agar dapat mempertahankan kinerja dan tata kelola administrasi yang sudah baik dan meningkatkannya sehingga bisa menjadi lebih baik serta dapat menunjang dan mendukung peningkatan mutu sekolah SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah, dan juga dapat menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah yang lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang berkaitan dan dapat berkontribusi dalam proses manajemen pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. *Pengertian Manajemen*. Nuevos Sistemas de Comunicación e Informació, 2021.
- Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remasa Rosda, 2015.
- Afandi, Afandi. 2016. Pendidikan Karakter (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara). *Jurnal Al-Ibroh*, 1.1: 96-119. 2019.
- Afiff, Samiyah. *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah*. 2016.
- Ahmad Ridwan. Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Jurnal pendidikan*. Vol.4 No 1. 2022
- Alfi Sahrin, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 13 Maret 2023
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta.) 2019.
- Crosby, Philip B), *Quality is free : The Art of Making Quality Certain*, New York : New American Library/ 1978
- David L., Goetsh dan Stanly B. Davis *Pengantra Manajemen Mutu 2*, Jakarta : PT Prenhalindo. 2005
- Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln. *Hanbook Of Qualitative*. 2009.
- Dokumen, SMP Terpadu Bustanl Arifin, 13 MarAet 2023
- Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000.
- Edwards Deming, W. *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology. 2012
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rusada Karya. 2004.
- Fandy, Tjiptono. *Total Quality Management*. Edisi Pertama. Andi Ofset. Yogyakarta. 2003.
- Fajar, Malik. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. LP3NI. Hal 37-45. 2015
- Feigenbaum, Armand V. . *Total Quality Control*. Trind Editions New York: McGraw Hill Inc. 2011

- Fine, Seymour H, *Social Marketing: Promotiing The Caouse Of Public and Nonprofit*. 2014
- Hanafiah, *Pengantar Statistika*. Thasis commons. 2020
- Hari, Suderadjat. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu sekolah Melalui Implementasi KBK*. Bandung : Cipta Lekas Garafika. 2005.
- Harjito, A.M. *Manajemen Pembiayaan sekolah*. Jogyakarta. Ekonisia. 2007.
- Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2018
- Haula Atina, Wawancara Pribadi, SMP Terpadu Bustanul Arifin, 14 Maret 2023
- Ida ,S. Manajemen pembiayaan sekolah. *jurnal manajemen pembiayaan*. Vol 2. No 3. 2018.
- Idawati, W., & Eleonora, L. Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pembiayaan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Pembiayaan. *Equity*, 22(2), 153. 2020.
- Imaduddin Zulhami. *Strategi Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Smp Muhammadiyah Al – Kautsar Program Khusus Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021.
- Jawahir Tanthowi. *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur'an..* 2010.
- Juran, J. M. and Frank M. Gyra. *Edisi 3. Quality Planning and Analysis*. Singapore: McGraw-Hill International Editions, 2004
- Margareta, Ririn Tius Eka. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Jurnal Manejemen Pendidikan*. Vol 2 no 2. 2017.
- Mesiono. *Manajemen dan Organisasi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi,( UI-Press: 2014)
- Moleong L.J. *Metodologi Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2011
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesioanl*, Bandung. Remaja Rosdakarya. 2005

- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Abdul Azis. 2017
- Nazaruddin, Ietje. *Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembiayaan Sekolah*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2020.
- Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda. 2009
- Nanang, Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda. 2016.
- Nurhayati, S. Peranan Manajemen Pembiayaan Dalam Suatu Sekolah. *Jbma*, IV(1). 2017.
- Observasi, SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah 13 Maret 2023
- Oemar Hamalik. *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bandung, Remaja Rosda karya: 2007
- Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta, 2003.
- Pujiati, Lilik. Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu sekolah SMA PGRI Sumberrejo Tahun 2016/2017
- Ridwan Ahmad.. Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juli 2022
- Rifqi, A. Strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber pembiayaan mandiri di pondok pesantren. *Jurnal* 24 (4) 325. 2014.
- Rindaningsih, I. *Buku Ajar Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. In *Buku Ajar Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. 2018.
- Ritonga, Zon Saroha. Perencanaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Mutu sekolah Di Smp Swasta Graha Kirana Medan, *Jurnal Equity in Education Journal (EEJ)*, Volume 2, Nomor 2, 77-87. 2020.
- Saidah, N. *Pengertian, Proses Administrasi Pembiayaan dan Pemeriksaan serta Pelaporan*. Universitas Negeri Padang. 2020.
- Solehan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal pendidikan Edumasul*. Vol 6 no 1. 2022.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol 2 No 1. 2021.

- Sudrajat. *Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah; Peningkatan mutu sekolah melalui Implementasi KBK*. Bandung: Cipta Lekas Grafik. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. 2007
- Sujana, I. W. C. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuanagn Sekolah Di Indonesia. Adi Widya: *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol 4. No1 2019.
- Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Sukardi. Kajian Pendidikan dan Ekonomi" . *Jurnal*. Vol. 2, No. 2 Juni 2019
- Ulpha Lisni Azhari, Dedy Achmad Kuriady. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah, *Jumal Administrasi Pendidikan* Vol XXIII (No 2 Tahun 2016), Universitas Pendidikan Indonesia.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Waruwu, Yaredi. 2022. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu sekolah. *Jurnal*. Vol. 5 No 3, 2022.
- Zamroni. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. Jakarta : PSAP Muhamadiyah, 2007.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 711 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE SEMESTER GANJIL  
BULAN SEPTEMBER TAHUN AKADEMIK 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

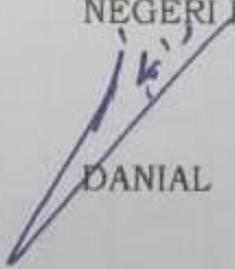
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Bimbingan Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, maka dianggap perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Semester Ganjil Bulan September Tahun Akademik 2022-2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pascasarjana Nomor: B-926/In.29/PPs/PP.00/09/2022 tanggal 15 September 2022 hal Permohonan Penerbitan SK Pembimbing Tesis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE SEMESTER GANJIL BULAN SEPTEMBER TAHUN AKADEMIK 2022-2023;
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Semester Ganjil Bulan September Tahun Akademik 2022-2023, dengan daftar nama Dosen Pembimbing Tesis dan Mahasiswanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Pembimbing Utama : Rp. 750.000,- /mhs
  - b. Pembimbing Pendamping : Rp. 650.000,- /mhs
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Petunjuk Operasional Pascasarjana yang tertuang dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 28 September 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
DANIAL

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	PRODI	TIM PEMBIMBING				JUDUL TESIS	KET
			NAMA DOSEN /NIP	GOL	JAFUNG	KEDUDUKAN DALAM TIM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Raudhatul Jannah NIM. 2021530069	MPI	1. Dr. M. Anggung Mardumunoso P, M.Pd. Nip. 198608132018011002 2. Khairiani, M.Sc., Ph.D Nip. 198011282008012023	III/c III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah dan Karakter Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MAN Inaan Cendikia Aceh Timur	
21	Paisal NIM. 2021530071	MPI	1. Dr. Muhammad Fadhli, M. Pd Nip. 198802012015031005 2. Khairiani, M.Sc., Ph.D Nip. 198011282008012023	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Status Akreditasi di MAN Aceh Utara	
22	Zainul Abidin NIM. 2021530080	MPI	1. Dr. Agus Salim Salabi, MA Nip. 197508232015031001 2. Dr. Fauzan Ahmad Siregar, M. Pd Nip. 198309102015031002	III/d III/c	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Benchmarking dalam Transformasi SD Muhammadiyah 6 Lhokseumawe Menjadi Sekolah Islam Terpadu	
23	Fakhriah NIM. 2021530089	MPI	1. Dr. Fauzan, MA Nip. 197410082005011004 2. Dr. Junat Barus, MS Nip. 197605242009121001	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Organisational Development PKDM Kutub Al Firdaus dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Terhadap Pendidikan Non Formal di Kota Lhokseumawe	
24	Niswatu Khaira NIM. 2021530076	MPI	1. Dr. Almuhajir, MA Nip. 197702052007011025 2. Dr. Darmadi, M. Si Nip. 197607082005011004	IV/a III/d	Lektor Kepala Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Pendidikan Keluarga dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SD IT Diana Assaffa Islamic	
25	Novi Hardiana Putri NIM. 2021530066	MPI	1. Dr. Fauzan Ahmad Siregar, M. Pd Nip. 198309102015031002 2. Dr. Rahim Zulmaka, M. Pd Nip. 198810242019032004	III/c III/c	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Brand Image dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan SD IT Diana Assaffa Islamic	
26	Cut Yenni Fuyanni NIM. 2021530052	MPI	1. Dr. Fauzan, MA Nip. 197410082005011004 2. Dr. Malahayatie, MA Nip. 197905182007102003	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Dampak Kompetensi Manajerial Berbasis Islam Terhadap Peningkatan Kinerja Organisasi di SD Negeri 2 Nisan Antara	
27	Maya Puspitawati NIM. 2021530087	MPI	1. Dr. M. Anggung Mardumunoso P, M.Pd. Nip. 198608132018011002 2. Khairiani, M.Sc., Ph.D Nip. 198011282008012023	III/c III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Pengaruh Program Life Skill dan Organisasi Kesiwaan Terhadap Pengembangan Karakter Peserta Didik Pada Madrasah Pengembangan Karakter Peserta Didik Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Aceh Timur	
28	Ira Gusriani NIM. 2021530081	MPI	1. Dr. Agus Salim Salabi, MA Nip. 197508232015031001 2. Dr. Yuliza, S. Ag., M. Si Nip. 197707122005012004	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Pada Era Digital di MAN Lhokseumawe	
29	Habibi NIM. 2021530058	MPI	1. Syahrizal, M. Ag., Ph. D Nip. 197608082007101003 2. Dr. Darmadi, M. Si Nip. 197607082005011004	IV/a III/d	Lektor Kepala Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Ekstrakurikuler Kepemimpinan dalam Meningkatkan Karakter Kepemimpinan Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum	
30	Kamalia Safrita NIM. 2021530048	MPI	1. Dr. Syarifah Ruzmah, S. Ag., M. Ag Nip. 197106202007012023 2. Dr. Junat Barus, MS Nip. 197605242009121001	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Perumusan Strategis Organisasi dengan Mengembangkan Profesionalisme Guru di Sekolah Islamic Center Lhokseumawe	
31	Taufikur Rahmi NIM. 2021530054	MPI	1. Syahrizal, M. Ag., Ph. D Nip. 197608082007101003 2. Dr. Darmadi, M. Si Nip. 197607082005011004	IV/a III/d	Lektor Kepala Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Kurikulum Tilawah Al Quran Bali Pendidikan Babussalam dalam Meningkatkan Kompetensi Qari di Kota Lhokseumawe	
32	Candra Ruzmat Sanjaya NIM. 2021530061	MPI	1. Dr. Almuhajir, MA Nip. 197702052007011025 2. Dr. Rahim Zulmaka, M. Pd Nip. 198810242019032004	IV/a III/c	Lektor Kepala Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kinerja Guru An - Nalin	
33	Eka Zahriana NIM. 2021530065	MPI	1. Dr. Nurhayati, MA Nip. 196312312006042114 2. M. Syahrizal Razali Ibrahim, MA, Ph.D Nip. 197601102006041002	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Raudhatul Athfal Yasnia)	
34	Muhammad Ihsan NIM. 2021530077	MPI	1. Dr. Sa'id Alwi, MA Nip. 197905152005011009 2. Dr. Malahayatie, MA Nip. 197905182007102003	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru Pesantren An - Nahla	
35	Elvi Marinda NIM. 2021530064	MPI	1. Dr. Almuhajir, MA Nip. 197702052007011025 2. Dr. Syarifah Rahmah, S. Ag., M. Ag Nip. 197106202007012023	IV/a III/d	Lektor Kepala Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Dampak Komite Sekolah dan Sertifikat Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Arun Kota Lhokseumawe	
36	Siti Ansyah NIM. 2021530034	MPI	1. Dr. Susi Yusriani, M. Pd Nip. 198204172009012010 2. Dr. Fauzan Ahmad Siregar, M. Pd Nip. 198309102015031002	III/d III/c	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Peran Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Kegiatan in House Training (IHT) Pada TK Islam Terpadu Ananda Kec. Wih. Pesam. Kab. Bener	
37	Sari Kartika NIM. 2021530046	MPI	1. Dr. Nurhayati, MA Nip. 196312312006042114 2. Dr. Fauzan Ahmad Siregar, M. Pd Nip. 198309102015031002	III/d III/c	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah Diniyah dan Sekolah Umum (Studi Multistep di Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah Darul Falah dari SDN	
38	Muspriah NIM. 2021530042	MPI	1. Dr. Sa'id Alwi, MA Nip. 197905152005011009 2. Dr. Malahayatie, MA Nip. 197905182007102003	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Madrasah dalam Meningkatkan Konsep Diri Siswa Broken Home Pada MTsN Khazranatul Hikmah di Kecamatan Bener Meriah	
39	Elisa Patra Dewi NIM. 2021530094	MPI	1. Dr. Agus Salim Salabi, MA Nip. 197508232015031001 2. Dr. Abdul Muqri, MA Nip. 197903062007101004	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Strategi Kepala Desa dalam Pembentukan Karakter Islami Pada Remaja di Desa Selisih Mara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	
40	Irena NIM. 2021530036	MPI	1. Dr. Muhammad Fadhli, M. Pd Nip. 198802012015031005 2. Dr. Zainuddin Hasibuan, MS Nip. 198303052011011012	III/d III/d	Lektor Lektor	Pembimbing I Pembimbing II	Manajemen Pembinaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE  
PASCASARJANA

Jln. Cempaka No.2 Lancang Garam, Kec Banda Sakti Lhokseumawe, Kode Pos 24351  
Website: <http://www.pps.stainmal.ac.id> E-Mail: sekretariat.pps.stainmal@gmail.com

Nomor : B - 256 /In.29/PPs/PP.00.9/02/2023  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

21 Februari 2023

Kepada

**Yth. Kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan rencana melaksanakan penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tersebut di bawah ini:

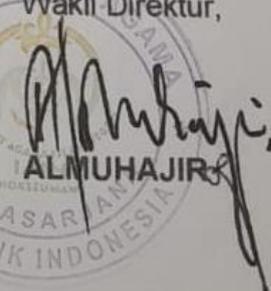
Nama : Isnaini  
NIM : 2021530036  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Judul Tesis : Manajemen Pembiayaan Pendidik Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.

Untuk keperluan tersebut di atas, maka dengan ini

1. Mohon izin mengadakan penelitian di wilayah kerja saudara.
2. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut, akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat mohon izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Wakil Direktur,  
  
ALMUHAJIR





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
DINAS PENDIDIKAN  
SMP TERPADU BUSTANUL ARIFIN

Desa Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Bener Meriah 24581



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 4212/084/SMPT Busfin/2023

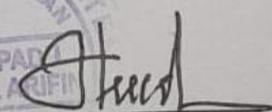
Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin Kecamatan Bukit dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : ISNAINI.S.Pd  
NIM : 2021530036  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Instansi : Pasca Sarjana IAIN Lhokseumawe

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN Lhokseumawe) Nomor : B-256/in.29/PPs.00.9/02/2023. Benar telah melakukan penelitian di SMP Terpadu Bustanul Arifin pada tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 guna melengkapi data pada penyusunan tesis yang berjudul " MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIK UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMP TERPADU BUSTANUL ARIFIN BENER MERIAH " .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Pondok Sayur, 30 Mei 2023  
Kepala SMP Terpadu Bustanul Arifin



HAULA ATINA, S.Pd.I



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama : ISNAINI  
 NIM : 20210530036  
 Judul : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Fadhli, M. Pd

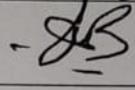
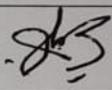
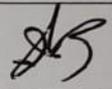
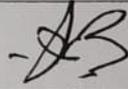
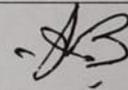
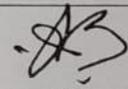
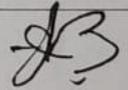
No	Tanggal/Hari	Uraian	Paraf Pembimbing
1	12-5-2023 JUMAT	Instrumen Penelitian	
2	16-5-2023 SELASA	Hasil Revisi	
3	19-5-2023 JUMAT	Pembahasan	
4	22-5-2023 SENIN	Transkrip Kumpiran	
5	24-5-2023 RABU	Abstrak	
6	26-5-2023 JUMAT	Kesimpulan & Saran	
7	18/7/23	Acc Sederajat Tesis	

Lhokseumawe, .....  
 Ka. Prodi .....

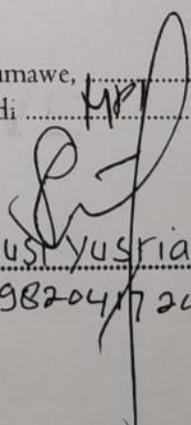
Dr. Susy Yustianti Spdi Mpd  
 NIP.

LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama : ISNAINI  
 NIM : 20210530036  
 Judul : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah  
 Pembimbing II : Dr. Zainuddin Hasibuan, MS

No	Tanggal/Hari	Uraian	Paraf Pembimbing
1	3-5-2023 RABU	- latar belakang penelitian	
2	3-5-2023 RABU	- Identifikasi Masalah	
3	9-5-2023 SELASA	- Rumusan Masalah	
4	12-5-2023 JUMAT	- Penelitian Terdahulu	
5	16-5-2023 SELASA	- Jenis dan Pendekatan Penelitian	
6	19-5-2023 JUMAT	- Analisis Data	
7	22-5-2023 SENIN	- Pembahasan hasil wawancara dengan rumusan masalah	
8	24-5-2023 RABU	- Simpulan hasil wawancara dengan rumusan masalah	
9	26-5-2023 JUMAT	- ABSTRAK final dan diperbaiki	
10	26-5-2023 JUMAT	- Daftar Rujukan dan perbaikan - ACR Seminar hasil	

Lhokseumawe, .....  
 Ka. Prodi .....

  
 Dr. Susyusrianti SPd MPd  
 NIP. 198204172009012010

Lampiran

**Lembar Instrumen Wawancara**

**Indicator (Perencanaan Anggaran RAPBS)**

<b>Peneliti</b>	:	1. Bagaimana sistem perencanaan pembiayaan di Sekolah?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Sistem perencanaan pembiayaan disekolah itu diawal tahun anggaran kepala sekolah mengadakan rapat bersama komite, bendahara dan seluruh dewan guru untuk membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Dalam rapat tersebut bendahara bersama dewan guru menentukan kegiatan yang di prioritaskan pada tahun yang akan dilaksanakan dan juga ada dalam petunjuk teknis BOS pada tahun berjalan, karena JUKNIS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ada perbedaan.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Kapan dilakukan perencanaan pembiayaan?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Perencanaan pembiayaan dilakukan pada awal tahun pembelajaran sesuai dengan rapat yang sudah dilaksanakan yang diikuti oleh komite bendahara dan seluruh tenaga pendidik disekolah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimana mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran?
<b>Bendahara:</b>	:	<i>Mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran yaitu dengan membuat dan menentukan skala prioritas seperti yang sudah ditentukan pada rapat awal tahun anggaran. Sehingga kegiatan yang unggul dapat berjalan sebagaimana mestinya.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah penyusunan anggaran memiliki skala prioritas?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Menentukan skala prioritas dengan menyesuaikan anggaran yang akan dikirim oleh pihak sekolah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah sekolah menginventarisir rencana yang akan dilaksanakan?
<b>Kepala</b>	:	<i>Semua rencana yang akan dilaksanakan diinventaris dan akan</i>

<b>sekolah</b>		<i>dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan terlebih dahulu</i>
<b>Peneliti</b>	:	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pembiayaan?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Dalam merencanakan pembiayaan, sekolah mengadakan rapat yang melibatkan komite, guru dan tenaga kependidikan.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimana proses perencanaan pembiayaan?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Proses perencanaan pembiayaan dibuat untuk mencapai rencana atau tujuan sekolah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apa bentuk dari hasil perencanaan pembiayaan?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Bentuk dari hasil perencanaan pembiayaan adalah lembar RAPBS, RAKS dalam satu tahun anggarannya didalamnya termuat rencana skala prioritas</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah sekolah menentukan program kerja?
<b>Kepala Sekolah</b>		<i>Sekolah membuat program kerja dalam satu tahun anggaran berjalan sehingga pada saat membuat perencanaan sudah terarah dengan baik</i>
		Apakah RAPBS dibahas bersama guru, komite, yayasan?
<b>Kepala Sekolah</b>		<i>Ya, setiap RAPBS dibahas bersama komite, guru dan tenaga kependidikan. Sebagai mana hal tersebut dilakukan diharapkan akan mendapatkan keputusan yang terbaik.</i>
		Dari manakah sumber anggaran dalam pengelolaan sekolah ini?
<b>Kepala Sekolah</b>		<i>Sumber dana yang diperoleh sekolah berasal dari dana BOS, dana dari orang tua siswa dan juga dari yayasan</i>
		Berapa besaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (BOS), PEMDA(BOP), dan Swadaya masyarakat?
<b>Bendahara</b>		<i>Jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebesar 465.000.000 dengan jumlah siswa 375</i>
		Siapa yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>RAPBS dibahas bersama komite, guru dan tenaga kependidikan</i>

<b>Peneliti</b>	:	Kegiatan apa saja yang dibiayai oleh BOS, BOP, dan Swadaya masyarakat?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Kegeiatan yang dibiayai oleh BOS yaitu kegiatan yang terdapat didalam juknis BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan semua kegiatan yang telah diprogramkan pada saat rapat perencanaan anggaran sekolah pada setahun berjalan</i>
<b>Bendahara</b>	:	<i>Terkadang ada kegiatan yang belum terdapat pada perencanaan awal tahun ajaran karena didalam pelaksanaan ternyata ada kegiatan yang harus dilaksanakan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah setiap kegiatan yang dibiayai oleh sekolah tercantum di dalam RAPBS?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Ya, setiap kegiatan yang tercantum dalam RAPBS dibiayai sekolah namun terkadang ada juga dana yang tak terduga sehingga seiring berjalannya kegiatan ada perubahan anggaran</i>
<b>Peneliti</b>	:	Kegiatan apa saja yang termuat di dalam RAPBS dan tidak diatur dalam juknis BOS dan BOP?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Kegiatan yang tidak diatur dalam juknis BOS dan BOP yaitu seperti Milad sekolah, wisuda, hari besar keagamaan, memperingati hari kemerdekaan.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Usaha apa saja yang dilakukan dalam penggunaan pembiayaan sekolah?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Tidak ada usaha yang dilakukan dengan menggunakan uang sekolah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimanan prosedur pengelolaan penerimaan pembiayaan sekolah?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Penerimaan dan pengeluaran uang sekolah dipertanggung jawabkan oleh bendaharan dan ketua panitia, apabila ada</i>

		<i>program yang dilaksanakan selain dari yang tercantum dalam rencana awal, maka semua keperluannya akan disesuaikan dalam proposal yang dibuat oleh panitia pelaksana</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimana pengalokasian sumber pembiayaan tersebut?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Sumber pembiayaan yang diperoleh akan dialokasikan pada program-program sekolah yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran pertahunnya</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Ada, dari sumbangan masyarakat/wali siswa yang digunakan untuk menunjang peningkatan mutu sekolah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Usaha apa yang dilakukan sekolah jika dana yang diperoleh kurang dari RAPBS?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Kami dari pihak sekolah berbicara dengan komite sekolah untuk mencari solusi atas kekurangan dana yang dibutuhkan, setelah ada kesepakatan dengan komite sekolah, pihak sekolah mengambil keputusan apakah mengambil dana dari wali murid atau mencari dari donator.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah pemanfaatan dana dibicarakan dengan komite?
<b>Kepala sekolah</b>	:	<i>Benar, semua pemanfaatan dana telah dibicarakan bersama komite, guru dan tenaga kependidikan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah pihak sekolah membentuk penanggungjawaban dalam setiap kegiatan program sekolah?
<b>Wakil Kepala sekolah</b>	:	<i>Benar, pihak sekolah membentuk penanggungjawab pada setiap kegiatan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Ketika dana ingin digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pencairan dana?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Waktu yang diperlukan sudah tercantumkan di dalam rencana kapan waktu kegiatan akan dilakukan, paling lambatnya 3 hari</i>

		<i>sebelum hari H kegiatan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Ketika dana dari pemerintah tidak mencukupi dalam pengelolaan pendidikan setiap tahunnya! Apakah kegiatan tetap dilaksanakan, dibatalkan atau melibatkan pihak ketiga?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Jika dana tidak cukup maka kegiatan akan ditunda terlebih dahulu. Sekolah akan melaksanakan kegiatan yang dianggap urgent/penting terlebih dahulu</i>
<b>Peneliti</b>	:	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Semua panitia bertanggungjawab namun dalam pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab ialah kepala sekolah dan pengawas.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimana proses pengawasan pengelolaan pembiayaan?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Akan diawasi mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajanaan. Harus ekonomis, efektif dan tranparan.</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apa saja yang diperhatikan dalam proses pengawasan?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Pembukuan, pembelanjaan yang harus efektif, ekonomis dan transparan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Berapa kali dilakukan pemeriksaan dalam satu priode pencairan dana dari pemerintah
<b>Bendahara</b>	:	<i>Dalam 1 tahun 3 kali pencairan, dengan pemeriksaan 1 kali</i>
<b>Peneliti</b>	:	Kepada siapa laporan pengawasan diberikan?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Laporan pengawasan diberikan kedinas, ke menejer bos, yang tembusannya ke pembiayaan sampai ke pemerintah pusat</i>
<b>Peneliti</b>	:	Dalam evaluasi anggaran, siapa saja komponen sekolah yang ikut terlibat?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Komite, guru, seluruh tenaga kependidikan</i>
<b>Peneliti</b>	:	Bagaimana proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran?
<b>Kepala</b>	:	<i>Ditinjau efektivitas anggaran yang telah disetujui bersama,</i>

<b>Sekolah</b>		<i>capaiannya dan manfaatnya</i>
<b>Peneliti</b>	:	Siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan pembiayaan setelah pelaksanaan kegiatan?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Masing-masing penanggungjawab kegiatan (stakeholder)</i>
<b>Peneliti</b>	:	Apakah dana yang tersisa dalam satu kali periode harus dikembalikan ke pemerintah atau ada opsi lain?
<b>Bendahara</b>	:	<i>Benar, harus dikembalikan ke pemerintah</i>
<b>Peneliti</b>	:	Berapa presentase keberhasilan dari pelaksanaan yang telah di susun?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>90%</i>
<b>Peneliti</b>	:	Kepada siapa pertanggungjawaban pembiayaan sekolah dilaporkan?
<b>Kepala Sekolah</b>	:	<i>Laporan pertanggungjawaban dilaporkan ke manajer bos tembusannya ke pembiayaan sampai ke pemerintah pusat.</i>

## Lembar Observasi

**Nama Sekolah : SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

**Asesor : Isnaini S.Pd**

### Perencanaan

<b>NO</b>	<b>Aspek yang Diobservasi dan Indikator</b>	<b>Jawaban</b>
1	Sistem perencanaan pembiayaan sekolah	Perencanaan sekolah dilakukan pada awal kegiatan yang bertujuan agar semua kegiatan yang akan dilakukan memiliki manfaat bagi siswa dan masyarakat
2	Waktu mebuatan perencanaan	Diawala pada awal tahun anggaran
3	Tujuan penyusunan anggaran	Agar semua kegiatan dapat tercover dengan baik dan tidak ada yang tertinggal
4	Yang terlibat dalam penyusunan anggaran	Komite, guru, tenaga kependidikan
5	Bentuk hasil perencanaan anggaran	RAPBS, RAKS
6	Program kerja sekolah	Milad Sekolah, wisuda, kegiatan keagamaan, hari kemerdekaan
7	Penyusunan RAPBS	Dirancang terlebih dahulu
8	Sumber anggaran pengelolaan sekolah	Sumber dana berasal dari pemerintah pusat, dari orang tua siswa dan donatut yayanan
9	Besaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (BOS), PEMDA (BOP), dan Swadaya masyarakat	Rp. 465.000.000,00
10	Keterlibatan dalam proses perencanaan	Merancang dan mengevaluasi

## Pelaksanaan

NO	Aspek yang Diobservasi dan Indikator	Jawaban
1	Usaha yang dilakukan dalam penggunaan pembiayaan sekolah	Tidak ada
2	Prosedur pengelolaan penerimaan pembiayaan Sekolah	Penerimaan dan pengeluaran uang sekolah dipertanggung jawabkan oleh ketua panitia program yang semua keperluannya sudah tercantum di dalam proposal yang dikumpulkan
3	Pengalokasian sumber pembiayaan	Sumber pembiayaan yang diperoleh akan dialokasikan pada program-program sekolah yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran pertahunnya
4	Donator lain (Masyarakat)	Ada
5	Usaha yang dilakukan sekolah dalam penggunaan anggaran	Tidak ada
6	Usaha yang dilakukan sekolah jika dana yang diperoleh kurang dari RAPBS	Mengumpulkan dana dari donator sekolah
7	Teknik penyaluran anggaran a. Jumlah anggaran b. Waktu pencairan	Setiap kegiatan memiliki proposal yang didalamnya sudah tercantum jumlah anggaran yang diperlukan sebelum dilaksanakannya kegiatan dana sudah dicairkan terlebih dahulu
8	Tindakan jika BOP atau BOS tidak mencukupi	

9	Tindak lanjut dalam kegiatan jika anggaran tidak mencukupi	Kegiatan akan ditunda
---	--	-----------------------

**Pengawasan :**

NO	Aspek yang Diobservasi dan Indikator	Jawaban
1	Yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan	Kepala sekolah
2	Proses pengawasan pengelolaan pembiayaan	Akan diawasi mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajanaan. Harus ekonomis, efektif dan tranparan
4	Yang diperhatikan dalam proses pengawasan	Pembukuan, pembelanjaan yang harus efektif, ekonomis dan transparan
5	Jadwal pemeriksaan dalam satu priode pencairan dana dari pemerintah	1 kali
6	Kepada siapa laopran pengawasan diberikan	Pemerintah

**Evaluasi dan Pertanggungjawaban**

NO	Aspek yang Diobservasi dan Indikator	Jawaban
1	Komponen sekolah yang terlibat dalam evaluasi anggaran	Tenaga kependidikan, komite dan guru
2	Proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran	Pengecekan proposal dan Lembar pertanggungjawabat
3	Yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan pembiayaan setelah pelaksanaan kegiatan	Ketua panitia (Stalkholder)
4	Opsi jika ada dana tersisa	Kegiatan akan ditunda

5	Presentase keberhasilan dari pelaksanaan yang telah di susun	90%
6	Pemberian Pertanggungjawaban pembiayaan sekolah	Pengawas

**Instrumen Studi Dokumentasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMP  
Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah**

No	Dokumen	Keterangan		Uraian
		Ada	Tidak Ada	
1	Kurikulum sekolah	V		SMP Bustanul Arifin sudah menggunakan kurikulum, setelah berubah dari kurikulum KTSP
2	Daftar program unggulan sekolah	V		SMP Terpadu Bustanul Arifin memiliki Kegiatan unggulan dibidang keagamaan dan dibidang sosial seperti aktif berbahasa arab dan berbahasa inggris.
3	Daftar program tahunan sekolah	V		Semua kegiatan selama satu tahun yang sedang berjalan sudah tertata didalam buku program tahunan. sebagaimana telah dirancang terlebih dahulu pada saat rapat bersama komite, seluruh dewan guru dan kepala sekolah.
4	Dokumen proposal melakukan kegiatan sekolah	V		Pada setiap kegiatan terdapat proposal yang berisikan tentang permohonan kegiatan dan juga jumlah anggaran yang diperlukan pada kegiatan.

5	Daftar hadir mengikuti perencanaan Anggaran sekolah	V		Pada saat mengikuti kegiatan merencanakan anggaran sekolah selalu ada daftar hadir yang menjadi bagiannya adalah komite, seluruh dewan guru, bendahara, wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah.
6	Dokumen RAPBS Sekolah	V		Berisikan tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Sekolah yang telah dirancang sebelumnya.
7	SK Pembagian tugas penyusunan RAPBS	V		Nama-nama yang diberikan tanggung jawab dalam penyusunan RAPBS, yang telah diberikan kepercayaan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan rapat yang telah dilakukan
8	Dokumen sumber pembiayaan sekolah	V		Berisikan mengenai dokumen sumber pembiayaan sekolah, karena dana yang dikelola sekolah ada yang berasal dari pusat, orang tua dan juga ada dari Yayasan
9	Dokumen Penghasilan dan pengeluaran pembiayaan sekolah	V		Ada dokumen mengenai penghasilan dan pengeluaran uang sekolah selama setahun ber yang telah dikelola dengan baik oleh bendahara sekolah.
10	Daftar gaji guru yang	V		Berisikan tentang daftar

	dikeluarkan sekolah			gaji yang dikeluarkan dari sekolah, gaji yang dikeluarkan dari sekolah untuk staf dan dewan guru yang tidak Pegawai Negeri Sipil diberikan oleh sekolah yang berasal dari dana BOS dan iuran SPP peserta didik.
11	Daftar pengelolaan pembiayaan 5 tahun terakhir	V		Hasil pengelolaan pembiayaan selama 5 tahun terakhir mengenai aset, utang, serta bentuk penanggungjawaban pengelolaan pembiayaan sekolah
12	BKU Dana BOS	V		Buku KAs Umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dalam penggunaan anggaran BOS
13	Rincian objek dana bos 2 tahun terakhir	V		Berisikan tentang rincian objek belanja pegawai, rincian objek belanja barang dan jasa rincian objek belanja modal selama 2 tahun terakhir
14	Dokumen SPJ	V		Sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Memuat pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi, belanja, siapa yang melaksanakan dan keluar dari kegiatan

				tersebut.
15	RKAS	V		Sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen pembiayaan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
16	Jadwal pemeriksaan dalam satu priode pencairan dana dari pemerintah	V		waktu akan dilaksanakannya pemeriksaan dalam satu priode pencairan dana BOS
17	Laoporan pengawasan pembiayaan	V		Pengawasan terhadap kinerja pengurus dan pengelola. Meneliti berkas pembukuan dan administrasi pembiayaan. Memberikan koreksi dan saran
18	Daftar prestasi alumni 3 tahun terakhir	V		Prestasi-prestasi yang pernah dicapai alumni selama 3 tahun terakhir untuk menunjang mutu sekolah



**Gambar.1** Wawancara bersama Bapak Bendahara (Alfi Sahrin) SMP terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah



**Gambar 2.** Wawancara Bersama ibu Kepala Sekolah (Haula Atina) SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Isnaini, S.Pd lahir di Kota Makmur pada tanggal 11 Januari 1971 dari pasangan Muhmude (Alm) dan Siti Zahara (Almh). Memulai pendidikan di SD Negeri 2 Pondok Gajah (1977 – 1983), SMP N Janarata (1983-1986), SPG Negeri Takengon 1986-1989 dan Strata 1 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Serambi Mekkah (2000-2004). Kemudian melanjutkan studi di Pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Lhokseumawe mulai dari tahun 2021-2023. Memulai karir sebagai guru sekolah dasar di SD Negeri 2 Pondok Gajah (1994-2003), SD Negeri Mutiara (2003-2008) dan mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Suku Weh Tenang (2008-2014), SD Negeri Pondok Gajah (2004-2021) SD Negeri Mutiara (2021 – sekarang). Menikah tahun 1993 dengan Jufri Latip dan dikaruniai tiga orang anak (Aula Mira Zikri, Aimaniza SKM, M. Alif Miyazi). Hasil Tesis ini dipublikasikan pada Manajemen Pendidikan dengan judul Manajemen Pembiayaan untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Di SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah.